



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 45.a TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

## Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
Pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
CHERLY USMAN, SH  
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 312.a

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Daftar Tabel .....	5
Daftar Gambar.....	11
BAB I. PENDAHULUAN .....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	16
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	18
1.4. Sistematika Dokumen RKPD .....	20
1.5. Maksud dan Tujuan.....	22
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	23
2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	23
2.1.1. Aspek Geografi .....	23
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	24
2.1.3. Kondisi Topografi.....	25
2.2. Aspek Demografi .....	26
2.2.1. Penduduk .....	26
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	28
2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	28
2.3.2. Struktur Ekonomi Daerah.....	31
2.3.3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita .....	34

2.3.4. Perbandingan Antara Daerah .....	35
2.3.5. Kemiskinan .....	38
2.3.6. Indek Pembangunan Manusia .....	38
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	40
2.4.1. Fokus Pendidikan .....	40
2.4.2. Fokus Kebudayaan .....	43
2.4.3. Fokus Kesehatan.....	45
2.4.4. Fokus Pekerjaan Umum .....	48
2.4.5. Fokus Perumahan.....	49
2.4.6. Fokus Perhubungan.....	50
2.4.7. Fokus Ketenagakerjaan.....	51
2.4.8. Fokus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	52
2.4.9. Fokus Perdagangan .....	53
2.4.10. Fokus Perindustrian .....	54
2.4.11. Fokus Perencanaan Pembangunan .....	54
2.4.12. Fokus Komunikasi dan Informatika .....	55
2.4.13. Fokus Perpustakaan .....	56
2.4.14. Fokus Kearsipan.....	57
2.4.15. Fokus Keamanan dan ketertiban .....	57
2.4.16. Fokus Kelautan Perikanan .....	58
2.4.17. Fokus Kehutanan .....	58
2.4.18. Fokus Pertanian.....	59
2.4.19. Fokus Urusan Ketahanan Pangan .....	60
2.4.20. Fokus Energi dan Sumberdaya Mineral .....	61

2.4.21. Fokus Pariwisata .....	62
2.4.22. Fokus Keagamaan .....	62
2.4.23. Fokus Lingkungan Hidup .....	63
2.4.24. Fokus Pertanahan .....	64
2.4.25. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....	64
2.4.26. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	65
2.4.27. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	66
2.4.28. Urusan Sosial .....	67
2.4.29. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	67
2.4.30. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	68
2.4.31. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	68
2.4.32. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	70
2.4.33. Urusan Statistik .....	70
2.5. Aspek Daya Saing Daerah .....	71
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	71
2.5.2. Fokus Iklim Investasi .....	77
2.6. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD serta Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 .....	78
2.6.1. URUSAN WAJIB .....	79
2.6.2. URUSAN PILIHAN .....	104
2.6.3. Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan .....	109
2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	111
2.7.1. Perekonomian Makro Daerah .....	111
2.7.2. Sosial .....	112

2.7.3. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam .....	112
2.7.4. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar .....	112
2.7.5. Urusan Wajib .....	115
2.7.6. Urusan Pilihan.....	121
2.7.7. Isu-isu Strategis.....	123
2.7.8. Urusan Wajib .....	127
2.7.9. Isu Lingkungan Strategis .....	131
2.7.10. Isu-isu Strategis Nasional .....	134
<b>BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>138</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	138
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018.....	140
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 .....	141
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	143
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	144
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	144
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	150
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	151
<b>BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH..</b>	<b>153</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD 2016-2021 .....	153
4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 .....	163
<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>181</b>
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>281</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 .....	23
Tabel 2.2. Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur.....	25
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2016....	26
Tabel 2.4. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010–2015.....	26
Tabel 2.5. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan .....	27
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 .....	27
Tabel 2.6. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur .....	29
Tahun 2011–2015 (Juta Rupiah).....	29
Tabel 2.7. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas .....	31
Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2015 (%) ...	31
Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dengan migas) .....	35
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011–2015 (Milyar Rupiah).....	35
Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas).....	36
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011–2015 (Persen).....	36
Tabel 2.10. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas).....	37
Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Indonesia .....	37
Tahun 2011–2015 (Persen).....	37
Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota .....	39
Se Provinsi Maluku Tahun 2015.....	39
Tabel 2.12. Angka Melek Huruf di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 – 2015.....	40
Tabel 2.13. Presentase Usia Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2011–2014 .....	41

Tabel 2.14. Persentase Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2014 dan 2015.....	41
Tabel 2.15. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2014.....	41
Tabel 2.16. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2015.....	42
Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni (APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015.....	42
Tabel 2.18. Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014-2015.....	43
Tabel 2.19. Rasio Guru Dengan Murid Jenjang pendidikan di Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2014-2015.....	43
Tabel 2.20. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015.....	44
Tabel 2.21. Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015	44
Tabel 2.22. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 – 2013.....	45
Tabel 2.23. Presentase Balita Menurut Status Gizi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2014.....	46
Tabel 2.24. Perkembangan Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014.....	47
Tabel 2.25. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.....	47
Tabel 2.26. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.....	47
Tabel 2.27. Presentase Pertolongan Persalinan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.....	48
Tabel 2.28. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.....	48
Tabel 2.29. Panjang Jaringan Jalan Menurut Penanganan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015-2016 (km).....	49

Tabel 2.30. Panjang Jaringan Jalan Menurut Penanganan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016 (km).....	49
Tabel 2.31. Presentase Rumah Layak Huni Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015 .....	50
Tabel 2.32. Presentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015.....	50
Tabel 2.33. Bandara, Pelabuhan Laut Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 .	51
Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010–2014.....	52
Tabel 2.35. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014.....	52
Tabel 2.36. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014.....	52
Tabel 2.37. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011–2013 .....	53
Tabel 2.38. Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015 .....	53
Tabel 2.39. Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 – 2015.....	54
Tabel 2.40. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dan Perkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2016 .....	54
Tabel 2.41. perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.....	56
Tabel 2.42. Perkembangan Urusan Perpustakaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013 .....	56
Tabel 2.33. Urusan Kearsipan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.....	57
Tabel 2.44. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 .....	57
Tabel 2.45. Produksi dan Nilai Ikan Menurut Jenis Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2014.....	58

Tabel 2.46. Produksi dan Nilai Produksi Ikan Laut Hasil Olahan dan Awetan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2014 .....	58
Tabel 2.47. Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 .....	59
Tabel 2.48. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013-2015 .....	59
Tabel 2.49. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013-2015 .....	60
Tabel 2.50. Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Penting Nabati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2015.....	61
Tabel 2.51. Produksi Bahan Galian C di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 – 2015.....	61
Tabel 2.52. Pertumbuhan Urusan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2015 .....	62
Tabel 2.53. Perkembangan Pengunjung Objek Wisata Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015 .....	62
Tabel 2.54. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015 .....	63
Tabel 2.55. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015 .....	63
Tabel 2.56. Sertifikat Tanah Yang telah Diterbitkan Oleh BPN Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2015 .....	64
Tabel 2.57. Perkembangan Akte Kelahiran, Pernikahan dan Kamatian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2014.....	65
Tabel 2.58. Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umum dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013.....	65
Tabel 2.59. cakupan peserta KB aktif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015.....	66
Tabel 2.60. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2016 .....	66
Tabel 2.61. Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.....	67

Tabel 2.62. Perkembangan PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.....	67
Tabel 2.63. Pertumbuhan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013 .....	68
Tabel 2.64. Perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013 .....	68
Tabel 2.65. Rasio Jumlah Pol PP Per 10.000 penduduk Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013 .....	69
Tabel 2.66. Bidang Urusan Otda, Pem Um, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013..	69
Tabel 2.67. Perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.....	70
Tabel 2.68. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.....	71
Tabel 2.69. Rata-rata Pengeluaran PerKapita Sebulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014 .....	72
Tabel 2.70. Presentase Pengeluaran PerKapita Sebulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014 .....	72
Tabel 2.71. Pengeluaran Rata-rata PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015 .....	72
Tabel 2.72. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015.....	73
Tabel 2.73. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015.....	73
Tabel 2.74. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013 .....	74
Tabel 2.75. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya, Serta Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013 .....	74
Tabel 2.76. Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013 .....	75
Tabel 2.77. Data Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014.....	76

Tabel 2.78. Jumlah Penduduk Yang Menggunakan Telp/HP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009–2013 .....	77
Tabel 2.79. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009–2013 .....	78
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi .....	141
Tabel 3.2. Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 2015–2016 (dalam satuan Rupiah dan Persen) .....	147
Tabel 3.3. Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Selama Tahun 2015–2016 (dalam rupiah) .....	148
Tabel 3.4. Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016 .....	148
Tabel 3.5. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016 .....	148
Tabel 3.6. Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015–2016 .....	149
Tabel 3.7. Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015 – 2018 .....	149
Tabel 3.8. Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015 – 2018 .....	151
Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2018 .....	152
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016–2021 .....	160
Tabel 4.2. Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur .....	164
Tabel 4.3. REKAPAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR .....	168
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 (dalam .000) .....	181

## Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten SBT (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010) .....	15
Gambar 1.2. Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya (Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004) .....	19
Gambar 1.3. Kedudukan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Diantara Dokumen Perencanaan lainnya .....	20
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Seram Bagian Timur .....	24
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2014 (%) .....	28
Gambar 2.3. Distribusi PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2015 (%) .....	31
Gambar 2.4. Distribusi PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Tahun 2015 (%) .....	33
Gambar 2.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur (dengan migas) tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) .....	34
Gambar 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur (tanpa migas) Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) .....	35
Gambar 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas) Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Indonesia Tahun 2011-2015 (Persen) .....	37
Gambar 2.9. Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2014 .....	39

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun tiga belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2018.

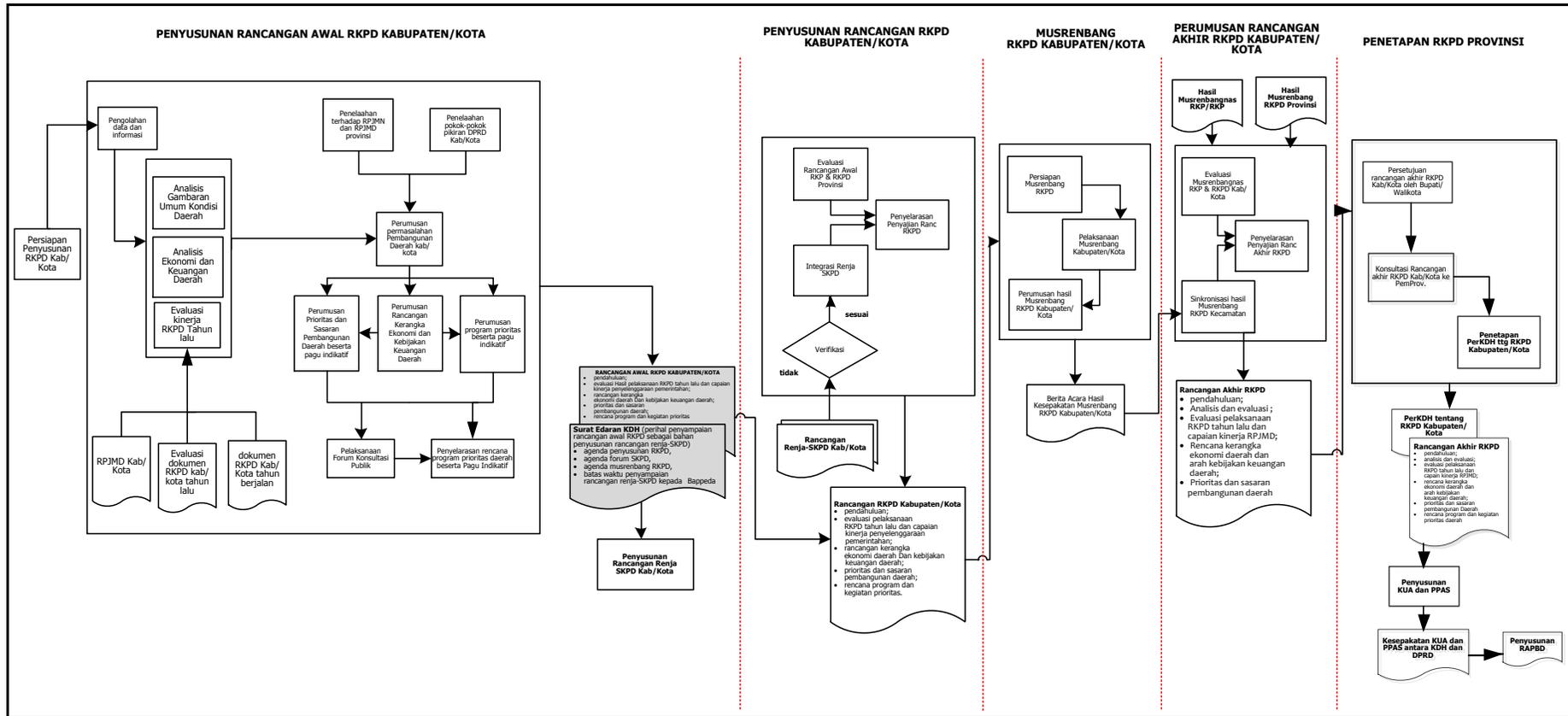
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, RPJP Maluku, RPJM Maluku, RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur dan RKPD Maluku Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antaralain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sedangkan *top down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2006-2025 dan RPJMD Maluku Tahun 2012-2017. Hal ini sejalandengan amanat pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.





Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP Kabupaten SBT (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010)

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

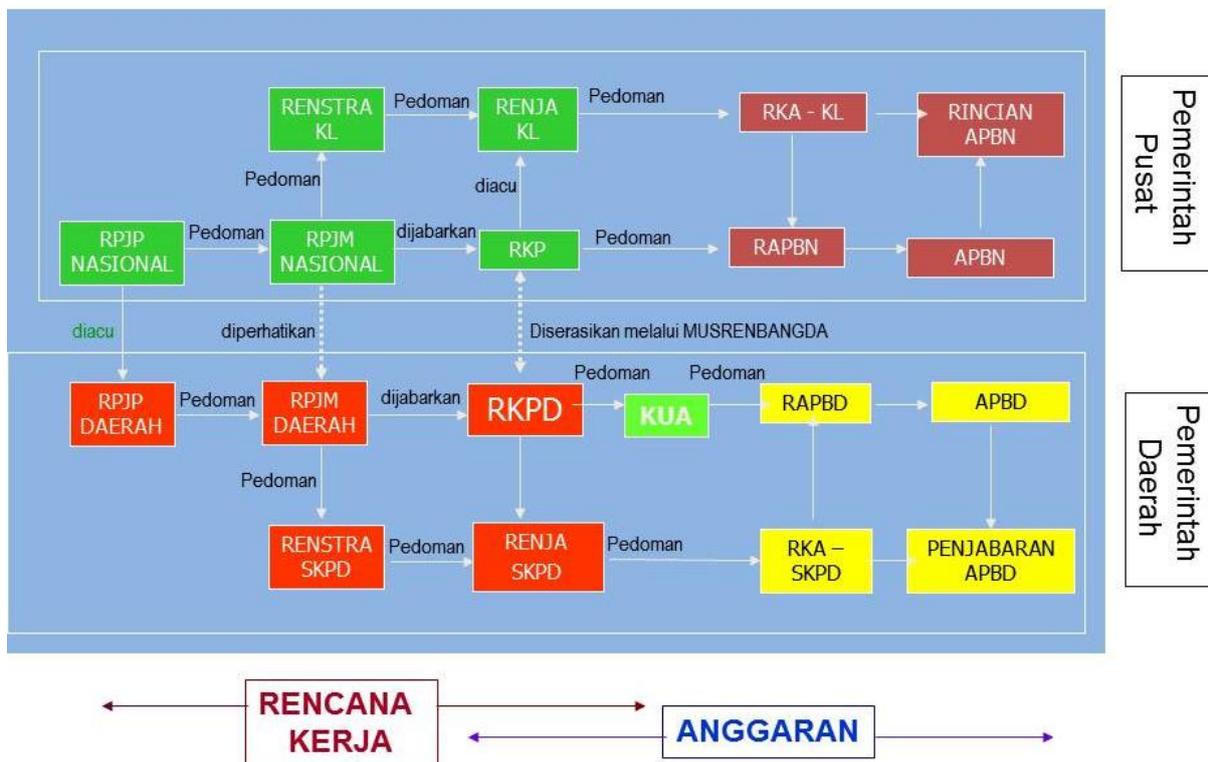
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan

program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerjadalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

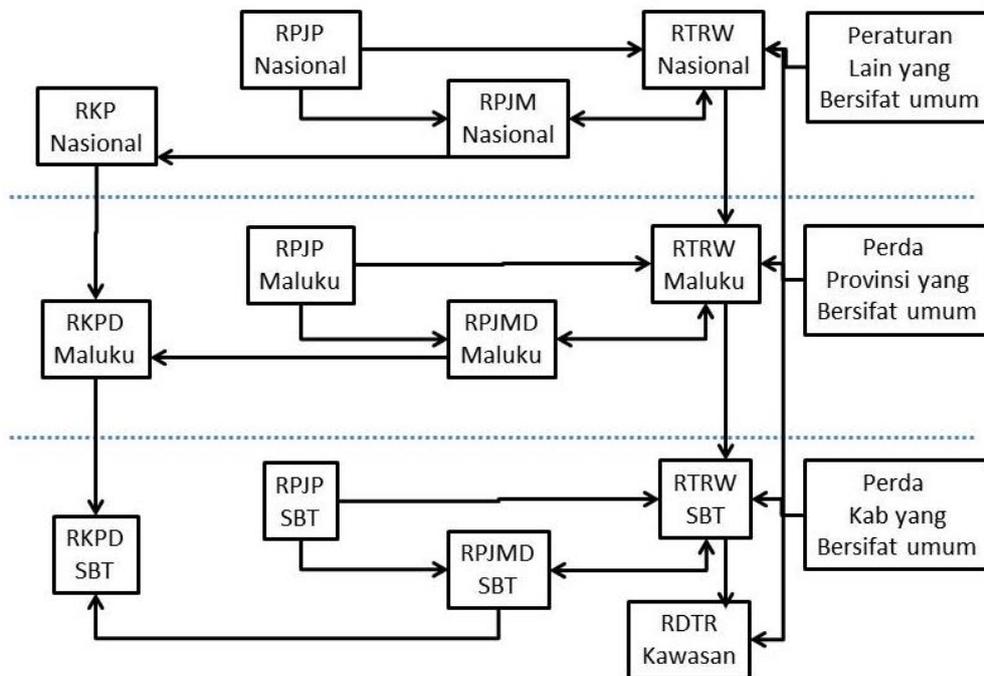


Gambar 1.2. Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya (Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004)

- Mengacu pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPd disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPd disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPd menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.
- RKPd nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPd Tahun 2018 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2018, RKPd Provinsi Maluku Tahun 2018, dan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025. Selain itu kedudukan RKPd Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar seperti di bawah ini.



Gambar 1.3. Kedudukan RKPd Kabupaten Seram Bagian Timur Diantara Dokumen Perencanaan lainnya

## 1.4. Sistematika Dokumen RKPd

RKPd Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPd, proses penyusunan RKPd, kedudukan RKPd tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan

antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Maluku, RTRW Nasional, RTRW Maluku, dan RTRW Kabupaten.

#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

#### 1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### 2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD serta Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

#### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

### **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur dan RKPD Provinsi Maluku.

### 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah pembangunan pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur .

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018

## **BAB VI. PENUTUP**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018;
3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku telah ditetapkan, bahwa secara administrasi kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki luas wilayah seluas 20.656,894 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luas wilayah perairan 14.877.771 km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratan 5.779,123 Km<sup>2</sup>, merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari Provinsi Maluku dari hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari 15 Kecamatan dan 160 Desa.

Sebaran luas wilayah kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

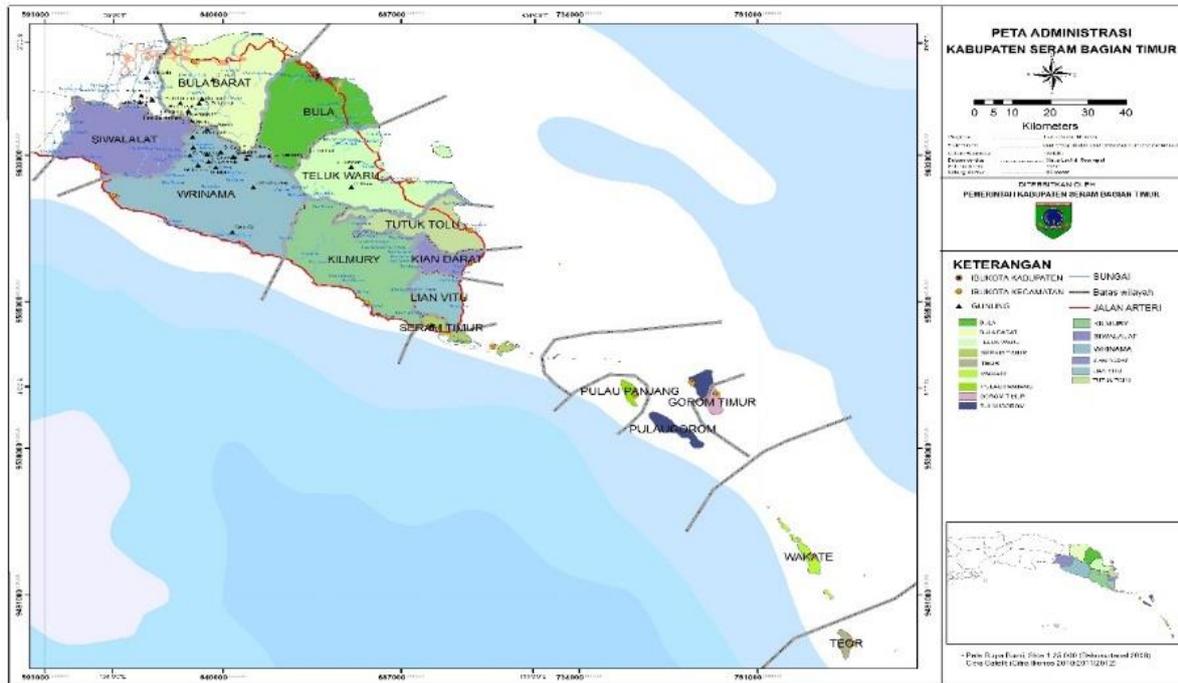
Tabel 2.1. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)	Jumlah Desa
1.	Pulau Gorom	91,303	1,58	12
2.	Wakate	37,58	0,65	14
3.	Teor	23,41	0,41	10
4.	Gorom Timur	29,29	0,51	17
5.	Pulau Panjang	20,53	0,36	6
6.	Seram Timur	73,35	1,27	7
7.	Tutuk Tolu	330,09	5,71	10
8.	Kilmury	837,62	14,49	12
9.	Kian Darat	129,23	2,24	10
10.	Lian Vitu	172,37	2,98	10
11.	Werinama	993,84	17,20	10
12.	Siwalalat	847,19	14,66	12
13.	Bula	643,36	11,13	10
14.	Bula Barat	880,29	15,23	11
15.	Teluk Weru	669,67	11,59	9
<b>Jumlah</b>		<b>5.799,123</b>	<b>100,00</b>	<b>160</b>

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Sedangkan untuk menjelaskan posisi letak geografis dari Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1.Peta Kabupaten Seram Bagian Timur



## 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

### 2.1.2.1. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kabupaten Seram Bagian Timur terletak antara 129° 50'00 - 131° 50'00 Bujur Timur dan 020 50'00" – 040 50'00 lintang selatan, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Laut Seram             |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | :Laut Banda              |
| Sebelah Timur berbatasan dengan   | :Laut Arafura            |
| Sebelah Barat berbatasan dengan   | :Kabupaten Maluku Tengah |

### 2.1.2.2. Posisi geografis

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sekitar 20.656,894 km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah laut seluas 14.877,771 km<sup>2</sup> dan wilayah daratan seluas 5.779,123 km<sup>2</sup>. Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berupa (i) deretan pulau yang berjumlah 49 buah pulau; (ii) mempunyai 132 aliran sungai di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur.

### 2.1.3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada ketinggian rata-rata antara 0-500 m s.d 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %. dataran rendah di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat di Daerah Masiwang, Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan lahan	Rata-rata antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %
2	Ketinggian lahan	Rata-rata antara 0-500 m dan antara 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl)

#### 2.1.3.1. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari air laut, air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Arewan, Kian, Kilaba, Aruan, Masiwang, Kadar, Bitorik, Bemo, Bobot, Tian, Daut, Tunsa, Salas, Balifar dan Sungai Bulawa, serta Sungai Waimiran.

#### 2.1.3.2. Kondisi Klimatologi

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim seirama dengan musim yang ada.

Data perkembangan cuaca sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah, temperatur rata-rata sekitar 27,300C. Dimana temperatur tertinggi rata-rata pada kisaran 30,800C dan minimum rata-rata 25,30°C. Tekanan udara rata-rata setahun 1012,2 Milibar dan kelembaban nisbi rata-rata 79 %. Pada tahun yang sama mengalami hari hujan sebanyak 164 hari, dengan rata-rata curah hunan 100,50 mm per bulan.

Sementara itu, kecepatan angin rata-rata 20,00 knot, sedangkan jumlah hari hujan yang terjadi sepanjang tahun 2015, adalah dalam bulan September sebanyak 3 hari hujan dan dalam bulan Juni sebanyak 23 hari hujan.

## 2.2. Aspek Demografi

### 2.2.1. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur dari 5 Tahun terakhir yaitu Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2016

Kode	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
8107	Kabupaten Seram Bagian Timur	103.189	104.902	106.698	108.406	110.024

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Dengan mengamati data pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan sepanjang kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana jumlah penduduk pada tahun 2012 masih berjumlah 103.189 jiwa sampai dengan tahun 2016 telah tumbuh menjadi 110.024 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

Tabel tentang Laju Pertumbuhan Penduduk dalam periode tahun 2010, 2014, dan 2015 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2010-2015
1.	Pulau Gorom	18.565	20.287	20.612	0.0212	0.0158
2.	Wakate	6.695	7.301	7.418	0.0209	0.0164
3.	Teor	2.556	2.791	2.836	0.021	0.0179
4.	Gorom Timur	6.807	7.124	7.238	0.0123	0.0169
5.	Pulau Panjang	1.913	2.036	2.069	0.0162	0.0147
6.	Seram Timur	19.758	10.951	11.127	-	0.0164
7.	Tutuk Tolu	4.722	4.868	4.946	0.0096	0.0164
8.	Kilmury	4.260	4.511	4.583	0.0146	0.0155
9.	Lian Vitu	-	5.049	5.130	-	0.0158
10.	Kian Darat	-	5.034	5.114	-	0.0159
11.	Werinama	5.036	5.324	5.409	0.0143	0.0169
12.	Siwalalat	4.716	4.986	5.066	0.0144	0.0160
13.	Bula	18.167	15.812	16.065	-	0.0158
14.	Bula Barat	5.870	6.516	6.620	0.0243	0.0153
15.	Teluk Waru	-	4.108	4.173	-	0.0146

<b>Seram Bagian Timur</b>	<b>99.065</b>	<b>106.697</b>	<b>108.406</b>	<b>0.0182</b>	<b>0.0160</b>
---------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Proporsi penduduk usia tidak produktif kelompok umur 0-14 dan >65 tahun menunjukkan angka beban ketergantungan. Pada tahun 2015, angka beban ketergantungan mengalami penurunan menjadi 65,77 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 65 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.5. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

<b>Tahun</b>	<b>0-14 Tahun</b>	<b>15-64 Tahun</b>	<b>≥65 Tahun</b>	<b>Angka Beban Ketergantungan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
2015	39.583	65.394	3.429	65,77

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

## 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menggeliat seiring berjalannya waktu. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami fluktuasi. Dalam pembahasan ini, prospek ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur akan terbagi atas perekonomian dengan minyak dan gas (migas) dan perekonomian tanpa minyak dan gas (migas). Hal ini dikarenakan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan satu-satunya daerah penghasil minyak di Provinsi Maluku. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan migas yaitu 5,82 persen. Nilai ini mengalami perlambatan bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai nilai 8,23 persen. Perlambatan ini seiring dengan melemahnya harga minyak dunia pada tahun 2015. Sedangkan bila dilihat kondisi tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu 6,62 persen. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 5,43 persen. Selisih kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas menunjukkan adanya peran yang signifikan pada kategori tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010–2014 (%)



Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016

Bila dilihat secara keseluruhan, terlihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa peran migas memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan migas terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tanpa migas

cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai 5,82 persen. Nilai ini melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur mencapai 8,23 persen. Hal ini dikarenakan merosotnya harga minyak dunia pada tahun 2015 sehingga menyebabkan nilai tambah pada kategori migas juga menurun. Peran migas tentunya cukup signifikan dalam memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Bila dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas, terlihat nilainya lebih stabil dan cenderung mengalami peningkatan dalam jangka waktu 2011-2015. Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 6,62 persen. Nilai ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tahun yang sama. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa migas yaitu 5,43 persen.

Tabel 2.6. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur  
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2011	1,723,341.91	992,347.22	11,431,888.87	903,601.57
2012	1,963,588.08	1,149,227.29	1,488,346.93	963,264.49
2013	2,144,076.52	1,294,848.74	1,537,041.70	1,008,361.82
2014*	2,438,914.35	1,455,260.46	1,663,493.13	1,063,161.26
2015**	2,209,982.73	1,634,808.91	1,760,234.28	1,133,590.14

Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016

Catatan : \* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara

PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar harga berlaku maupun konstan selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahun. Secara umum, PDRB ADHB dengan migas mengalami fluktuasi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir sedangkan PDRB ADHB tanpa migas menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan nilai tambah migas memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tahun 2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas berjumlah sebesar Rp 2,209,982.73 juta rupiah. Nilai ini mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Berdasarkan tabel 2.6, terlihat ada terjadi penurunan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp 228.931,62. Bila dilihat lebih detail, penurunan ini dikarenakan turunnya nilai tambah minyak pada tahun 2015.

Jika dilihat nilai PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan antar tahunnya. Pada tahun 2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas mencapai Rp 1.634.808,91 juta rupiah. Jumlah ini meningkat sebesar 1,12 kali bila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu 5 tahun, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas telah meningkat sebesar Rp 179.548,45 juta rupiah.

Bila PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur ditinjau atas dasar harga konstan dimana inflasi tidak memengaruhi, terlihat nilai PDRB baik dengan migas maupun tanpa migas mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga 2015. Trend pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pun menunjukkan perkembangan yang positif baik dengan migas maupun tanpa migas meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2012.

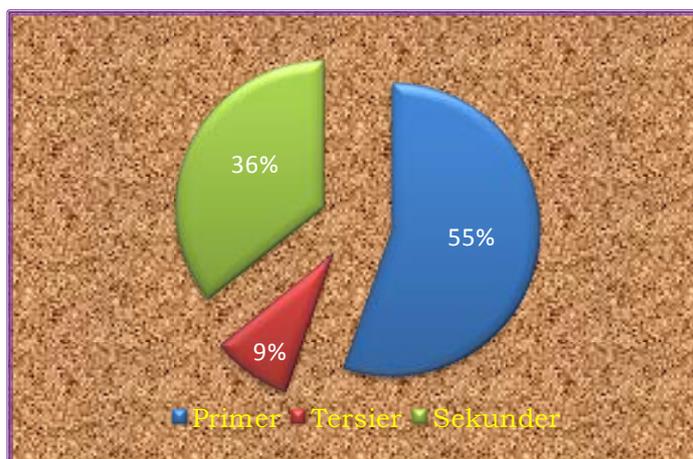
Tahun 2015, nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan migas mencapai nilai Rp 1.760.234,28 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 1,05 kali bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu lima tahun, tren nilai PDRB atas dasar harga konstan terlihat mengalami perkembangan yang positif tiap tahunnya.

Jika mengesampingkan peran migas dalam perhitungan, nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.133.590,14 juta rupiah. Nilai ini naik mengalami peningkatan sebesar 1,002 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu 5 tahun, nilai PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar Rp 229.988,57 juta rupiah dan terlihat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.461.260,46 juta rupiah meningkat dari 1.293.848,74 juta rupiah di tahun 2013. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 maka PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 1,71 kali di tahun 2014 atau sebesar Rp 607.481,89 juta rupiah. Kemudian bila dilihat dari harga konstan 2010, maka PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 1,25 kali dibandingkan PDRB tahun 2010 atau sebesar Rp 210.734,79 juta rupiah

Berdasarkan Gambar 23, kelompok pendapatan primer masih mendominasi struktur PDRB di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menyerap sekitar 53,33 persen dari total PDRB ADHB. Sektor tersier merupakan penyumbang kedua terbesar dengan nilai 35,76 persen, sedangkan sektor sekunder menyumbang 8,91 persen dari keseluruhan total PDRB ADHB.

Gambar 2.3. Distribusi PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2015 (%)



Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2016

### 2.3.2. Struktur Ekonomi Daerah

Hingga tahun 2015, struktur ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori utama. Ketiga kategori tersebut adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta sektor konstruksi. Kontribusi kategori-kategori tersebut pada tahun 2015 masing-masing, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,20 persen, kategori pertambangan dan penggalian sebesar 27,13 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,41 persen. Jika ditotal kontribusi ketiga sektor tersebut mencapai 71,74 persen atau sekitar Rp 158.544.160,93 juta. Kemudian 28,26 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Seram Bagian Timur atau senilai Rp 4.480.457.987,83 juta disumbangkan oleh kategori lainnya.

Tabel 2.7. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.44	22.71	23.66	23.40	28.20
Pertambangan dan Penggalian	43.19	42.26	40.42	41.20	27.13
Industri Pengolahan	1.15	1.18	1.25	1.25	1.59
Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
Konstruksi	5.07	5.27	5.63	5.74	7.24
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	5.13	5.30	5.54	5.59	6.96

Lapangan Usaha	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sepeda motor					
Transportasi dan Pergudangan	2.07	1.93	2.07	2.14	2.72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.37	0.38	0.41	0.40	0.50
Informasi dan Komunikasi	0.56	0.51	0.52	0.51	0.63
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.12	1.19	1.27	1.27	1.59
Real Estate	0.34	0.34	0.34	0.33	0.40
Jasa Perusahaan	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	12.60	13.17	13.12	12.67	16.41
Jasa Pendidikan	2.02	1.98	2.05	1.97	2.39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.26	2.24	2.20	2.05	2.47
Jasa Lainnya	1.46	1.33	1.32	1.29	1.55
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

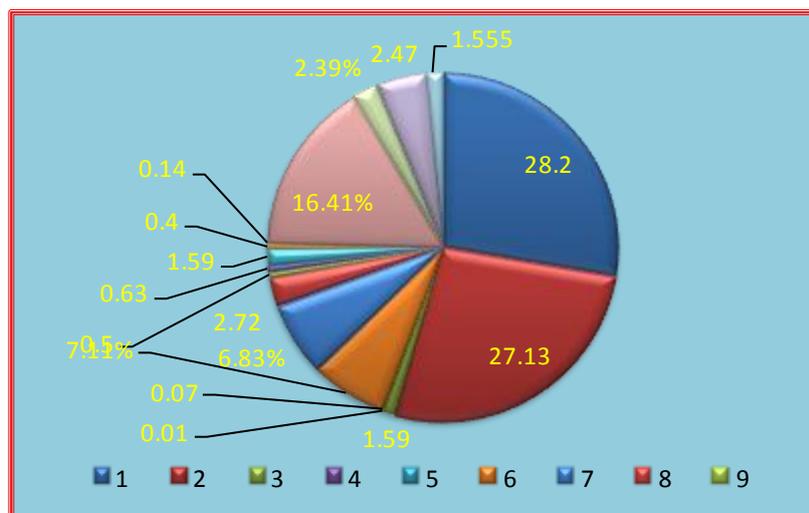
Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

Selama kurun waktu 2011-2015, kategori pertambangan dan penggalian merupakan dalam membentuk PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur. Besar kontribusi dari sektor tersebut mencapai 41,20 persen terhadap total PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, trend ini berubah pada tahun 2015. Kategori pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan penyumbang nilai tambah terbesar dengan persentase mencapai 28,20 persen. Terjadinya pergeseran struktur perekonomian ini dikarenakan buruknya kondisi pasar minyak dunia di tahun 2015.

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan kontributor terbesar ketiga mempunyai andil sebesar 16,41 persen dalam membentuk PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2015. Kategori konstruksi memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 sebesar 7,24 persen. Peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga cukup besar dalam PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur. Tahun 2014, peran kategori ini sebesar 6,96 persen.

Secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur dapat ditunjukkan pada gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4. Distribusi PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Tahun 2015(%)



Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

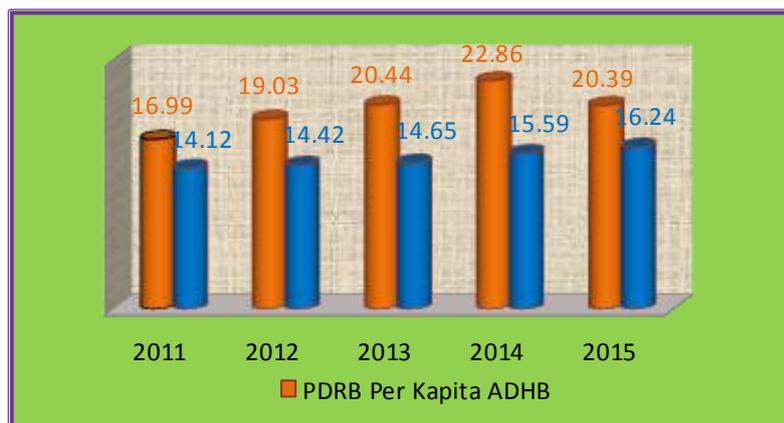
Keterangan :

1. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Kategori Pertambangan dan Penggalian
3. Kategori Industri Pengolahan
4. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas
5. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Kategori Konstruksi
7. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Kategori Transportasi dan Pergudangan
9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Kategori Informasi dan Komunikasi
11. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Kategori Real Estate
13. Kategori Jasa Perusahaan
14. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Kategori Jasa Pendidikan
16. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Kategori Jasa Lainnya

### 2.3.3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu negara atau daerah. Nilai ini didapat dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk di tahun tertentu. Dengan nilai ini, kita bias melihat berapa besaran PDRB yang didapat oleh setiap penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar 2.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur (dengan migas) tahun 2011–2015 (Juta Rupiah)

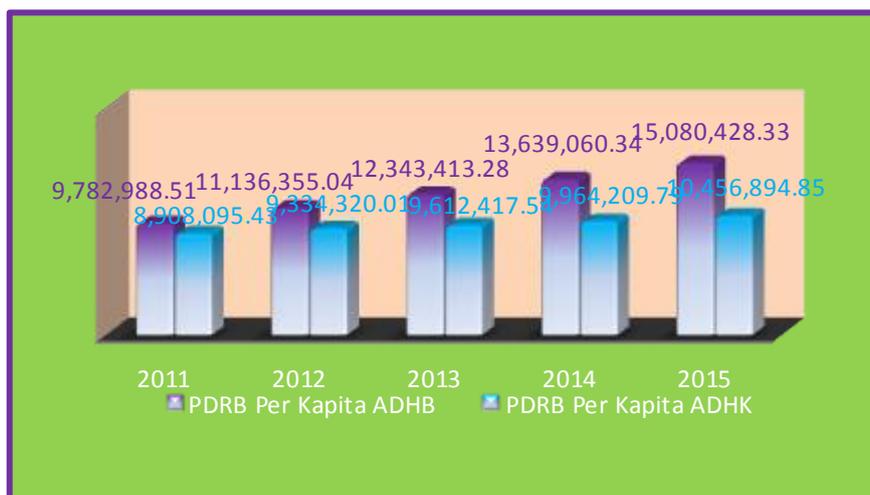


Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur dengan migas terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tahun 2011, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2011 bernilai Rp 16,99 juta. Nilai ini terus naik pada tahun 2012 dimana PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Seram Bagian Timur bernilai Rp 19,03 juta. Dan pada tahun 2015, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah Rp 20,39 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, kenaikan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 20,01 persen.

Bila dilihat secara riil, maka PDRB Per Kapita ADHK dengan migas yang diterima oleh penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2011 adalah sebesar Rp 14,12 juta rupiah. Nilai ini meningkat pada tahun 2015 dimana nilai PDRB per kapita tanpa migas yang diterima adalah Rp 16,24 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, nilai PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur meningkat sebesar 15,01 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB ADHK meningkat sebesar 16,36 persen dengan nilai peningkatan sebesar Rp 1.402.569.

Gambar 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur(tanpa migas)  
Tahun 2011–2015 (Juta Rupiah)



Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

Bila diperhatikan secara seksama, adanya faktor migas memberikan pengaruh yang cukup besar bagi PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa migas terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tahun 2011, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2011 bernilai Rp 9.782.988,51 Nilai ini terus naik pada tahun 2012 dimana PDRB Per Kapita ADHB tanpa migas Kabupaten Seram Bagian Timur bernilai Rp 11.136.355,04. Dan pada tahun 2015, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah Rp 15.080.428,33. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, kenaikan PDRB per Kapita ADHB tanpa migas Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 54,15 persen Bila dilihat secara riil, maka PDRB Per Kapita ADHK tanpa migas yang diterima oleh penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2011 adalah sebesar Rp 8.908.095,43. Nilai ini meningkat pada tahun 2015 dimana nilai PDRB per kapita tanpa migas yang diterima adalah Rp 10.456.894,85. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, nilai PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur meningkat sebesar 17,39 persen.

#### 2.3.4. Perbandingan Antara Daerah

Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dengan migas)  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011–2015 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**
Maluku Tenggara Barat	1.149,70	1.337,54	1.502,38	1.714,53	1.892,15
Maluku Tenggara	1.354,68	1.569,02	1.795,65	2.063,96	2.313,51
Maluku Tengah	4.016,97	4.610,75	5.210,80	5.920,34	6.481,52
Buru	1.006,77	1.061,58	1.108,48	1.177,52	1.238,09
Kepulauan Aru	1.542,7	1.810,04	2.072,96	2.360,85	2.614,65
Seram Bagian Barat	1,374,817 .94	1,576,243 .47	1,783,068 .71	2,023,154 .73	2,259,329 .37

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**
Seram Bagian Timur	1.723,34	1.963,58	2.144,07	2.438,92	2.209,98
Maluku Barat Daya	700.19	817.95	939.94	1.116,91	1.192,94
Buru Selatan	607.39	691.22	790.37	901.53	1.015,70
Ambon	6.795,89	7.839,71	8.822,99	9.938,01	11.049,44
Tual	1.015,95	1.191,41	1.364,34	1.565,98	1.764,53
<b>MALUKU</b>	<b>21.367,86</b>	<b>24.661,76</b>	<b>27.834,44</b>	<b>31.653,09</b>	<b>34.344,59</b>

Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

Catatan : \* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara

Hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Timur menempati peringkat ke lima yakni dengan total PDRB ADHB dengan migas sebesar Rp 2.209,98 Milyar atau 6,43 persen dari Keseluruhan PDRB ADHB Provinsi Maluku. Tiga urutan Kabupaten/Kota di Maluku yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Provinsi Maluku yaitu Ambon, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru. Demikian pula dengan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2014. Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Timur menempati peringkat ke lima dengan nilai PDRB ADHK Rp 1.760,23 Milyar dengan kontribusi 7,09 persen dari keseluruhan total PDRB Provinsi Maluku. Tiga urutan Kabupaten/Kota di Maluku yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Provinsi Maluku yaitu Ambon, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru.

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011-2015 (Persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**
Maluku Tenggara Barat	7.19	7.30	5.15	5.95	5.20
Maluku Tenggara	5.98	7.07	5.78	6.18	5.54
Maluku Tengah	5.40	6.91	4.72	6.27	5.41
Buru	5.44	5.44	4.42	6.23	5.14
Kepulauan Aru	5.25	7.84	6.14	6.74	4.69
Seram Bagian Barat	5.87	6.39	4.55	6.00	6.11
Seram Bagian Timur	8.54	3.94	3.27	8.23	5.82
Maluku Barat Daya	5.65	7.43	6.33	14.06	1.19
Buru Selatan	4.63	5.20	5.37	6.25	6.79
Ambon	7.14	8.33	6.02	5.93	6.30
Tual	5.90	7.90	6.06	6.21	5.68
<b>MALUKU</b>	<b>6.34</b>	<b>7.16</b>	<b>5.24</b>	<b>6.61</b>	<b>5.44</b>

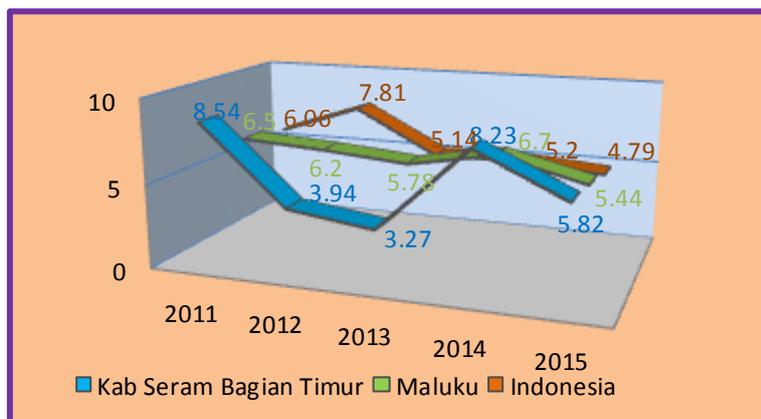
Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

Catatan : \* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara

Bila melihat struktur laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru Selatan tercatat memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dengan nilai 6,79 persen. Nilai ini bahkan melebihi Kota Ambon yang merupakan ibukota provinsi yang menempati urutan kedua dengan mencapai 6,30 persen. Untuk laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen. Sedangkan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2015 menempati urutan keempat dengan nilai laju pertumbuhan sebesar 5,82 persen.

Gambar 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas) Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Indonesia Tahun 2011–2015 (Persen)



Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur cenderung fluktuatif bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dan Indonesia. Hal ini terutama disebabkan fluktuasi dari nilai tambah bruto pada kategori pertambangan dan penggalan, terutama pada sub kategori perminyakan. Meskipun demikian, nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 lebih tinggi dari nilai Provinsi Maluku dan Nasional. Artinya, Kabupaten Seram Bagian Timur mampu menjaga memacu kegiatan-kegiatan perekonomian yang akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi tersebut melebihi Provinsi Maluku dan Indonesia.

Tabel 2.10. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas) Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Indonesia Tahun 2011–2015 (Persen)

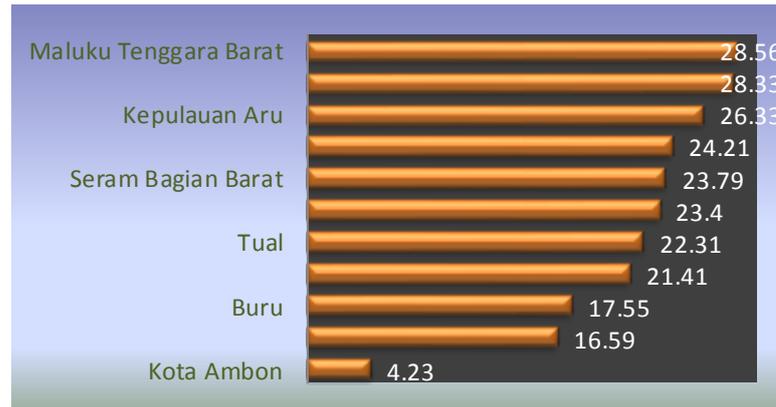
Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Seram Bagian Timur	8,54	3,94	3,27	8,23	5,82
Maluku	6,5	6,2	5,78	6,7	5,44
Indonesia	6,06	7,81	5,14	5,2	4,79

Sumber data : Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2015/2016

### 2.3.5. Kemiskinan

Jika dilihat lebih lanjut, kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, terlihat bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur menduduki peringkat ke 6 dapat dilihat pada gambar 2.8. berikut ini.

Gambar 2.8.  
Grafik Perbandingan Kemiskinan Antar Kab/Kota Maluku Tahun 2016



Sumber data : KEKR BI, Tahun 2017.

### 2.3.6. Indeks Pembangunan Manusia

#### 2.3.6.1. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.9. Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2014



Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2016

### 2.3.6.2. Disparitas Pembangunan Manusia

Walaupun perkembangan angka IPM dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, namun secara kumulatif peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun 2015 berada pada rangking ke 10 dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Maluku. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Tahun 2015

Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat Daerah
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	60,26	9
Kabupaten Maluku Tenggara	63,35	5
Kabupaten Maluku Tengah	68,85	2
Kabupaten Kepulauan Aru	60,50	8
Kabupaten Buru	65,75	3
Kabupaten Seram Bagian Barat	63,05	6
Kabupaten Seram Bagian Timur	60,27	10
Kabupaten Maluku Barat Daya	58,64	11
Kabupaten Buru Selatan	61,48	7
Kota Ambon	79,30	1
Kota Tual	65,20	4
<b>Maluku</b>	<b>67,05</b>	<b>24 (Nasional)</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Maluku, 2016

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya

untuk meningkatkan peringkat IPM kearah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

## 2.4. Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1. Fokus Pendidikan

Aspek pendidikan sampai saat ini menjadi salah satu indikator penting bagi sebuah negara, khususnya Indonesia. Pendidikan yang baik, dengan pelaksanaan yang benar, dan berkualitas tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya bagi pembangunan.

Pendidikan merupakan bahan baku yang mampu melahirkan generasi - generasi terdidik untuk mencapai pemberdayaan manusia yang optimal dan berkelanjutan. Tanpa pendidikan, tentu sebuah negara akan dikatakan kurang maju dan kurang berkembang. Oleh karena itu, perlunya membangun pendidikan menjadi sebuah urgensi yang hendaknya segera ditangani secara intensif dan berkesinambungan.

Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain meliputi : Angka melek huruf, Angka pendidikan yang ditamatkan, Angka rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi murni, Angka partisipasi kasar.

#### 2.4.1.1. Angka Melek Huruf (AMH), Persentase Usia Sekolah, Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berikut ini dapat dilihat capaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2015

Tabel 2.12. Angka Melek Huruf di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 – 2015

Tahun					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
98,14	94,91	95,32	96,96	98,17	98,65

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas seperti disajikan dalam tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13. Presentase Usia Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2011-2014

Tahun	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
2011	40,98	18,22	16,99	23,82
2012	47,98	17,00	14,92	20,03
2013	49,65	19,33	13,62	17,40
2014	47,89	19,37	13,81	18,93

Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2016

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas seperti disajikan dalam tabel 2.14. berikut.

Tabel 2.14. Persentase Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2014 dan 2015

Partisipasi Sekolah	2014			2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.17	7.48	43.31	0.63	0.29	0.47
Masih Sekolah	24.85	24.00	24.43	80.27	79.65	79.98
Tidak Sekolah Lagi	73.97	68.53	71.27	19.10	20.05	19.56

Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2016

#### 2.4.1.2. Rata-rata Lama Sekolah

Tabel 2.15. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 - 2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Lama Sekolah	7,06	7,14	7,62	7,27

Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2016

#### 2.4.1.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS), merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran

yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Untuk lebih jelasnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Jenjang Pendidikan dari Tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.16. berikut ini :

Tabel 2.16. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2015

Kelompok Umur	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
7 - 12	98,74	99,60	98,34	99,38
13 – 15	89,75	88,59	92,27	96,44
16 – 18	63,99	69,45	74,54	77,87

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dengan sasaran dari program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP).

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni (APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

Kelompok Umur	Tahun 2015
7 - 12	96,11
13 – 15	73,43
16 – 18	55,40

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.1.4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Murid Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Pemahaman Jumlah ketersediaan sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data Jumlah ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18. Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Sekolah	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/SMK/MAN	Rasio (%)
2014	258	21.359	7.345	4.016	0,78
2015	255	37.024	10.716	14.173	0,77

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

#### 2.4.1.5. Rasio Guru per Murid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud.

Data dan informasi rasio antara murid dengan guru di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19. Rasio Guru Dengan Murid Jenjang pendidikan di Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2014-2015

Tahun	Uraian	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/SMK/MA
2014	Jumlah Murid	21.359	7.345	4.016
	Jumlah Guru	1.179	650	291
	Rasio Guru dengan Murid	18.12	11.30	13,80
2015	Jumlah Murid	37.024	10.716	14.173
	Jumlah Guru	1.244	693	559
	Rasio Guru dengan Murid	29.76	15.46	25.35

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2014-2015

#### 2.4.2. Fokus Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data tentang perkembangan pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.20. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

Nama Situs/ Bangunan Bersejarah	Lokasi Situs Bangunan Bersejarah		Pengelola
	Desa	Kecamatan	
Monumen Tulabeal Gorun Riun	Kataloka	P. Gorom	Pemerintah Daerah
Makam Pahlawan Mayor Abdullah	Geser	Seram Timur	Pemerintah Daerah
Masjid Tua Giro Gaja	kataloka	P. Gorom	Pemerintah Daerah
Kapal Tua Bakoka	Bati Kilwouw	Kian Darat	Pemerintah Daerah
Masjid Tua Kilbaren	waru	Waru	Pemerintah Daerah
Bentng Kosongat	Keffing	Seram Timur	-
Sumur Tua	Ondor	Pulau Gorom	-
Sumur Tua	Kataloka	Pulau Gorom	-

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016.

Tabel 2.21. Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

Tarian Daerah/Rakyat	Musik Tradisional	Keterangan
Wali-Wali Wosa	Tipa Siwat	Penjemputan
Tari Burung	-	Penjemputan
Tari Oya	-	-
Tari Tata Kora	-	Ikatan Persaudaraan
Tari Wayonan	-	Ikatan Persaudaraan
Tari Bongkorey	-	Penjemputan
Tari Lily	-	Pelantikan
Tari Lenso	-	Penjemputan
Tari Esariun	-	Pelantikan/pernikahan dalam keluarga Raja (Kepala Desa
Tari Lusi	-	Pelantikan
Tari Odar Lean	-	Pelantikan Raja
Tari Hasa-Hasa	-	Penjemputan
Tari Naga	-	Pelantikan Raja-raja
Tari Kelibata	-	-
Tari Parisa	-	Pelantikian dan Perjamuan Tamu
Tari Tiwalbuan	-	-
Tari Kubasau	-	-
Tari Waur Basiwoe	-	-

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016.

### 2.4.3. Fokus Kesehatan

Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja bidang kesehatan, dapat dilihat dengan pencapaian yang meliputi antara lain pencapai indikator pencapaian angka usia harapan hidup dan prosentase balita gizi buruk.

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Demikian pula program dan kegiatan bidang urusan gizi, dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan balita di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sepanjang kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pencapaian target indikator dimaksud, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini.

#### 2.4.3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tabel 2.22. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 – 2013

Angka Usia Harapan Hidup			
Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
65,86	66,07	66,28	66,51

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2015

Dari data diatas terlihat, bahwa usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami peningkatan, yaitu jika pada tahun 2010 usia harapan hidup masih adalah 65,86 tahun, maka pada akhir tahun 2011 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 66,07 tahun. Sedang pada tahun 2013 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 66,51 tahun. Hal ini menandakan, bahwa program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan dalam empat (empat) tahun terakhir, dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### 2.4.3.2. Gizi Balita

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Penelitian status gizi merupakan

pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat. Sebagaimana tercantum dalam tabel 2.23. berikut.

Tabel 2.23. Presentase Balita Menurut Status Gizi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2014

Status Gizi	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Gizi Buruk	0,09	0,03	-
Gizi Kurang	17	10	17
Gizi Baik	82	91	84
Gizi Lebih	0,03	0,5	1

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2015

#### 2.4.3.3. Perkembangan Posyandu Per Satuan Balita

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan diselenggarakannya posyandu:

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- Membudayakan NKKBS.
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pada implementasinya posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Perkembangan posyandu di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24. Perkembangan Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jumlah Posyandu	163	191	201
2	Jumlah Balita	5.208	9.717	10.683
	<b>Rasio (%)</b>	<b>3,13</b>	<b>1,97</b>	<b>1,88</b>

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.4.3.4. Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang sering dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Klinik dan Poskesdestahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas	16	16	18	19	19
Posyandu	163	163	191	212	212
Klinik	1	1	1	2	3
Poskesdes	-	-	4	4	3

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

Tabel 2.26. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015

Tenaga Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2015
Tenaga Medis	26	34	21	21	29
Tenaga Keperawatan	197	202	287	81	411
Tenaga Kebidanan	58	71	97	206	111
Tenaga Kesehatan Lainnya	10	12	10	62	135

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

Faktor penting lainnya untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan tenaga penolong persalinan bayi. Masih banyak masyarakat yang mempercayakan penolong persalinan pada mereka yang bukan tenaga kesehatan, seperti dukun, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan. Tabel 2.27 berikut ini dapat dilihat persentase pertolongan persalinan bayi di Kabupaten Seram Bagian Timur dari Tahun 2011-2015.

Tabel 2.27. Presentase Pertolongan  
Persalinan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
2011-2015

Penolong Kelahiran	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter	2,46	2,76	1,56	0,67	8,05
Bidan	22,57	19,67	14,87	19,34	25,20
Tenaga medis lainnya	0,96	0,99	0,54	0,26	1,74
Dukun	69,45	74,24	83,03	78,09	64,44
Famili	4,56	2,35	0,00	1,64	-
lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Pada tabel 2.28. diketahui puskesmas/pustu merupakan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk yang berobat jalan bahwa pada tahun 2015, yakni sebesar 72,03 persen, diikuti praktek dokter sebesar 18,47 persen, Rumah Sakit sebesar 5,00, petugas kesehatan sebesar 2,45 persen, dan lainnya sebesar 2,06 persen.

Tabel 2.28. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut  
Tempat Berobat Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015

Tempat Berobat	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	5,23	0,94	1,43	1,79	5,00
Praktek Dokter	16,95	8,03	11,70	7,31	18,47
Puskesmas/Pustu	54,80	81,50	66,96	69,37	72,03
Petugas Kesehatan	31,80	9,93	24,16	21,30	2,45
Lainnya	0,53	1,57	2,53	4,29	2,06

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.4. Fokus Pekerjaan Umum

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan, merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis ("engineering criteria") yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- Mantap sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas;
- Mantap marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang

ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya; dan

- Tidak mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Perkembangan jenis jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kondisi baik selama 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29. Panjang Jaringan Jalan Menurut Penanganan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016 (km)

Jenis Permukaan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
Diaspal	79,4	8,0	211,0	83,0	38,8	151,8
Kerikil	15,0	59,6	111,7	7,0	-	144,3
Tanah	-	40,0	52,6	-	114,5	108,0
Tidak Dirinci	-	15,0	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>122,6</b>	<b>375,3</b>	<b>90,0</b>	<b>153,3</b>	<b>404,1</b>

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seram Bagian Timur.

Tabel 2.30. Panjang Jaringan Jalan Menurut Penanganan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016 (km)

Jenis Permukaan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
Diaspal	94,4	8,0	34,256	81,2	32,71	214,41
Kerikil	-	-	132,084	-	-	4,68
Tanah	-	-	24,0	8,8	19,41	84,0
Tidak Dirinci	-	114,6	116,141	-	101,28	101,04
<b>Total</b>	<b>94,4</b>	<b>122,6</b>	<b>375,3</b>	<b>90,0</b>	<b>153,3</b>	<b>404,1</b>

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seram Bagian Timur.

#### 2.4.5. Fokus Perumahan

Presentase rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur rumah layak huni, antara lain adalah jenis atap rumah, dinding rumah dan lantai rumah, serta luas lantai.

Pertumbuhan prosentase rumah layak huni di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31. Presentase Rumah Layak Huni Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015

Kriteria	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Atap Rumah:					
Seng	66,98	62,08	64,59	63,90	67,38
Ijuk/rumbia	16,98	13,31	15,28	12,52	12,72
Lainnya	16,17	24,61	20,13	23,58	19,90
Dinding Rumah:					
Tembok	59,71	62,24	65,96	62,36	64,49
Kayu	31,64	32,10	28,22	28,94	30,34
lainnya	8,65	5,66	5,73	8,70	5,17
Lantai Rumah:					
Tanah	11,50	13,00	10,60	15,27	15,20
Bukan tanah	88,50	87,00	89,40	84,73	84,80
Luas Lantai (M <sup>3</sup> ):					
<20	3,48	2,24	3,37	2,75	2,92
20-49	44,56	51,70	40,13	39,89	33,17
50-99	41,08	37,99	46,05	50,03	54,25
100>	10,98	8,07	10,45	11,14	9,66

Sumber data Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Berikut ini Presentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015.

Tabel 2.32. Presentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015

Sumber Air Minum	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Air Dalam Kemasan	0,27	4,86	5,89	0,00	9,23
Pompa	2,27	1,82	2,86	2,65	0,00
Sumur Terlindung	52,84	53,34	42,86	47,70	39,77
Sumur Tak Terlindung	1,68	3,46	14,31	9,55	20,01
Mata Air Terlindung	12,63	19,45	18,53	24,74	15,18
Mata Air Tak Terlindung	6,39	5,10	8,05	3,31	14,41
Air Sungai	4,73	2,64	3,18	5,17	0,98

Sumber data Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.6. Fokus Perhubungan

Salah satu indikator pengukuran capaian target urusan perhubungan adalah banyak Bandara, Pelabuhan laut dan Terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/ bandara bisa diartikan sebagai

sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Moda transportasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah transportasi jenis pelayaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Saat ini pelayaran yang sedang dikelola oleh swasta adalah pelayaran untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gurom, sebanyak 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Sedangkan pelayaran yang dikelola oleh pemerintah untuk rute Geser – Bula untuk sementara 1 kali pelayaran dalam seminggu.

Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pertumbuhan pelabuhan laut dan bandara di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33. Bandara, Pelabuhan Laut Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

Uraian	Spesifikasi				
	lokasi	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
Bandara	Bula	Lapter Swasta	23	SD-360	Gravel
	Kufar	Lapter Pemerintah	12	50,x1200m	Hotmix
Pelabuhan Laut: Sesar.	Bula	-	-	50 m	Beton
Geser	Seram Timur	-	-	50 m	Beton
Penyeberangan ASDP	Seram Timur	-	-	50 m	Beton
Air Kasar	Tutuk Tolu	-	-	250 m	Beton
Pelabuhan Kesui	Wakate	-	-	50 m	Beton
Gorom	Gorom	-	-	100 m	Beton
Kota Sirih	Gorom Timur	-	-	60 m	Beton
Bemo	Werinama	-	-	100 m	beton

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.7. Fokus Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Keberhasilan target capaian indikator penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2010-2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010–2014

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.443	2.462	1.080	1.126	341
Tidak/Belum Tamat SD	7.993	8.450	7.818	5.110	4.804
Tamat SD	12.664	12.662	9.405	11.092	12.455
Tamat SLTP	7.498	8.307	6.869	5.219	5.223
Tamat SLTA	5.648	9.077	8.042	9.150	8.016
D-I/II/III dan S1/S2	2.116	2.793	3.763	2.859	2.119

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.35. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15 – 24	3.326	1.117	4.443
25 – 54	18.743	6.269	25.012
55+	2.893	610	3.503
<b>Jumlah</b>	<b>24.962</b>	<b>7.996</b>	<b>32.958</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.36. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	15.426	3.150	18.396
Industri	2.011	621	2.632
Perdagangan	1.904	2.461	4.365
Jasa-jasa	2.721	1.534	4.255
Lainnya	3.080	230	3.310
<b>Jumlah</b>	<b>24.962</b>	<b>7.966</b>	<b>32.958</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.4.8. Fokus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan. Perkembangan jenis berdasarkan jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.37. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013

Jenis Koperasi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
KUD	15	21	21	20	20
KSU	-	80	83	84	88
KPN	5	6	6	6	7
KOPKAR	-	-	3	3	6
KOPPERIK	-	5	6	7	8
KOPPAS	-	2	2	2	2
KOPWAN	2	2	2	2	2
KOPBUN	-	2	3	3	2
Lainnya	60	26	27	31	42
<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>144</b>	<b>153</b>	<b>158</b>	<b>177</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

#### 2.4.9. Fokus Perdagangan

Jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum; (i) perkembangan penerbitan SIUP; (ii) perkembangan penerbitan TDP menurut bentuk perusahaan; (iii) jumlah sarana perdagangan menurut jenis; dan (iv) pada urusan perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38. Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 - 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum :					
PT ;	14	15	19	15	3
CV/Firma;	16	16	16	10	59
Koperasi;	10	21	10	129	4
Perorangan;	43	79	145	19	98
lainnya	-	-	-	-	-
Perkembangan penerbitan SIUP :					
Perusahaan besar;	8	1	-	10	-
Perusahaan menengah;	20	-	14	5	-
Perusahaan kecil	82	39	95	97	-
Perkembangan penerbitan TDP menurut bentuk perusahaan :					
PT;	8	1	9	15	-
Koperasi;	7	11	10	10	-

CV;	20	-	16	19	-
Firma;	-	-	-	-	-
P.O;	82	39	145	129	-
lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah sarana perdagangan menurut jenis:					
Pasar umum;	1	1	1	1	2
Pasar desa;	5	5	-	-	-
Toko;	77	90	3	2	26
Kios;	838	849	64	43	25
Rumah makan/restoran	48	49	1	1	3

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.4.10. Fokus Perindustrian

Kemajuan sektor industri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan salah satu perhatian pemerintah yang utama. Sektor industri di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur. Sampai dengan akhir tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39. Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 – 2015

Tahun	Jenis Industri					
	Makanan dan Minuman	Mebeleur	Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	Barang-barang dari Logam Kecuali mesin dan Peralatannya	Kendaraan Bermotor	Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya
2014	10	1	1	12	1	32
2015	80	15	-	-	-	50

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.4.11. Fokus Perencanaan Pembangunan

Data tentang ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Bupati dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dan Perkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2016

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	tad	tad	tad	84,80	85,69

Sumber data : Bappeda Kab. Seram Bagian Timur

#### 2.4.12. Fokus Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Jumlah wartel/warnet, adalah ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel (warung telekomunikasi), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Sedangkan warnet (warung internet), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Terkait dengan hal tersebut, maka jaringan stasiun telepon seluler yang telah beroperasi telah ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Pulau Gorom.

Sementara itu, untuk pelayanan kantor pos dan giro telah ada sebanyak 3 unit. Namun yang dapat beroperasi secara penuh baru 2 kantor, yaitu Kantor Pos di Kecamatan Bula dan Kantor Pos di kecamatan Seram Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah warnet/wartel; (iii) dan jumlah web site milik pemda; per tahun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41. perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	15	18	24	28	29
2	Jumlah Warnet/Wartel	35	43	50	65	73
3	Jumlah Web Site Milik Pemda	1	2	12	12	13

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2014

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi, maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sementara itu, Semakin besar jumlah wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

#### 2.4.13. Fokus Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dapat diukur antara lain dengan pencapaian target indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42. Perkembangan Urusan Perpustakaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian Data	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Perpustakaan	21	21	21	21	21
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	5.219	5.600	5.650	6.055	6.455
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	6.800	7.070	7.400	7.20	7.700

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2014

#### 2.4.14. Fokus Kearsipan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33. Urusan Kearsipan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pengelolaan Arsip Secara Terpadu	15	15	18	18	20
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	15	15	14	24	20

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2014

#### 2.4.15. Fokus Keamanan dan ketertiban

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pembunuhan	-	1	-	1	1
Penganiayaan	10	19	9	29	75
Perkosaan	-	1	1	1	3
Pencurian	7	5	1	17	35
Penggelapan	1	2	-	5	10
Perzinahan	-	1	1	-	4
Pengrusakan	2	2	-	10	17
Perjudian	-	-	3	-	-
Penipuan	8	8	3	3	18
Pemerasan	-	-	-	-	-

#### 2.4.16. Fokus Kelautan Perikanan

Potensi unggulan di sektor perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari ikan permukaan (pelagis) dan ikan dasar (demershal) dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45. Produksi dan Nilai Ikan Menurut Jenis Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 - 2014

Produksi	2013		2014	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rupiah)	Produksi (Ton)	Nilai (Rupiah)
Perikanan Laut				
1. Budidaya	61.001	2.440.040.000	30.851	1.234.040.000
2. Penangkapan	24.628	147.768.000	24.776	148.656.000
Perikanan Darat				
1. Budidaya				
a. Tambak	7.043	246.505.000	13.300	465.000.000
b. Kolam	7.043	246.505.000	13.300	465.000.000
c. Keramba	7.994	319.760.000	6.220	248.800.000
2. Perairan Umum	54.007	270.035.000	24.631	123.155.000

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2014

Sedangkan keberhasilan pencapaian target indikator produksi dan nilai produksi ikan laut hasil olahan dan awetan menurut jenis olahan, pada urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2010 – 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46. Produksi dan Nilai Produksi Ikan Laut Hasil Olahan dan Awetan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Olahan Kering		Olahan Asap	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp.)	Volume (Ton)	Nilai (Rp.)
2010	673	16.325.000	508	19.500.000
2011	1.522	50.508.000	1.105	76.280.000
2012	1.628	54.007.560	1.105	38.140.000
2013	-	-	-	-
2014	594	43.880.000	856	171.200.000

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.4.17. Fokus Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat.

Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014, tanggal 29 Desember 2014 per fungsi dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.47. Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Luas Hutan dan Perairan
1	Pulau Gorom	2.573	-	-	-	5.064	7.637
2	Wakate	1.420	-	-	-	-	1.420
3	Teor	1.152	-	-	-	-	1.152
4	Groom Timur	801	-	-	-	1.728	2.529
5	P. Panjang	436	-	-	-	1.290	1.726
6	Seram Timur	3.628	-	-	8	2.475	6.111
7	Tutuk Tolu	1.348	-	12.165	543	13.158	27.214
8	Kilmury	11.804	-	40.129	400	25.326	77.659
9	Lian Vitu	2.039	-	7.671	-	6.825	16.535
10	Kian Darat	-	-	7.963	316	3.259	11.538
11	Werinama	28.458	-	37.461	-	22.411	88.330
12	Siwalalat	10.561	-	63.459	-	7.595	81.615
13	Bula	16.701	513	22.304	10.599	4.894	54.498
14	Bula Barat	8.755	-	43.711	11.059	10.346	73.871
15	Teluk Waru	18.482	703	26.754	4.231	11.136	60.603
<b>Kab. Seram Bagian Timur</b>		<b>107.880</b>	<b>1.216</b>	<b>261.069</b>	<b>24.162</b>	<b>115.869</b>	<b>513.196</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

## 2.4.18. Fokus Pertanian

### 2.4.18.1. Tanaman Pangan

Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dari Tahun 2013-2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013-2015

Uraian	2013			2014			2015		
	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Padi sawah	1.900	45	8.550	1.050	47	4.935	678	-	3.051
Padi ladang	760	22	1.627	426	24	1.022,4	-	-	-
Jagung	284	40	1.068	220	40	856	401	-	1.596
Ubi kayu	235,60	120	2.832	257	130	3.341	193	-	2.417

Uraian	2013			2014			2015		
	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Ubi jalar	208,05	110	3.880	235	110	2.585	165	-	1.746
Kacang tanah	231,80	24	556	195	14	273	123	-	169
Kacang hijau	2,85	11	3,14	8	11	8,8	3	-	3
Kedelai	18,05	14	26	31	14	49,6	339	-	542

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.18.2. Perkebunan

Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dari Tahun 2013-2015, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013-2015

Uraian	2013			2014			2015		
	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Kelapa	18.367	929	14.740	18.387	929	14.740	18.963	-	14.740
Cengkeh	9.414	930	5.366	9.414	797,14	5.399	10.315	-	5.199
Pala	8.323	466	1.948	8.629	498,86	1.948	9.122	-	1.948
Kakao	1.022	625	464	1.071	151	464	1.083	-	464
Kopi	415	345	33	421	276	33	440	-	33
Jambu Mete	132	575	52	132	460	52	129	-	49
Kelapa Sawit	-	-	-	1.100	-	-	1.102	-	-

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.19. Fokus Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.50. Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Penting Nabati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2015

Komoditas	Produksi Per Tahun (Ton)		
	2013	2014	2015
Kelapa	14.740	14.740	14.740
Cengkeh	5.366	5.399	5.199
Pala	1.948	1.948	1.948
Kakao	464	464	464
Kopi	33	33	33
Jambu Mete	52	52	49
Kelapa Sawit	-	-	-

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.20. Fokus Energi dan Sumberdaya Mineral

Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi : batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, besi , magnesium, mangan dan zirconium. Sedangkan jenis pertambangan migas terdiri dari : minyak bumi dan nafta. Selain jenis pertambangan dimaksud, masih terdapat potensi pertambangan bahan galian C, untuk levih jelasnya dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51. Produksi Bahan Galian C di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 – 2015

Bahan Galian C	Produksi	
	2014	2015
Batu Kali	22.447,93	26.571
Batu Pecah	17.099,71	23.373
Pasir Pasang	18.471,34	26.382
Pasir Urug	8.043,65	2.674
Sirtu	85.003,53	68.166
Kerikil	7.988,94	4.752
Tanah Urug	6.460,76	20.161

Batu Karang	20.510,41	13.708
-------------	-----------	--------

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.21. Fokus Pariwisata

Jumlah obyek wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.52.Pertumbuhan Urusan  
PariwisataKabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
2013 – 2015

Tahun	Objek Wisata				
	Alam	Sejarah	Bahari	Budaya	Pantai
2013	35	-	-	-	-
2014	35	-	-	-	-
2015	17	34	11	19	13

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.53. Perkembangan Pengunjung Objek  
WisataKabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 –  
2015

Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pantai Englas	50	2.325	2.214	257	-
Pantai Gummumae	2.414	2.151	1.157	1.692	2.453

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.22. Fokus Keagamaan

Sarana dan prasarana ibadah bagi setiap pemeluk agama apapun, merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang dibutuhkan dan harus tersedia pada setiap permukiman penduduk. Demikian pentingnya sarana dan prasarana ibadah, maka salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa banyaknya sarana dan prasarana ibadah pada suatu komunitas masyarakat.

Data dan informasi tentang sarana dan prasarana ibadah di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2012 – 2015, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Sarana Ibadah/Tahun				
	Masjid	Langgar/Mushola	Gereja protestan	Gereja Khatolik	Pura
2012	255	26	9	7	2
2013	265	87	10	7	3
2014	270	87	10	7	3
2015	365	87	12	6	3

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

### 2.4.23. Fokus Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan uraian diatas, maka dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan berbagai langkah kebijakan sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan, maka indikator capaian target pengelolaan bidang lingkungan hidup yang dapat dijadikan tolok ukur, diantaranya prosentase penduduk berakses air minum.

Pertumbuhan prosentase penduduk berakses air minum sepanjang tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2015

Jenis Air minum	Tahun/Prosentase				
	2011	2012	2013	2014	2015
Air dalam kemasan	0,27	4,86	5,89	0,00	9,23
Air PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Air pompa	2,07	1,82	2,86	2,65	0,00
Air sumur terlindung	52,84	53,34	42,86	47,70	39,77
Air sumur tak terlindung	1,68	3,46	14,31	9,55	20,01
Mata air terlindung	12,63	19,45	18,53	24,74	15,18
Mata air tak terlindung	6,39	5,10	8,05	3,31	14,41
Air sungai	4,73	2,64	3,18	5,17	0,98

#### 2.4.24. Fokus Pertanahan

Salah satu indikator untuk mengetahui indikator capaian target dalam penyelenggaraan bidang pertanahan, adalah prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat. Lahan bersertifikat dimaksud terdiri dari lahan dengan status kepemilikan pertama, “Hak Milik (HM)”, adalah merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Kedua, “Hak Guna Usaha (HGU)” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Ketiga, Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Keempat, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Perkembangan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2013- 2015, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56. Sertifikat Tanah Yang telah Diterbitkan Oleh BPNKabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 – 2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Tanah Hak Milik	2.193	2.108	2.214
Tanah Hak Guna Bangunan	2	-	-
Tanah Hak Guna Usaha	-	-	-
Tanah Hak Pakai	151	6	96
Jumlah	2.346	2.114	2.310

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.25. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar

maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Perkembangan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2010-2014, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57. Perkembangan Akte Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010–2014

Jenis Akte	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Akte Kelahiran	3.031	1.356	752	792	2.438
Akte Kematian	217	17	32	22	36
Akte Perkawinan	210	3	-	11	2

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

#### 2.4.26. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur antara lain, yakni prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58. Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umum dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009–2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umum	19.701	20.657	21.112	17.223	16.202
Partisipasi angkatan kerja perempuan	17.354	108	-	11	27

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	37.055	20.765	21.112	17.234	16.229

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.4.27. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan pencapaian target indikator penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, diantaranya cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Perkembangan penyelenggaraan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2012– 2015, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59. cakupan peserta KB aktif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2015

Tahun	Peserta KB						
	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil
2012	111	41	8	1.173	395	1.434	2.131
2013	111	21	22	1.459	317	2.426	2.166
2014	245	27	25	1.190	1.022	1.633	2.113
2015	240	27	23	695	69	841	544
<b>Jumlah</b>	<b>707</b>	<b>116</b>	<b>78</b>	<b>4.517</b>	<b>1.803</b>	<b>6.333</b>	<b>6.954</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

Sedangkan Perkembangan penyelenggaraan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2016

Tahun	Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera			
	AEK	Bukan AEK	I	II	III	III+
2012	10.367	-	7.420	4.169	1.818	406
2013	-	-	-	4.351	1.770	398
2014	5.665	11.957	4.144	4.169	2.952	650
2015	17.922	-	13.251	6.029	2.952	650

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

## 2.4.28. Urusan Sosial

### 2.4.28.1. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Keberhasilan pencapaian target indikator panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada urusan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61. Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
1	2009	9	-	2 Rumah singgah
2	2010	10	-	2 Rumah singgah
3	2011	10	-	2 Rumah singgah
4	2012	13	-	3 Rumah Singgah
5	2013	13	-	3 Rumah Singgah

Sumber Data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

### 2.4.28.2. PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Keberhasilan pencapaian target indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62. Perkembangan PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Mendapat Bantuan Sosial	
			Jumlah (orang)	Rasio (%)
1	2009	811	340	12,09
2	2010	1.110	330	15,64
3	2011	1.398	431	17,97
4	2012	1.418	507	29,32
5	2013	2.125	816	27,39

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

## 2.4.29. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator (i) jumlah organisasi pemuda; (ii) jumlah organisasi olahraga; (iii) jumlah

kegiatan kepemudaan; (iv) jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda; dan (vi) jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63. Pertumbuhan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Organisasi Pemuda	7	7	7	6	6
Jumlah Organisasi Olahraga	12	12	14	15	15
Jumlah kegiatan Kepemudaan	5	5	6	6	6
Jumlah Kegiatan Olahraga	5	5	5	6	6
Jumlah Gelanggang/balai remaja milik pemda.	3	3	4	2	4
Jumlah lapangan olahraga	28	28	26	25	25

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.4.30. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur dengan indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah.

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009-2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.64. Perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	5	8	9	9
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	2	2	2	3

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.4.31. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Beberapa indikator keberhasilan pencapaian target penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dapat diukur dengan indikator antara lain meliputi :

Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa dan jumlah linmas per 10.000 penduduk, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.65. Rasio Jumlah Pol PP Per 10.000 penduduk Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Thn	Polisi PP			Linmas		
	Jml petugas	Jml Pnddk	Rasio	Jml	Jml Pnddk	Rasio
2009	182	86.709	0,21	256	86.709	0,30
2010	197	99.065	0,20	274	99.065	0,28
2011	207	101.436	0,21	299	101.436	0,29
2012	232	103.196	0,23	313	103.196	0,30
2013	232	104.902	0,22	334	104.902	0,32

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

Sedangkan pencapaian target indikator sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan perda, cakupan patroli petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, sistem informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.66. Bidang Urusan Otda, Pem Um, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada
2	Penegakan Perda	74	97	97	121	146
3	Jumlah Petugas Satpol PP	182	182	182	182	182
4	Penyelesaian Pelanggaran K-3	33	32	35	25	37
5.	Jumlah Petugas Linmas.	256	256	256	256	256
6.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Yang Baik.	99,08	100	100	93,27	98,18
7.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	62	63	63	67	67
8.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	66,11	72,12	72,85	74,51

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.4.32. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67. Perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	30	30	30	35	35
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	375	375	400	400	430
3	Jumlah PKK Aktif	35	35	35	45	45
4	Jumlah Posyandu Aktif	162	162	163	163	191
5	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.4.33. Urusan Statistik

Urusan statistik daerah, mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik, dapat diukur melalui indikator (i) tersedianya buku “ Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka”; dan (ii) tersedianya buku “PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur”, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan  
Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011–2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Buku “ Kab Dalam Angka”	150	150	150	100	75
Buku “PDRB Kab”	150	150	150	100	75

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2016

## 2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja aspek daya saing daerah, dapat diukur melalui indikator kinerja antara lain :

### 2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

#### 2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga perkapita, yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan dan sekolah.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok barang jenis pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69. Rata-rata Pengeluaran PerKapita Sebulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2014

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan/Rp.000.		
	2012	2013	2014
Makanan	418.847	443.400	479.943
Bukan Makanan	177.796	348.037	244.739
<b>Jumlah</b>	<b>663.586</b>	<b>821.475</b>	<b>862.043</b>

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.70. Presentase Pengeluaran PerKapita Sebulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2014

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan/Rp.000.		
	2012	2013	2014
Makanan	63,12	53,98	55,68
Bukan Makanan	36,88	46,02	44,32
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.5.1.2. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Perkembangan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Seram Bagian Timur juga dapat diamati berdasarkan perubahan presentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dan non makanan. Berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel 2.71. Pengeluaran Rata-rata PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2015

No	Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan/Rp.000.			
		2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	53.826	56.700	61.235	62.808
2	Umbi-umbian	23.900	32.800	39.626	34.493
3	Ikan	42.332	54.300	55.454	63.520
4	Daing	50.231	44.300	36.456	3.785
5	Telur dan Susu	23.111	24.100	25.203	12.900
6	Sayur-sayuran	33.018	42.800	44.834	40.166
7	Kacang-kacangan	13.016	14.200	15.167	2.099
8	Buah-buahan	22.025	30.000	35.813	28.493
9	Minyak dan Lemak	15.479	13.900	17.401	16.365
10	Bahan Minuman	22.805	22.800	27.194	26.527
11	Bumbu-bumbuan	8.840	10.300	11.978	12.131
12	Konsumsi lainnya	10.312	12.000	12.114	9.470
13	Makanan dan Minuman jadi	50.542	33.600	42.117	26.961
14	Tembakau, sirih	49.411	52.600	55.291	51.751

	<b>Jumlah</b>	<b>418.847</b>	<b>443.400</b>	<b>479.943</b>	<b>391.468</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

Tabel 2.72. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015

No	Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan			
		2012	2013	2014	2015
1.	Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, Air	105.081	133.000	135.556	177.356
2.	Aneka Barang dan Jasa	58.436	68.100	63.851	58.139
3.	Pakaian, Alas kaki, Tutup kepala	26.771	24.100	31.323	14.512
4.	Barang Yang Tahan Lama	29.914	60.300	47.775	10.577
5.	Pajak dan Asuransi	2.026	4.175	5.187	2.145
6.	Keperluan Pesta	22.512	88.400	98.409	1.684
	<b>Jumlah</b>	<b>244.739</b>	<b>378.075</b>	<b>382.100</b>	<b>264.413</b>

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015-2016

### 2.5.1.3. Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah pencari kerja lebih besar dari peluang yang ada. Kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar masih ada.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Seram Bagian Timur, Total Angkatan Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 743.149 dan total yang bekerja sebesar 690.786. lebih lanjut secara detail komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan jenjang pendidikan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.462	1.080	1.126	341
2.	Tidak/Belum Tamat SD	8.450	7.818	5.110	4.804
3.	Tamat SD	12.662	9.405	11.092	12.455
4.	Tamat SLTP	8.307	6.869	5.219	5.223
5.	Tamat SLTA	9.077	8.042	9.150	8.016
6.	D-I/II/III dan S1/2	2.793	3.763	2.859	2.119
	<b>Jumlah</b>	<b>43.751</b>	<b>36.977</b>	<b>34.556</b>	<b>32.958</b>

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2015

### 2.5.1.4. Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Keberhasilan terhadap penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

#### 2.5.1.4.1 Perhubungan

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator perhubungan, antara lain rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Pencapaian target indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.74. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah  
Kendaraan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
2009–2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan	-	66,09	580,17	841,72	-
Jumlah Kendaraan	45	84	142	192	75
Rasio	-	78,67	40,86	42,56	-

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.5.1.4.2. Fasilitas bank dan non bank

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator fasilitas bank dan non bank, antara lain (i) jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya; dan (ii) jenis dan jumlah perusahaan asuransi. Pencapaian target indikator jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.75. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya, Serta Asuransi dan  
Cabangnya Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009–2013

Tahun	Jenis Bank			
	Bank Pemerintah	Bank Daerah	Bank Swasta	Bank Syariah
2009	1	2	-	-
2010	1	2	-	-
2011	1	2	-	-
2012	2	2	-	-
2013	2	2	-	1

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014.

#### 2.5.1.4.3. Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan

Ketersediaan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/ penginapan. Dalam konteks uraian jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan, maka hotel/penginapan dapat dikelompokkan pada 2 kelas, yaitu :

- **Hotel Berbintang**

Hotel berbintang, adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI; dan

- **Hotel Melati**

Hotel Melati, adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

keberhasilan pencapaian target indikator jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.76. Jenis, Kelas dan Jumlah  
Hotel/Penginapan Kabupaten Seram Bagian Timur  
Tahun 2009–2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013

Hotel Bintang 1	-	-	1	3	4
Hotel Non Bintang	-	-	2	5	9
Penginapan	-	-	-	106	154
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>167</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.5.1.4.4. Lingkungan Hidup

Salah satu indikator penyelenggaraan lingkungan hidup adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (clean water), yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

Air Minum (drinking water), adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Berdasarkan sumbernya, air bersih dapat dibedakan, yaitu :

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal
5. Air Sumur Dalam

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyediakan air bersih untuk rumah tangga selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77.Data Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012–2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ledeng	-	-	0,00	0,00	0,00
Sumur Lindung	-	-	52,84	53,34	42,86
Sumur Tidak Terlindung	-	-	1,68	3,46	14,31
Mata Air Terlindung	-	-	12,63	19,45	18,53
Mata Air Tdk Terlindung	-	-	6,39	5,10	8,05
Sungai	-	-	4,73	2,64	3,18
Danau/Waduk	-	-	-	-	-
Air Hujan	-	-	-	-	-
Air Kemasan	-	-	0,27	4,86	5,89
Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber data : Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

#### 2.5.1.4.5. Komunikasi dan Informatika

Salah satu tolok ukur untuk melihat pencapaian target indikator komunikasi dan informatika adalah jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon dalam 1 (satu) tahun tertentu. Hal ini penting, mengingat peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) maupun telepon rumah biasa.

Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.78. Jumlah Penduduk Yang Menggunakan Telp/HP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	86.709	99.065	101.436	103.196	104.902
Jumlah penduduk yang memiliki telp/HP	-	2.995	2.581	2.589	2.343
Rasio (%)	-	3,45	2,54	2,51	2,23

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

#### 2.5.2. Fokus Iklim Investasi

##### 2.5.2.1. Keamanan dan ketertiban

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2009 – 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79. Perkembangan Angka  
Kriminalitas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pembunuhan	1	2	-	1	-
Penganiayaan	13	9	10	19	9
Perkosaan	2	1	-	1	1
Pencurian	1	9	7	5	1
Penggelapan	-	-	1	2	-
Perzinahan	-	-	-	1	1
Pengrusakan	-	-	2	2	-
Perjudian	-	-	-	-	3
Penipuan	2	5	8	8	3
Pemerasan	1	-	-	-	-
Jumlah Penduduk	86.709	99.065	101.436	103.196	104.902
<b>Jumlah Angka Kriminal (%)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>

Sumber data : Kab.Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2010-2014

## 2.6. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD serta Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2018 dimulai sejak awal Tahun 2017 melalui berbagai rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Dalam upaya untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun upaya dan hasil pencapaian pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 2.6.1. URUSAN WAJIB

### 1. Pendidikan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian peningkatan pembangunan pendidikan ditempuh melalui berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan. Berikut ini disajikan perkembangan realisasi program dan kegiatan tahun 2016.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENT ASE (%)
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.042.024.000	2.082.009.000	99,31
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	371.424.000	359.624.000	96,82
	Peningkatan Manajemen Data Pegawai PAK/DUPAK Bagi PTK	300.000.000	299.000.000	99,67
	Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minuman (SPM) Dikdas	1.370.600.000	1.369.385.000	99,91
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.300.062.000	1.297.562.000	99,81
	Pembangunan Gedung Sekolah	7.600.000	7.600.000	100
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	200.000.000	200.000.000	100
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	200.000.000	200.000.000	100
	Pengembangan kurikulum, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	225.562.000	225.532.000	99,99
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	450.000.000	447.500.000	99,44
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	216.900.000	216.900.000	100
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.447.855.420	19.064.380.420	98,03
	Pembangunan Gedung sekolah	1.169.727.000	1.130.823.000	96,67
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.810.004.420	1.806.589.420	99,81
	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	250.000.000	249.892.000	99,96
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.996.632.000	1.968.419.000	98,59
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK – Damping DAK SD/SMP)	9.436.439.000	9.099.672.000	96,43
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK/SD/SMP	2.313.510.000	2.309.842.000	99,84
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	472.462.000	471.862.000	99,87
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (Rakor)	976.914.000	975.114.000	99,82
	Pengembangan Materi Belajar, Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan TIK	652.167.000	652.167.000	100
	Penyediaan Beasiswa Retrivaler Untuk Anak Putus Sekolah	50.000.000	50.000.000	100
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	350.000.000	350.000.000	100
4.	Program Pendidikan Menengah	8.229.427.400	8.220.981.400	99,90
	Pembangunan Gedung Sekolah	34.618.900	34.572.900	99,87
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	711.117.500	703.417.500	98,92
	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan menengah	250.000.000	250.000.000	100

	Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera	640.650.000	640.650.000	100
	Pembinaan Minat Bakat Guru Kontrak	6.193.041.000	6.193.041.000	100
	Peningkatan Kreativitas Siswa	400.000.000	399.300.000	99,83
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.415.460.000	1.399.980.000	98,91
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	147.770.000	147.770.000	100
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	500.000.000	500.000.000	100
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	300.000.000	300.000.000	100
	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	158.785.000	147.985.000	93,20
	Operasional Tenaga Pengawas Kependidikan	306.875.000	304.225.000	99,14
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.606.279.500	2.580.629.500	99,02
	Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	223.388.000	223.388.000	100
	Pembinaan Dewan Pendidikan	51.650.000	51.650.000	100
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	170.991.500	170.741.500	99,85
	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	310.400.000	298.600.000	96,20
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	804.485.000	791.585.000	98,40
	Penyediaan Soal Ujian Akhir Sekolah/Nasional	1.045.365.000	1.044.665.000	99,93
7.	Program DAK + Damping Pendidikan Untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	10.313.016.600	3.926.167.000	38,07
	Rehab Sedang Kelas SD (DAK + Damping DAK)	4.229.058.400	1.691.612.400	40
	Pembangunan RKB Termasuk Perabot (DAK + Damping DAK)	3.133.276.000	1.253.305.600	40
	Pembangunan Perpustakaan Termasuk Perabot (DAK + Damping DAK)	996.499.200	398.598.000	40
	Pengadaan Media Teknologi Informasi Komputer (DAK + Damping DAK)	1.954.183.000	582.651.000	29,82

## 2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pembangunan kesehatan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, berikut disampaikan realisasi program dan kegiatan pada urusan kesehatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
	Dinas Kesehatan			
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	272.860.000	272.860.000	100
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	47.880.000	47.880.000	100

	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	140.000.000	140.000.000	100
	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	85.000.000	85.000.000	100
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.747.082.000	6.730.448.200	62,63
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya	180.000.000	179.750.000	99,86
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	139.000.000	116.500.000	83,81
	Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan	449.610.000	449.610.000	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	137.472.000	87.672.000	63,05
	Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.400.000.000	54.160.000	1,59
	Bantuan Operasional (BOK)	6.441.000.000	5.842.756.200	90,71
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	217.900.000	217.900.000	100
	Pengembangan Desa Siaga aktif	108.100.000	108.100.000	100
	Pelatihan Dokter Kecil	109.800.000	109.800.000	100
4.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	271.800.000	250.800.000	92,27
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	121.500.000	100.500.000	82,72
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (APBD-P)	150.300.000	150.300.000	100
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	434.600.000	389.510.000	89,62
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	112.500.000	102.260.000	84,16
	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	77.100.000	61.350.000	79,57
	Peningkatan Imunisasi	120.000.000	118.500.000	98,75
	Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	40.000.000	39.650.000	99,13
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	85.000.000	67.750.000	79,71
6.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	231.650.000	213.650.000	92,23
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	131.650.000	131.650.000	100
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	100.000.000	82.000.000	82,00
7.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	1.580.068.000	1.320.589.800	83,58
	Pembangunan Puskesmas	242.736.000	238.644.000	98,31
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	747.200.000	510.283.800	68,29
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	34.486.000	34.486.000	100
	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap	99.940.000	99.940.000	100
	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas	22.000.000	22.000.000	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	200.000.000	191.000.000	95,50
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	126.470.000	117.000.000	92,51
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	107.236.000	107.236.000	100
8.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	252.842.000	252.842.000	100

	Pembangunan Gudang Obat/Apotik	102.736.000	102.736.000	100
	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit	150.106.000	150.106.000	100
9.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1.400.000.000	1.400.000.000	100
	Rekrutmen Tenaga Perawat Kesehatan untuk melayani lansia	1.400.000.000	1.400.000.000	100
10.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.193.193.200	-	0
	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dan Keluarga Kurang Mampu	1.193.193.200	-	0
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	6.302.000.000	6.209.433.500	98,53
	Pembangunan Rumah Dinas	1.702.000.000	1.631.493.500	95,86
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.600.000.000	4.577.940.000	99,52
12.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas pembantu dan Jaringannya (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	13.196.530.000	12.751.649.001	96,63
	Pembangunan Puskesmas	2.805.000.000	2.652.361.050	94,56
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	3.696.200.000	3.648.103.001	98,70
	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap	2.144.750.000	2.020.672.950	94,21
	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	750.580.000	717.922.200	95,65
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	2.400.000.000	2.326.589.800	96,94
13.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	3.829.000.000	3.667.261.250	95,78
	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit	3.829.000.000	3.667.261.250	95,78
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian)	1.100.000.000	1.100.000.000	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.100.000.000	1.100.000.000	100
15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian)	8.012.490.000	5.331.040.500	66,53
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.012.490.000	5.331.040.500	66,53
16.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya (DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian)	150.000.000	150.000.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi	150.000.000	150.000.000	100
17.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru (DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian)	2.250.000.000	2.126.551.300	94,51
	Pembangunan Gudang Obat/Optik	2.250.000.000	2.126.551.300	94,51
<b>II.</b>	<b>RSUD</b>			
1.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	175.830.000	175.830.000	100

	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	175.830.000	175.830.000	100
2.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	17.157.604.000	17.157.604.000	98,60
	Pengembangan Ruang ICU,ICCU,NICU	1.861.140.000	1.757.800.700	94,45
	Pengembangan Ruang Operasi	295.870.000	288.356.000	97,46
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	12.319.350.080	12.318.286.714	99,99
	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	1.775.036.500	1.774.890.397	99,99
	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	654.319.920	526.079.375	80,40
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	19.127.500	19.127.500	100
	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	126.590.000	126.448.000	99,89
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	106.170.000	106.170.000	100
3.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	370.340.000	130.340.000	35,19
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi/Pengolahan Limbah Rumah Sakit	24.170.000	24.170.000	100
	Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	346.170.000	106.170.000	30,67
4.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.450.000.000	2.445.452.202	99,81
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	2.450.000.000	2.445.452.202	99,81
5.	Program DAK Bidang Pelayanan Rujukan	15.046.810.000	14.806.652.789	98,40
	Pengadaan Alat Kesehatan Klas III	2.162.842.216	2.162.842.216	100
	Pengadaan Alat Kesehatan IGD	1.049.306.010	1.019.306.010	97,14
	Pembangunan Gedung ICU	1.836.000.000	1.732.660.700	94,37
	Pengadaan Alat Kesehatan ICU	7.130.003.574	7.130.003.574	100
	Rehabilitasi Kamar Operasi (OK)	280.000.000	272.286.000	97,25
	Pengadaan Alat Kesehatan Kamar Operasi (OK) RS	244.549.940	244.549.940	100
	Pengadaan Alat Kesehatan UTD RS	1.306.508.740	1.305.645.374	99,93
	Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium	396.000.000	396.000.000	100
	Pengadaan Ambulance	641.599.920	513.359.375	80,01

### 3. Pekerjaan Umum

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pembangunan di bidang pekerjaan umum ditempuh melalui berbagai program/kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	29.540.920.977	20.266.614.960	68,61
	Peningkatan Jalan Ruas A Sampai Z	29.540.920.977	20.266.614.960	68,61
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.306.432.658	47.245.274.989	69,17

	Pembangunan Jalan	4.928.559.538	4.055.140.717	82,28
	Pembangunan Jembatan	62.667.873.120	42.481.034.272	67,79
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	710.000.000	709.100.000	99,87
3.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	586.194.500	-	0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	586.194.500	-	0
4.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	148.835.925	140.835.925	94,62
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	148.835.925	140.835.925	94,62
5.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	37.330.981.255	23.617.865.740	63,27
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	19.715.249.255	15.454.504.335	78,39
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	17.615.732.000	8.163.361.405	46,34
6.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	28.184.660.527	27.333.028.992	96,98
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	6.483.295.789	5.884.241.892	90,76
	Pembangunan Saluran Irigasi	21.701.364.738	21.448.787.100	98,84
7.	Program Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	23.847.950.000	23.061.244.343	96,70
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	23.847.950.000	23.061.244.343	96,70
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4.632.314.622	4.566.335.882	98,58
	Pemetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	1.035.000.000	1.035.000.000	100
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	306.500.000	280.000.000	89,32
	Pembangunan MCK	3.291.014.622	3.256.335.882	99,83
9.	Program Pengembangan Perumahan	528.580.000	523.531.000	99,04
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	528.580.000	523.531.000	99,04
10.	Program DAK dan Damping	131.873.493.000	76.512.228.796	58,02
	Peningkatan Jalan	13.247.165.000	4.182.611.800	31,57
	Pembangunan Jalan	4.043.657.000	3.232.765.502	79,95
	Pembangunan Jembatan	62.840.693.000	34.420.790.040	54,77
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	22.898.637.000	14.475.659.400	63,22
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	15.160.800.000	9.160.359.280	60,63
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	4.147.394.000	3.383.673.492	81,59
	Pembangunan Jaringan Irigasi	6.289.623.000	5.252.471.900	83,51
	Pembangunan MCK	2.909.524.000	2.403.897.283	82,62

#### 4. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur telah dilaksanakan mulai

dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam bentuk Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan desa dan negeri, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di 15 kecamatan. Hasil rangkaian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut dibawa pada Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten dengan maksud mempertajam usulan rencana dan disesuaikan dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah. Selanjutnya usulan rencana Kabupaten Seram Bagian Timur diajukan pada forum gabungan SKPD Provinsi, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan perencanaan pembangunan daerah ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu tersaji pada tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	743.670.000	734.490.000	98,77
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	100.000.000	98.820.000	98,82
	Pengolahan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	149.670.000	149.670.000	100
	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	244.000.000	244.000.000	100
	Penyusunan Profil Daerah	250.000.000	242.000.000	96,80
2.	Program Pengembangan Perumahan	372.594.000	367.821.000	98,72
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	372.594.000	367.821.000	98,72
3.	Program Perencanaan Tata Ruang	980.000.000	941.478.000	96,07
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	350.000.000	330.350.000	94,39
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	180.000.000	176.228.000	97,90
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	450.000.000	434.900.000	96,64
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.038.484.000	6.897.900.600	98,00
	Penyusunan Rancangan RPJMD	450.000.000	445.164.000	98,93
	Penetapan RPJMD	275.370.000	272.172.000	98,84
	Penyusunan Rancangan RKPD	253.960.000	248.180.000	97,72
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	523.100.000	518.880.000	99,19
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	190.940.000	187.635.000	98,27
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	230.770.000	221.170.000	95,84
	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	300.000.000	295.550.000	98,52
	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD	315.480.000	312.517.000	99,06
	Penyusunan RKPD Perubahan	150.000.000	146.350.000	97,57
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum	650.000.000	639.900.000	98,45
5.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	465.000.000	452.703.000	97,36
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	150.000.000	147.575.000	98,45
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	190.000.000	180.130.000	94,81

	Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah	125.000.000	124.998.000	100
6.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	248.899.000	246.514.000	99,04
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100.000.000	99.619.000	99,62
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	148.899.000	146.895.000	98,65

## 5. Perhubungan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan dibidang perhubungan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat disajikan diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	236.160.000	235.505.800	99,72
	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	200.000.000	200.000.000	100
	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	36.160.000	35.505.800	98,19
2.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	12.291.679.685	12.036.736.450	97,93
	Pembangunan Gedung Terminal	1.389.943.585	1.374.812.000	98,91
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal	10.800.176.100	10.360.673.450	95,93
	Survey Investigasi Rute Penerbangan Perintis	126.560.000	126.560.000	100
	Survey Kepelabuhanan dan Transportasi Laut	100.000.000	100.000.000	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75.000.000	75.000.000	100
3.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	495.370.000	493.243.900	99,57
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	495.370.000	493.243.900	99,57
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (DAK)	7.084.893.600	3.555.436.950	50,18
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal	7.084.893.600	3.555.436.950	50,18
5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (DAK)	457.495.000	447.095.000	97,73
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	457.495.000	447.095.000	97,73

## 6. Lingkungan Hidup

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan dibidang Lingkungan Hidup ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu tersaji pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.153.220.000	1.153.219.701	100
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1.153.220.000	1.153.219.701	100
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	998.230.000	982.075.000	98,38
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian	998.230.000	982.075.000	98,38

	Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup			
3.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.069.888.700	1.052.460.100	87,47
	Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	820.000.000	805.172.600	98,19
	Penyusunan Ranperda tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan	249.888.700	247.287.500	98,96
4.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	200.000.000	200.000.000	100
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	200.000.000	200.000.000	100
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DAK)	446.825.800	446.825.800	100
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	446.825.800	446.825.800	100
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (DAK)	990.822.200	983.120.000	99,22
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	990.822.200	983.120.000	99,22

## 7. Kependudukan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Penataan Administrasi kependudukan	2.144.832.000	2.123.424.000	99,00
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	47.663.000	26.940.000	56,52
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	174.539.000	174.539.000	100
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	174.539.000	174.539.000	100
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	1.439.427.000	1.439.427.000	100
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	380.580.000	380.580.000	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	102.623.000	102.623.000	100

## 8. Sosial

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Sosial, ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	2.896.450.000	1.042.778.000	36,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	1.571.800.000	74.349.000	4,73
	Pembinaan dan Pendampingan Keluarga Miskin	163.000.000	162.390.000	99,63

	Pembinaan Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	64.800.000	64.800.000	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Beras Sejahtera (RASTRA)	735.800.000	381.709.000	51,88
	Pemetaan Data Base PMKS	361.250.000	359.730.000	99,58
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.971.990.000	1.908.974.000	96,80
	Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia	220.000.000	207.000.000	94,09
	Transport Buffer Stock Bencana Alam	332.000.000	330.234.000	99,47
	Pembinaan dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan	1.419.390.000	1.371.740.000	96,64
3.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam	378.350.550	308.730.000	81,60
	Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	378.350.550	308.730.000	81,60
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya (APBD-P)	140.000.000	140.000.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	150.000.000	150.000.000	100

## 9. Ketenagakerjaan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan ketenagakerjaan, ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	500.450.000	496.630.045	99,24
	Padat Karya Produktif	500.450.000	496.630.045	99,24
2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	178.852.250	171.500.000	95,89
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	74.952.250	67.600.000	90,19
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	103.900.000	103.900.000	100

## 10. Koperasi

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan koperasi, ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.100.033.000	3.099.277.000	99,98
	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	2.916.983.000	2.916.227.000	99,97
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	183.050.000	183.050.000	100

## 11. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan untuk kreatifitas, kewirausahaan dan kemandirian serta peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan, dan diarahkan untuk pengembangan kebijakan manajemen, pemasyarakatan, pembinaan, pemassalan dan peningkatan prestasi olahraga. Dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan kepemudaan dan olahraga, ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	115.000.000	114.650.000	99,70
	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	115.000.000	114.650.000	99,70
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	55.360.000	55.360.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	55.360.000	55.360.000	100

## 12. Kebudayaan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Kebudayaan, ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	317.780.000	317.212.000	99,82
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	267.780.000	267.212.000	99,79
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	50.000.000	50.000.000	100

## 13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kantor Polisi Pamong Praja.

### a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	400.000.000	400.000.000	100
	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	400.000.000	400.000.000	100
2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	826.680.000	824.680.000	99,76
	Peningkatan Toleransi dan Kerukungan Dalam Kehidupan Beragama	180.000.000	180.000.000	100
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	246.680.000	246.680.000	100
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	400.000.000	398.000.000	99,50
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	567.078.000	551.718.000	97,29
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	166.350.000	150.990.000	90,77
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	400.728.000	400.728.000	100
4.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	166.350.000	151.500.000	91,07
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	166.350.000	151.500.000	91,07
5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	200.000.000	199.996.000	99,99
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	150.000.000	150.000.000	100
	Penyusunan Data Base Parte Politik	50.000.000	49.000.000	98,00

### ***b) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja***

Pada dasarnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas cukup luas di bidang pemerintahan umum, utamanya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah, membantu usaha-usaha konsolidasi dan stabilisasi teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan dan menjaga stabilisasi daerah yang baru di terbentuk atau daerah yang dimekarkan menjadi wilayah otonomi sendiri. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.213.800.000	1.213.790.000	100
	Penyediaan Tenaga Pengendali dan Kenyamanan Lingkungan	1.213.800.000	1.213.790.000	100
2.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	134.100.000	134.100.000	100
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	134.100.000	134.100.000	100

3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK)	382.995.800	382.995.800	100
	Pembangunan Gedung Kantor	382.995.800	382.995.800	100

#### **14. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, realisasi yang dicapai dapat dilihat sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 250.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 250.000.000,-.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- realisasi Rp. 1.149.665.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah, dengan anggaran sebesarRp. 750.000.000,- realisasiRp. 748.505.000,-.Penomoran Kode Wilayah,dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 99.999.000,-. Pembakuan Nama Rupa Bumi, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 96.461.000,-. Pemekaran Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 249.700.000,-.

Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.167.550.000,- realisasi Rp. 2.164.993.000,- atau 99,88% dengan kegiatan sebagai berikut :Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 517.550.000,- realisasiRp. 515.859.500,-. Penunjang Operasional TPAPD, dengan anggaran sebesarRp. 450.000.000,- realisasi Rp. 449.850.000,-. Fasilitasi Pemilihan/Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- realisasiRp. 649.450.000,-. Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa, dengan anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 199.833.500,-. Penyelesaian Masalah Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi Rp. 350.000.000,-.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 149.750.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesarRp. 150.000.000,- realisasi Rp. 149.750.000,-.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.678.801.000,- realisasi Rp. 1.677.182.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 980.506.000,- realisasi Rp. 978.887.000,-. Sosialisasi Peraturan Perundangan, dengan anggaran sebesar Rp. 698.295.000,- realisasi Rp. 698.295.000,-.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 541.201.000,- realisasi Rp. 541.201.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyuluhan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 541.201.000,- realisasi Rp. 541.201.000,-.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 420.000.000,- realisasi Rp.411.110.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- realisasi Rp.411.110.000,-.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.163.790.000,- realisasi Rp. 1.078.725.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), dengan anggaran sebesar Rp. 387.870.000,- realisasi Rp. 345.500.000,-. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan anggaran sebesar Rp. 387.960.000,- realisasi Rp. 345.500.000,-. Penyusunan LAKIP, dengan anggaran sebesar Rp. 387.960.000,- realisasi Rp. 387.485.000,-.

Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 486.210.000,- realisasi Rp. 408.860.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten, dengan anggaran sebesar Rp. 186.210.000,- realisasi Rp. 150.760.000,-. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 258.100.000,-.

Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8.047.445.000,- realisasi Rp. 7.994.341.800,- dengan kegiatan sebagai berikut : Fasilitasi Aparatur dalam Bidang Keagamaan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.587.465.000,- realisasi Rp. 1.564.715.000,-. Peningkatan Pelayanan Keagamaan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.510.169.000,- realisasi Rp. 5.479.825.800,-. Pembinaan Pelayanan Keagamaan, dengan anggaran sebesar Rp. 729.811.000,- realisasi Rp. 729.801.000,-. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- realisasi Rp. 220.000.000,-.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 200.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 200.000.000,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 600.000.000,- realisasi Rp. 597.659.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- realisasi Rp. 597.659.000,-.

Program Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.050.000.000,- realisasi Rp. 1.033.180.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan UKM, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 299.000.000,-. Penyusunan Laporan Pembangunan Tahunan, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 292.019.000,-. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- realisasi Rp. 442.161.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13.948.227.875,- realisasi Rp. 13.710.537.564,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pembangunan Rumah Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.695.000.000,- realisasi Rp. 1.491.121.575,-. Pembangunan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- realisasi Rp. 433.782.000,-. Pengadaan Mobil Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,- realisasi Rp. 1.736.322.750,-. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 896.015.500,- realisasi Rp. 888.598.864,-. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, dengan anggaran sebesar Rp. 1.185.825.000,- realisasi Rp. 1.185.825.000,-. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran Rp. 2.132.000.000,- realisasi Rp. 2.126.000.000,-. Pengadaan Mebeleur, dengan anggaran sebesar Rp. 4.807.500.000,- realisasi Rp. 4.807.000.000,-. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- realisasi Rp. 220.000.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 546.887.375,- realisasi Rp. 546.887.375,-. Pengadaan/Sewa Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- realisasi Rp. 275.000.000,-.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.700.000.000,- realisasi Rp. 498.080.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- realisasi Rp. 498.080.000,-.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 166.600.000,- realisasi Rp. 158.793.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 166.600.000,- realisasi Rp. 158.793.000,-.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 246.600.000,- realisasi Rp. 245.851.000,- dengan

kegiatan sebagai berikut :Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 246.600.000,- realisasi Rp. 245.851.000,-.

Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 627.400.000,- realisasi Rp. 626.487.500,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pelayanan Penyelenggaraan Kantor Penghubung Pemda, dengan anggaran sebesar Rp. 627.400.000,- realisasi Rp. 626.487.500,-.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 139.156.300,- realisasi Rp. 139.156.300,- dengan kegiatan sebagai berikut ; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 139.156.300,- realisasi Rp. 139.156.300,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 120.145.000,- realisasi Rp. 120.145.000,-dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesarRp. 120.145.000,- realisasi Rp. 120.145.000,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 120.145.000,- realisasi Rp. 120.145.000,-dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesarRp. 120.145.000,- realisasi Rp. 120.145.000,-.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 76.480.000,- realisasi Rp. 76.480.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan anggaran sebesarRp. 64.240.000,- realisasi Rp. 64.240.000,-. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp. 12.240.000,- realisasi Rp. 12.240.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 151.476.700,- realisasi Rp. 151.476.700,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pendidikan Dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 151.476.700,- realisasi Rp. 151.476.700,-

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 599.774.500,- realisasi Rp. 597.026.000,-dengan kegiatan sebagai berikut : Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesarRp. 599.774.500,- realisasi Rp. 597.026.000,-.

Program Kehumasan dan Protokol, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 234.464.000,- realisasi Rp. 234.400.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pendampingan Kunjungan Kerja KDH dan Wakil KDH, dengan anggaran sebesar Rp. 234.464.000,- realisasiRp. 234.400.000,-

Program Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.002.218.000,- realisasi Rp. 4.227.163.395,- dengan kegiatan sebagai berikut

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 761.400.000,- realisasi Rp. 546.273.895,-. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terealisasi. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi Rp. 55.936.000,-. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 574.000.000,- realisasi Rp. 574.000.000,-. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 316.500.000,- realisasi Rp. 316.007.500,-. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 130.250.000,- realisasi Rp. 130.250.000,-. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- realisasi Rp. 175.000.000,-. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 360.168.000,- realisasi Rp. 331.110.000,-. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp. 42.500.000,- realisasi Rp. 42.500.000,-. Belanja Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 1.037.600.000,- realisasi Rp. 728.929.000,-. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- realisasi Rp. 1.051.357.000,-. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 300.800.000,- realisasi Rp. 275.800.000,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.321.301.900,- realisasi Rp. 3.246.867.400,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 151.860.000,- realisasi Rp. 119.760.000,-. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, dengan anggaran sebesar Rp. 80.973.000,- realisasi Rp. 80.973.000,-. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.693.284.500,- realisasi Rp. 1.670.750.000,-. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 561.634.400,- realisasi Rp. 561.634.400,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 327.100.000,- realisasi Rp. 327.100.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 256.950.000,- realisasi Rp. 256.950.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 75.000.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.700.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 124.500.000,- realisasi Rp. 107.000.000,-.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 348.135.000,- realisasi Rp. 348.135.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 348.135.000,- realisasi Rp. 348.135.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.327.200.000,- realisasi Rp. 1.300.013.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 1.327.200.000,- realisasi Rp. 1.300.013.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.724.050.000,- realisasi Rp. 13.831.192.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.629.555.000,- realisasi 1.219.973.000,-. Kegiatan Reses, dengan anggaran sebesar Rp. 3.290.141.000,- realisasi Rp. 3.021.191.000,-. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.330.500.000,- realisasi Rp. 1.132.435.000,-. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.593.404.000,- realisasi Rp. 1.860.639.000,-. Penunjang Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 6.683.800.000,- realisasi Rp. 6.490.914.000,-. Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 196.650.000,- realisasi Rp. 106.040.000,-.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.759.808.000,- realisasi Rp. 1.652.940.310,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 219.200.000,- realisasi Rp. 147.085.710,-. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 328.935.000,- realisasi Rp. 324.240.000,-. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- realisasi Rp. 65.120.000,-. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- realisasi Rp. 147.950.000,-. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.800.000,- realisasi Rp. 25.800.000,-. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasi Rp. 95.000.000,-. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 852.873.000,- realisasi Rp. 847.744.600,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 520.000.000,- realisasi Rp. 500.552.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- realisasi Rp. 257.891.500,-. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- realisasi Rp. 195.000.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.661.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 118.935.000,- realisasi Rp. 117.785.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Manajemen Implementasi Data

Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp.118.935.000,- realisasiRp. 117.785.000,-.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran untuk program ini sebesar Rp.423.490.000,- realisasiRp. 416.174.500,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan anggaran sebesar Rp. 139.245.000,- realisasiRp. 136.245.000,-. Digunakan untuk biayapenyusunan pelaporan keuangan semesteran.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan anggaran sebesar Rp, 284.245.000,- realisasi Rp. 279.929.500,-.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.7.105.820.200,- realisasi Rp. 5.556.064.300,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan anggaran sebesar Rp.179.620.200,- realisasi Rp. 168.105.000,-. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.275.000.000,- realisasi Rp. 172.391.000,-.Penyusunan Ranperda Tentang APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 556.976.000,- realisasi Rp. 508.979.000,-. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 312.356.000,- realisasiRp. 306.435.000,-. Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 483.962.000,- realisasi Rp. 444.875.000,-. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran sebesar Rp.296.356.000,- realisasi Rp. 288.675.000,-. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 430.089.500, realisasi Rp. 414.333.500,-. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 311.537.000,- realisasi Rp. 305.792.000,-. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesarRp.503.636.000,- realisasiRp. 371.285.000,-. Bimtek Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 396.188.000,- realisasiRp. 396.188.000,-Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 458.412.000,- realisasi Rp. 300.770.000,-. Pekan Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 377.197.700,- realisasi Rp. 261.951.700,-. Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD dan PBB Pedesaan Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp. 301.459.800,- realisasi Rp. 267.547.800,-. Pendapatan dan Evaluasi KP4 Gaji PNSD, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 225.899.000,-. Inventarisasi dan Labelisasi Aset/Barang Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 489.565.000,- realisasi Rp. 354.735.000,-. Penataan Administrasi Manajemen Barang Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.107.337.600,- realisasi Rp. 74.225.000,- Penunjang Sistem Penggajian Pegawai, dengan anggaran

sebesar Rp. 230.735.000,- realisasi Rp. 230.548.000,-. Penyusunan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 154.535.000,- realisasi Rp. 140.445.000,-. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 656.648.000,- realisasi Rp. 118.805.000,-. Inventarisasi Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.284.209.600,- realisasi Rp. 108.049.300,-.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.249.557.500,- realisasi Rp. 1.249.557.500,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 6.530.000,- realisasi Rp. 6.530.000,-. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 20.000.000,-. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- realisasi Rp. 10.200.000,-. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 52.742.000,- realisasi Rp. 52.742.000,-. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 35.000.000,-. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 15.000.000,-. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.110.085.000,- realisasi Rp. 1.110.085.000,-.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 234.600.000,- realisasi Rp. 234.600.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.31.000.000,- realisasi Rp. 31.000.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 203.600.000,- realisasi Rp.203.600.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 147.994.500,- realisasi Rp. 147.994.500,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 147.994.500,- realisasi Rp. 147.994.500,-.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.200.000,- realisasi Rp. 11.200.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 11.200.000,- realisasi Rp. 11.200.000,-.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.074.683.000,- realisasi Rp. 3.071.516.952,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala, dengan anggaran sebesar Rp. 1.315.730.000,- realisasi Rp.1.315.400.952,-. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 311.560.000,- realisasi Rp. 311.360.000,-. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif, dengan

anggaran sebesar Rp. 235.156.000,- realisasi Rp. 235.116.000,-. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp.221.282.000,- realisasi Rp. 218.685.000,-. Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 67.015.000,- realisasi Rp.67.015.000,-. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 923.940.000,- realisasi Rp. 923.940.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 902.436.300,- realisasi Rp. 826.113.700,- dengan kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Jasa SuratMenyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 4.298.000,- realisasi Rp. 4.298.000,-.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 147.170.600,- realisasi Rp. 73.980.000,-. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 45.994.500,- realisasi Rp. 45.994.500,-.Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesarRp. 109.930.200,- realisasi Rp. 109.235.200,-.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 119.900.000,- realisasi Rp. 119.900.000,-.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 475.143.000,- realisasi Rp. 472.706.000,-. Digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 177.657.000,- realisasi Rp. 153.777.000,-. Atau dengan kegiatan sebagai berikut :Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 105.240.000,- realisasi Rp. 81.360.000,-.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 22.817.000,- realisasi Rp. 22.817.000,-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 25.000.000,-.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 24.600.000,- realisasi Rp. 24.600.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 249.196.700,- realisasi Rp. 183.525.700,- dengan kegiatan sebagai berikut :Pendidikan Penjurusan Struktural, dengan anggaran sebesar Rp. 249.196.700,- realisasi Rp. 183.525.700,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 569.348.200,- realisasi Rp. 564.618.200,- dengan kegiatan sebagai berikut :Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.569.348.200,- realisasiRp. 564.618.200,-.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran untuk program ini sebesarRp. 1.818.690.800,- realisasi Rp.1.800.486.800,- dengan kegiatan sebagai berikut :Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 397.868.200,- realisasiRp. 394.955.200,-.Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan, dengan

anggaran sebesar Rp. 220.746.200,- realisasi Rp. 220.731.200,-. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN, dengan anggaran sebesar Rp.68.290.000,- realisasi Rp. 65.350.000,-.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesarRp. 288.137.600,- realisasi Rp.288.137.600,-.Penyelesaian Berkas Kenaikan Pangkat dan Karpeg PNS, dengan anggaran sebesarRp. 287.758.800,- realisasi Rp. 285.329.800,-.Pelantikan Sumpah Jabatan Struktural dan Fungsional, dengan anggaran sebesar Rp. 110.634.800,- realisasi Rp. 108.900.800,-. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, dengan anggaran sebesarRp. 205.626.200,- realisasi Rp. 198.276.200,-.Penyelesaian Berkas Pensiun, dengan anggaran sebesarRp. 239.629.000,- realisasi Rp. 238.806.000,-.

### 15. Ketahanan Pangan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Ketahanan Pangan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	614.200.000	613.942.000	99,87
	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	614.200.000	613.942.000	99,87
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.381.675.000	2.367.408.500	99,40
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	324.411.000	324.391.000	100
	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	415.327.500	405.327.500	97,59
	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	316.612,500	316.610.000	100
	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	201.000.000	200.280.000	99,64
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	346.000.000	345.850.000	99,96
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	381.950.000	379.130.000	99,26
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	212.540.000	212.060.000	99,77
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dewan Ketahanan Pangan	183.834.000	183.760.000	99,96
3.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	183.125.000	8.0125.000	43,75
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	183.125.000	80.125.000	43,75
4.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.097.500.000	1.084.060.000	98,78
	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh	796.250.000	782.810.000	98,31
	Penyusunan Programa dan Program Penyuluhan	231.250.000	231.250.000	100
	Pengembangan Informasi Penyuluh	70.000.000	70.000.000	100

## 16. Pemberdayaan Masyarakat

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	210.300.000	205.660.000	97,79
	Penyediaan Data Terpilah Anak	210.300.000	205.660.000	97,79
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	111.250.000	101.980.000	91,67
	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	111.250.000	101.980.000	91,67
3.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	400.000.000	384.240.000	96,06
	Pembinaan Organisasi Perempuan	400.000.000	384.240.000	96,06
4.	Program Keluarga Berencana	118.000.000	118.000.000	100
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	118.000.000	118.000.000	100
5.	Program Pelayanan Kontrasepsi	275.724.000	270.834.000	98,23
	Pendistribusian Alat Kontrasepsi	275.724.000	270.834.000	98,23
6.	Program DAK Pemberdayaan	1.878.346.500	1.878.346.500	100
	Pembangunan Gedung Kantor	1.354.330.000	1.354.330.000	100
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	404.016.500	404.016.500	100
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	120.000.000	120.000.000	100

## 17. Komunikasi dan Informatika

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan komunikasi dan informatika ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100.000.000	98.850.000	100
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	100.000.000	98.850.000	100
2.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	140.000.000	139.055.000	100
	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	140.000.000	139.055.000	100
3.	Program Kerjasama Informasi Dengan Massa Media	70.000.000	70.000.000	100
	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	70.000.000	70.000.000	100

## 18. Kearsipan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan kearsipan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	125.000.000	124.950.000	99,96
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	125.000.000	124.950.000	99,96
2.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	388.600.000	388.600.000	100
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	100.000.000	100.000.000	100
	Pengembangan Minat Budaya Baca	74.600.000	74.600.000	100
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	25.000.000	25.000.000	100
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	189.000.000	189.000.000	100

## **19. Penanggulangan Bencana**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan penanggulangan bencana ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.697.557.380,- realisasi Rp. 3.479.930.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 185.750.000,- realisasi Rp. 185.750.000,-. Pemukiman Korban Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 3.118.238.380,- realisasi Rp. 2.921.611.000,-. Pelatihan Penilaian Kerusakan Akibat Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. 297.268.000,- realisasi Rp. 279.268.000,-. Penyediaan Alat dan peralatan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. 96.301.000,- realisasi Rp. 96.301.000,-.

## **20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan pelayanan terpadu satu pintu ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

Program Peningkatan Promosi dan Investasi, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 120.750.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 80.500.000,-. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 40.250.000,-.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 528.375.000,- realisasi Rp. 510.100.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 400.295.000,- realisasi Rp. 391.900.000,-. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 128.080.000,- realisasi Rp. 118.200.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 343.415.000,- realisasi Rp. 291.575.000,- atau dengan kegiatan sebagai berikut : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 400.295.000,- realisasi Rp. 391.900.000,-.

## 2.6.2. URUSAN PILIHAN

### 1. Pertanian

#### a) Dinas Pertanian dan Peternakan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan pertanian ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.376.000.000	2.308.255.000	97,15
	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	1.306.000.000	1.264.155.000	96,80
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	920.000.000	915.850.000	99,55
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150.000.000	128.250.000	85,50
2.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	150.000.000	86.400.000	57,60
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	50.000.000	-	0,00
	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	100.000.000	86.400.000	86,40
3.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.448.862.000	1.439.911.500	99,38
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	223.862.000	222.811.500	99,53
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1.025.000.000	1.017.100.000	99,23
	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	200.000.000	200.000.000	100
4.	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Ternak	455.833.277	455.833.277	
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	125.000.000	125.000.000	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Produksi Pertanian	330.833.277	330.833.277	100
5.	Program Pengelolaan Breeding Centre	100.000.000	100.000.000	
	Pemeliharaan Breeding Centre	100.000.000	100.000.000	100
6.	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Ternak	1.433.982.847	1.162.767.999	81,09
	Pendataan Masalah Peternakan	100.000.000	84.700.000	84,70
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	150.000.000	138.850.000	92,57
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAK Bidang Pertanian)	733.982.847	489.640.999	66,71
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	450.000.000	449.577.000	99,91
7.	Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan	9.531.477.071	8.839.670.494	92,74

	Jaringan Pengairan Lainnya			
	Pembangunan Saluran/Jaringan Irigasi (DAK Bidang Pertanian)	1.422.857.799	1.142.865.200	80,32
	Pembangunan Jaringan Air Permukaan (DAK Bidang Pertanian)	2.966.108.446	2.699.130.348	91,00
	Pembangunan Embung (DAK Bidang Pertanian)	1.288.269.177	1.267.426.201	98,38
	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (DAK Bidang Pertanian)	3.041.961.649	2.925.443.745	96,17
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK)	150.000.000	150.000.000	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	150.000.000	100
9.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	350.000.000	296.033.277	84,58
	Pembangunan Sarana/Prasarana Penunjang Produksi Pertanian	350.000.000	296.033.277	84,58
10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (DAK)	300.000.000	250.887.946	83,63
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	300.000.000	250.887.946	83,63
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)	1.000.000.000	997.500.000	99,75
	Pembangunan Saluran/Jaringan Irigasi	1.000.000.000	997.500.000	99,75
12.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	5.722.840.000	4.811.689.777	84,08
	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	3.700.000.000	2.941.039.648	79,49
	Pembangunan Lantai Jemur	750.000.000	747.500.000	99,67

## b) Kehutanan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan kehutanan dan perkebunan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1.188.104.440	1.029.108.000	86,62
	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	228.023.500	188.023.000	82,46
	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	327.160.000	326.960.000	99,94
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	122.100.000	57.650.000	47,22
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	510.820.940	456.475.000	89,36
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.968.674.450	1.943.961.000	98,74
	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	967.000.100	956.195.000	98,88
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	393.802.350	390.841.000	99,25

	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	463.372.000	452.780.000	97,71
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	144.500.000	144.145.000	99,75
	Program Pembinaan dan Pengembangan Hutan	402.000.000	401.250.000	99,81
	Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	402.000.000	401.250.000	99,81
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.512.386.710	14.833.021.100	84,70
	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	577.399.500	574.547.000	24,96
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	590.417.000	589.712.000	99,88
	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	12.516.647.210	9.890.678.600	79,02
	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	372.162.000	370.058.000	99,43
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	417.132.000	409.563.000	98,19
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	1.490.362.000	1.454.730.500	97,61
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	1.548.267.000	1.543.732.000	99,71
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	1.643.930.500	1.448.604.000	88,12
	Pengadaan Mebeleur	50.000.000	50.000.000	100
	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	228.023.500	188.023.000	82,46
	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	278.023.500	269.480.000	96,93
	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	429.511.500	293.321.000	68,29
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	195.000.000	195.000.000	100
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Rehabilitasi Hutan	463.372.000	452.780.000	97,71

## 2. Energi dan Sumber Daya Mineral

Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan energy dan sumberdaya mineral ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat diantaranya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	191.445.000	133.885.000	69,93
	Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	70.110.000	12.550.000	17,90

	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C	121.335.000	121.335.000	100
2.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	186.000.000	185.049.000	99,49
	Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat	186.000.000	185.049.000	99,49
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.219.981.800	5.123.841.143	98,16
	Pengawasan dan Pendataan Ketenagalistrikan	119.400.000	119.400.000	100
	Pengembangan Jaringan Distribusi Listrik dan Komponen Instalasi Listrik	5.100.581.800	5.044.441.143	98,90
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi	312.800.000	295.889.000	94,59
	Koordinasi dan Pendataan Air Bawah Tanah	47.960.000	47.700.000	99,46
	Pengawasan Niaga BBM	170.780.000	154.604.000	90,50
	Penataan dan Pengendalian Potensi Geologi	94.060.000	93.585.000	99,50

### 3. Kelautan Dan Perikanan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan kelautan dan perikanan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTAS E (%)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2.297.290.000	1.788.843.500	77,87
	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	53.525.000	53.525.000	100
	Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.243.765.000	2.219.564.000	98,92
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	180.000.000	179.120.000	99,51
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Rutin Terpadu	180.000.000	179.120.000	99,51
3	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	200.000.000	200.000.000	100
	Pengembangan Budidaya Perikanan	200.000.000	200.000.000	100
4	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	450.000.000,-	449.950.000	99,99
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	450.000.000	449.950.000	99,99
5	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	733.551.000	715.209.000	97,50
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran	733.551.000	715.209.000	97,50
6	Program Pengembangan Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	317.122.000	313.622.000	98,90
	Penetapan Zonasi Daerah Konservasi	178.651.000	175.151.000	98,04
	Studi Banding Pengelolaan Daerah Konservasi	138.471.000	138.471.000	100
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)	2.425.693.000	2.345.850.000	96,71

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.425.693.000	2.345.850.000	96,71
8	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK)	2.456.900.000,-	2.046.850.000	83,31
	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan Berukuran 3 GT sampai dengan 10 GT	2.456.900.000,-	2.046.850.000	83,31

#### 4. Perindustrian

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan industri ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.448.285.000	1.430.430.000	96,71
	Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	2.170.781.500	2.090.632.700	96,31
	Sosialisasi dan Penertiban Usaha Industri	131.672.000	120.968.000	91,87
	Identifikasi Potensi Unggulan	137.883.000	135.277.300	98,11
2.	Program Bidang Industri	243.666.000	1.181.482.700	95,00
	Pembangunan Rumah Produksi	243.666.000	1.181.482.700	95,00

#### 5. Perdagangan

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan perdagangan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	310.947.000	310.387.000	99,82
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	164.997.000	164.437.000	99,66
	Pemantauan Stock dan Harga Barang	145.950.000	145.950.000	100
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.268.636.700	3.048.199.100	93,26
2.	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	72.649.500	70.212.500	96,65
	Pengawasan Pelayanan Pasar	226.200.000	136.450.000	60,32
	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Rakyat	2.987.787.200	2.841.536.600	95,11
3.	Program Sarana Perdagangan (DAK)	2.598.460.000	2.452.199.400	94,37
	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Rakyat	2.598.460.000	2.452.199.400	94,37

#### 6. Pariwisata

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan pariwisata ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	169.307.000	157.612.000	93,09
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	79.500.000	71.340.000	89,74
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	89.807.000	86.272.000	96,06
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	583.685.000	570.605.000	97,76
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	483.685.000	474.685.000	98,14
	Pemeliharaan Objek Wisata	100.000.000	95.920.000	95,92
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (DAK)	2.095.000.000	1.999.250.000	95,43
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2.095.000.000	1.999.250.000	95,43

## 7. Transmigrasi

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pencapaian peningkatan pada urusan ketransmigrasian ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PROSENTASE (%)
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	514.227.200	512.943.000	99,75
	Peningkatan SDM Anak-Anak Transmigrasi	514.227.200	512.943.000	99,75
2.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (APBD-P)	150.000.000	150.000.000	100
	Peningkatan SDM Anak-Anak Transmigrasi	150.000.000	150.000.000	100

### 2.6.3. Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Asas Tugas Pembantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan hanya menggunakan asas desentralisasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ini

meliputi Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang di berikan.

Adapun realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 melalui beberapa Bidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU TAHUN 2016	REALISASI	PROSENTASE (%)
A.	<b>BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian dan Peternakan)</b>			
1.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	3.499.389.000	3.371.139.000	96,34
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, yang dilaksanakan di Kecamatan Bula Barat Desa Waisamet, Waimatakabo, Waiketambaru, Jakarta Baru, Sumber Agung Dan Jembatan Basah, Teluk Waru, Seram Timur, Werinama, Kilmuri. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, yang dilaksanakan di Kecamatan Bula Barat Desa Waisamet, Waimatakabo, Waiketambaru, Jakarta Baru, Sumber Agung dan Jembatan Basah. Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya, yang dilaksanakan di Kecamatan Bula Barat, Teluk Waru dan Tutuk Tolu.			
B.	<b>BIDANG TRANSMIGRASI (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)</b>			
1.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Tertinggal	3.384.323.000	3.269.426.000	96,61
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi. Pengembangan Usaha Transmigrasi. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi. Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan. Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang Terbentuk dan Berfungsi di SP/KPB/Kawasan.			
C.	<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan)</b>			
1.	Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	15.471.190.000	14.546.163.500	94,02
	Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID), yang dilaksanakan tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendampingan Kawasan Mandiri Pangan, yang dilaksanakan tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur.			
D.	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)</b>			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.200.000,000	1.060.230.000	88,35

	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, yang dilaksanakan di Pulau Gorom Desa Wawasa. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, yang dilaksanakan di Pulau Gorom Desa Wawasa. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.			
2.	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.039.240.000	1.917.325.000	94,02
	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, yang dilaksanakan di Bula			

## 2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Untuk memudahkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan pengelompokan permasalahan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: Permasalahan Perekonomian Makro daerah dan Sosial

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka permasalahan terkait dengan perekonomian Makro Daerah dan sosial dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dikelompokkan menjadi, antara lain:

### 2.7.1. Perekonomian Makro Daerah

Permasalahan pertumbuhan perekonomian makro di Kabupaten Seram Bagian Timur, meliputi, antara lain :

- Pertumbuhan PDRB;
- Laju Inflasi;
- PDRB Per Kapita;
- Indeks Ketimpangan Regional; dan
- Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

## **2.7.2. Sosial**

Permasalahan bidang sosial yang ada secara garis besar masih seputar pada pelayanan sosial dasar masyarakat yang masih terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jenis layanan dalam ruang lingkup sosial terdiri dari: pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya. Demikian juga pembangunan dibidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian dan sekaligus membuka wilayah yang masih terpencil, terisolir, terbelakang dan tertinggal.

## **2.7.3. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam**

### **2.7.3.1. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) rendahnya angka partisipasi murni; (ii) rendahnya angka partisipasi kasar; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kesekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkontribusi secara signifikan terhadap tumbuhnya pengangguran, perkembangnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (Pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna Narkoba, pengemis dan gelandangan).

### **2.7.3.2. Sumber Daya Alam**

Data yang ditelaah dan dianalisis sebagaimana terdapat pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, telah memberi informasi, bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Timur sangat beragam, mulai dari sumber daya alam didaratan, seperti pertanian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sagu, sayur mayur dan buah-buahan), tamanan perkebunan (seperti : kelapa, cengkeh, pala, karet, kopi, coklat dan jambu mete), serta peternakan (seperti : sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam dan itik).

## **2.7.4. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar**

Permasalahan yang muncul adalah: (i) pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iii) Keakurasian dan

keabsahan data dasar untuk penyusunan jenis, kuantitas dan kualitas layanan dasar; (iv) pengembangan sistem inovasi daerah yang belum optimal; (v) belum tersedianya SOP untuk pelaksanaan pelayanan sosial dasar; dan (vi) belum tersedianya data dasar penerima manfaat pelayanan dasar.

#### 2.7.4.1. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum teritegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 394, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan ketertiban administrasi dalam pengelolaan asset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

#### 2.7.4.2. Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian Peraturan Daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala SKPD dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain (DPRD), lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

#### 2.7.4.3. Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPD menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen

anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat public (public hearing) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

#### 2.7.4.4. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan desa agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### 2.7.4.5. Manajemen Pelayanan.

Cakupan manajemen layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal.

Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Kesadaran masyarakat terhadap tertib pelaksanaan administrasi kependudukan masih kurang. Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan, seperti: kepemilikan KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian. Demikian pula, pengadministrasiannya belum dilakukan secara cermat dan terintegrasi.

#### 2.7.4.6. Tanggap Darurat Bencana

Sebagai Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparatur

yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas, dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kaulitasnya.

#### 2.7.4.7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam tahun 2012 – 2014 telah ditelaah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 2.7.5. Urusan Wajib

#### 2.7.5.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan (i) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar; (ii) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta; (iii) rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru; (iv) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (v) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (vi) belum maksimalnya output pembelajaran; dan (vii) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

#### 2.7.5.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan (i) masih relatif tingginya angka kematian ibu; (ii) masih ditemukannya balita gizi buruk; (iii) masih tingginya penderita DBD; (iv) masih rendahnya pengetahuan tentang penyakit HIV-AIDS; (v) masih tingginya penderita penyakit menular; (vi) rasio tenaga kesehatan yang belum mencapai target; (vii) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (viii) belum optimalnya deteksi dini berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (ix) belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan; (x) masih belum optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan (xi) masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan.

#### 2.7.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan urusan pekerjaan umum (i) belum optimalnya fungsi jalan dan jembatan secara optimal; (ii) belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan perdesaan, serta antara sentra produksi dengan pusat perdagangan; (iii) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kabupaten Seram Bagian Timur; (iv) belum optimalnya sarana prasarana bidang pekerjaan umum; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan; (vi) masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis; (vii) masih kurangnya moda transportasi perairan; dan (viii) masih rendahnya alokasi pagu anggaran pembangunan yang terfokus untuk peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan.

#### 2.7.5.4. Urusan Perumahan

Permasalahan urusan perumahan (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih adanya rumah tidak layak huni; dan (iii) masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

#### 2.7.5.5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan urusan penataan ruang (i) belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan; (ii) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (iii) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; (v) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah; (vi) belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan (vii) belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.

#### 2.7.5.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan urusan perencanaan pembangunan (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Seram Bagian Timur; (ii) masih adanya dokumen perencanaan pembangunan yang kurang sinkron/tidak konsisten/tidak selaras dan tidak bersinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur; (iii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi, serta masih rendahnya kuantitas sumberdaya manusia dibidang perencanaan; dan (iv) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

#### 2.7.5.7. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan perhubungan (i) masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (ii) masih kurang optimalnya fungsi terminal; (iii) masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (iv) masih kurangnya data dan informasi untuk perencanaan dan peningkatan moda transportasi perairan; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas transportasi laut; dan (vi) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten.

#### 2.7.5.8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup (i) masih tingginya pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; (ii) masih tingginya eksploitasi sumber daya alam; (iii) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (iv) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; dan (v) masih banyak usaha/ kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3.

#### 2.7.5.9. Urusan Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan (i) masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) masih belum tersedianya data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi mengenai pertanahan.

#### 2.7.5.10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan kependudukan dan pencatatan sipil (i) masih rendahnya pemahaman penduduk mengenai pentingnya dokumen kependudukan; (ii) masih rendahnya perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) masih adanya keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iv) belum optimalnya jumlah sumber daya aparatur yang memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan; dan (v) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (vi) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

#### 2.7.5.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### 2.7.5.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera (i) masih rendahnya MOP dan masih banyaknya unmet need; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; (iv) berkurangnya tenaga lini lapangan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

#### 2.7.5.13. Urusan Sosial

Permasalahan urusan sosial (i) masih tingginya jumlah PMKS ; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

#### 2.7.5.14. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan urusan ketenagakerjaan (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau

minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (iv) masih rendahnya pemantauan dan perlindungan TenagaKerja Indonesia (TKI) di luar negeri; dan (vii) kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatankerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan.

#### 2.7.5.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (i) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (vi) belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM; (vii) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar provinsi maupun nasional; dan (viii) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

#### 2.7.5.16. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belumnya adanya insentif dan disentif investasi; (iii) belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi; (v) masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi; dan (vi) belum berfungsinya secara optimal pelayanan melalui PTSP.

#### 2.7.5.17. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (iv) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan (v) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

#### 2.7.5.18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga (i) masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; (ii) masih kurangnya penggerakan potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iii) masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan; (iv) masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; dan (v) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

#### 2.7.5.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (i) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (ii) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik; (iii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iv) masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai-partai politik.

#### 2.7.5.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Permasalahan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian (i) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (iv) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama kecamatan-kecamatan; (v) belum terwujudnya kemandirian desa-desa; (vi) masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa; (vii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (viii) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (ix) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (x) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (xi) belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah; (xii) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (xiii) masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal; (xiv) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (xv) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (xvi) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja aparatur; (xvii) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (xviii) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi; dan (xix) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

#### 2.7.5.21. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan urusan ketahanan pangan (i) beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman; (ii) masih tingginya angka konsumsi beras per kapita; (iii) cadangan pangan, terutama beras masih rendah; dan (iv) Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah.

#### 2.7.5.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (i) masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan; (ii) masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat; dan (iii) kurang optimalnya kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.

#### 2.7.5.23. Urusan Statistik

Permasalahan urusan statistik (i) masih terjadinya data dan informasi mengenai pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian yang tidak sinkron antara SKPD dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS; dan (ii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

#### 2.7.5.24. Urusan Kearsipan

Permasalahan urusan kearsipan (i) kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip ; (ii) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan; dan (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan.

#### 2.7.5.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika (i) terbatasnya sumber daya aparatur di bidang layanan komunikasi dan informatika; (ii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara tepat guna; dan (iii) masih terbatasnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi;

#### 2.7.5.26. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan (i) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) masih rendahnya minat baca masyarakat; (iii) kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan; (iv) terbatasnya kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur dalam mengelola perpustakaan; dan (v) belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.

### **2.7.6. Urusan Pilihan**

#### *2.7.6.1. Urusan Kelautan dan Perikanan*

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan (i) Rendahnya sumber daya manusia dibidang perikanan; (ii) kurangnya penerapan teknologi perikanan; (iii) kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan; (v) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perikanan; (vi) rendahnya alokasi pagu anggaran untuk

bidang kelautan dan perikanan; dan (vii) masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

#### *2.7.6.2. Urusan Pertanian*

Permasalahan urusan pertanian (i) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih lemahnya sistem alih teknologi; (iv) terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan; (v) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian; (vi) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (vii) kemampuan SDM petani masih rendah; (viii) rendahnya penerapan teknologi peternakan serba guna; (ix) rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (x) muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi; (xi) turunya populasi ternak; dan (xii) masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

#### *2.7.6.3. Urusan Kehutanan*

Permasalahan urusan kehutanan (i) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam; dan (ii) masih adanya konflik dalam pemanfaatan lahan.

#### *2.7.6.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.*

Permasalahan urusan energi dan sumber daya mineral (i) pemanfaatan energi listrik yang hemat sebagai upaya ketersediaan energi listrik yang berkepanjangan; dan (ii) belum efisiennya pemanfaatan dan pengolahan air tanah.

#### *2.7.6.5. Urusan Pariwisata*

Permasalahan urusan pariwisata (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi; (ii) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (iii) belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (iv) belum optimalnya promosi objek wisata; (v) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; dan (vi) belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

#### *2.7.6.6. Urusan Perdagangan*

Permasalahan urusan perdagangan (i) masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa; (ii) belum terumuskannya kebijakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir; (iii) kurang memadainya kualitas sumber daya manusia; (iv) pengawasan bidang ekspor/impur masih lemah; dan (v) belum sinkronnya regulasi tentang PKL dengan kondisi di lapangan.

#### *2.7.6.7. Urusan Perindustrian*

Permasalahan urusan perindustrian (i) belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) masih belum tersedianya bahan baku lokal yang mencukupi; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (vii) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi; dan (ix) kualitas produk belum memenuhi standar.

#### *2.7.6.8. Urusan Ketrasmigrasian*

Permasalahan urusan ketrasmigrasian (i) kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi; (ii) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi.

### **2.7.7. Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan.

Terkait dengan permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dimasa mendatang meliputi :

#### *2.7.7.1. Kemiskinan dan Pengangguran*

Isu kemiskinan sangat terkait dengan masalah pedapatan perkapita dan perubahan struktur lapangan kerja. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja pada sektor pertanian dan nelayan, serta sektor informal lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2013, pendapatan perkapita petani dan nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp.26.650,25 pertahun. Rendahnya pendapatan dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (i) terbatasnya lahan pertanian yang disediakan untuk pertanian dibandingkan dengan luasnya lahan non pertanian; dan (ii) terbatasnya sarana dan prasarana (perahu motor, perahu motor tempel) yang dimiliki oleh nelayan.

#### *2.7.7.2. Rendahnya Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur*

Ketersediaan suatu infrastruktur yang berkualitas pada suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator majunya suatu daerah. Dari aspek kuantitas sampai dengan akhir tahun 2014 kondisi infrastruktur di

Kabupaten Seram Bagian Timur secara umum mengalami perkembangan yang positif dengan pertumbuhan sebesar 13,15. Tercatat lebih dari 40 proyek seperti jembatan, perbaikan jalan, talud penahan ombak, bangunan gedung pemerintah dan sebagainya telah dikerjakan. Pertumbuhan infrastruktur juga berkontribusi positif pada tumbuhnya berbagai sektor, diantaranya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,61 persen. Sementara sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,80 persen tahun 2014.

Namun dari aspek kualitas, sampai dengan akhir tahun 2014, masih ada beberapa ruas jalan strategis yang masih dalam kondisi rusak. Berdasarkan data tersebut, maka isu strategis terhadap Aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur secara garis besar antara lain, meliputi (i) masih terbatasnya ruas-ruas jalan dalam kondisi baik; (ii) terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, utamanya moda transportasi perairan antar pulau; (iii) keterbatasan pasokan listrik dan gangguan distribusi. Hal ini disebabkan oleh belum terkendalinya distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat dan pasokan ke fasilitas vital seperti untuk pembangkit listrik. Gangguan distribusi dipicu adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan distribusi barang dan jasa.

#### *2.7.7.3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian setiap pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerah suatu pemerintahan daerah, maka semakin mandiri pemerintahan daerah yang bersangkutan dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya, atau sebaliknya. Karena demikian strategisnya pendapatan asli daerah dalam konteks pembiayaan belanja pembangunan daerah, maka sering dikawatirkan, bahwa pendapatan asli daerah menjadi simbol kemajuan suatu daerah. Artinya, semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin maju suatu daerah.

Mengingat pendapatan asli daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 5 (lima) tahun yang lalu belum secara maksimal dapat digali, maka untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan daerah baik yang bersifat belanja tidak langsung terutama untuk belanja langsung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan diupayakan dapat dikelola secara maksimal. Kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah satu satunya akan ditempuh melalui (i) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian obyek penerimaan; (ii) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat; (iii) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan;(iv) Penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi); (v) Mengoptimalkan kinerja unit pendapatan (seperti : RSUD, Perhubungan dan Perusda, dll) untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; dan (vi) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

#### *2.7.7.4. Isu KKN Dalam Pengelolaan Pemerintahan*

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Good Governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan isu KKN Dalam Pengelolaan Pemerintahan, maka kedepan pengelolaan pemerintahan daerah akan dilakukan secara transparan efektif, efisien, demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diselenggarakan beberapa pedoman, antara lain :

- Tidak ada korupsi;
- Tidak ada pelanggaran hukum;
- Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik;
- Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap;
- Penggunaan waktu efektif dan produktif;
- Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah; dan
- Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

#### *2.7.7.5. Lemahnya Reformasi Birokrasi dan Pembaharuan*

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaanya. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Untuk menjawab isu strategis tentang lemahnya reformasi birokrasi dan pembaharuan, maka reformasi birokrasi dan pembaharuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan akan ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek, antara lain pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, standar operasi prosedur, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

#### *2.7.7.6. Rendahnya Pelayanan Publik dan Partisipasi Publik*

Pemerintah daerah dibentuk karena adanya tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat mudah dan murah. Dengan demikian, maka pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan yang bersifat mendasar harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, saat ini masih ditemukan adanya pelayanan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan sesuai harapan masyarakat, misalnya pelayanan untuk pembuatan KTP, pembuatan Akte Pernikahan, pembuatan Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte perceraian.

Masyarakat sebagai pelaku dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum dapat dilibatkan secara optimal. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat, maka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimasa mendatang perlu perlu lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, forum-forum konsultasi publik sebagai wahana untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui metode yang transparan, demokratis, adil dan akuntabel. Demikian pula pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan mengawal pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembahasan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih perlu ditingkatkan.

Terkait dengan isu-isu strategis diatas, maka dalam tahun kedepan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran

serta dan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara transparan, adil, demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan capaian target kinerja dari setiap perangkat daerah akan diukur dengan kriteria dalam SOP dimaksud.

Disamping isu-isu strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib, maupun pilihan tetap akan menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Isu-isu strategis dimaksud meliputi :

## **2.7.8. Urusan Wajib**

### *2.7.8.1. Urusan Pendidikan*

Isu-isu strategis urusan pendidikan (i) rendahnya kualitas sumber daya manusia. (ii) rendahnya kompetensi tenaga pendidikan; (iii) masih adanya disparitas antar lembaga pendidikan antara negeri dengan swasta; (iv) belum semua tenaga pendidik telah bersertifikasi; dan (v) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

### *2.7.8.2. Urusan Kesehatan*

Isu-isu strategis urusan kesehatan (i) rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat; (ii) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat (iii) masih rendahnya kuantitas tenaga medis dan non medis; (iv) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (v) belum tersedianya data terkait dengan jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan; (vi) masih rendahnya kuantitas pelaksanaan promosi kesehatan; (vi) penerapan manajemen bidang kesehatan belum optimal.

### *2.7.8.3. Urusan Pekerjaan Umum*

Isu-isu strategis urusan pekerjaan umum (i) belum optimalnya ketersediaan infrastruktur yang dapat memperpendek rentang kendali antar kecamatan, antar desa dan dusun; (ii) belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan Umum; (iii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perairan; (iv) masih rendahnya kualitas fisik pelabuhan; (v) masih kurangnya moda transportasi perairan; dan (vi) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terfokus ke wilayah kepulauan/pulau.

### *2.7.8.4. Urusan Perumahan*

Isu-isu strategis urusan perumahan (i) masih adanya rumah penduduk yang tidak layak huni; dan (ii) masih kurangnya ruang terbuka untuk aktivitas publik.

#### *2.7.8.5. Urusan Penataan Ruang*

Isu-isu strategis urusan penataan ruang (i) belum kurangnya sosialisasi perda RTRW; (ii) perlu peningkatan dan penguatan penegakan hukum perda tata ruang; (iii) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; dan (iv) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah.

#### *2.7.8.6. Urusan Perencanaan Pembangunan*

Isu-isu strategis urusan perencanaan pembangunan (i) masih belum berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan; (ii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dibidang perencanaan; dan (iii) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

#### *2.7.8.7. Urusan Perhubungan*

Isu-isu strategis urusan perhubungan (i) masih lengkapnya sarana dan prasarana lalu lintas; (ii) belum dimanfaatkannya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan bidang urusan perhubungan;(iii) perlu dikembangkan blue print pembangunan transportasi laut secara terpadu; dan (iv) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan bidang urusan perhubungan.

#### *2.7.8.8. Urusan Lingkungan Hidup*

Isu-isu strategis urusan lingkungan hidup (i) masih tingginya pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah kawasan untuk perumahan, industri dan/atau usaha lainnya; (ii) perlu ada penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup; dan (iii) perlunya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### *2.7.8.9. Urusan Pertanahan*

Isu-isu strategis urusan pertanahan (i) perlu dilakukan pemutahiran data pertanahan; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan.

#### *2.7.8.10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Isu-isu strategis urusan kependudukan dan pencatatan sipil (i) perlu dilakukan sosialisasi undang-undang tentang kependudukan; (ii) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (iii) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

#### *2.7.8.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (i) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perempuan; (ii) perlunya penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### *2.7.8.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*

Isu-isu strategis urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera (i) perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya keluarga berencana; (ii) perlu adanya upaya pencegahan perkawinan dini; (iii) perlu ada penambahan tenaga relawan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

#### *2.7.8.13. Urusan Sosial*

Isu-isu strategis urusan sosial (i) masih tingginya jumlah PMKS ; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

#### *2.7.8.14. Urusan Ketenagakerjaan*

Isu-isu strategis urusan ketenagakerjaan (i) masih rendahnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Seram Bagian Timur; (ii) masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan; (iv) kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan.

#### *2.7.8.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*

Isu-isu strategis urusan koperasi dan usaha kecil menengah (i) kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum sesuai regulasi terkait; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (iv) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (v) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi.

#### *2.7.8.16. Urusan Penanaman Modal*

Isu-isu strategis urusan penanaman modal (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belum optimalnya pelayanan perizinan

sistem satu pintu/PTSP; (iii) masih rendahnya muatan untuk produksi barang.

#### *2.7.8.17. Urusan Kebudayaan*

Isu-isu strategis urusan kebudayaan (i) masih rendahnya alokasi pagu anggaran; (ii) kurangnya promosi budaya lokal; dan (iii) kurangnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk pengembangan pariwisata.

#### *2.7.8.18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga*

Isu-isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga (i) masih terbatasnya penggerakan potensi dan sumber daya manusia; (ii) masih kurangnya partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan; (iii) masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga; dan (iii) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga.

#### *2.7.8.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.*

Isu-isu strategis urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (i) kurangnya sosialisasi mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara; (ii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara terhadap organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iii) masih rendahnya pendidikan politik oleh partai politik.

#### *2.7.8.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian*

Isu-isu strategis urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian (i) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (iv) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama kecamatan-kecamatan; (v) belum terwujudnya kemandirian desa-desa; (vi) masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa; (vii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (viii) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (ix) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (x) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (xi) belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah; (xii) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (xiii) masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal; (xiv) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (xv) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (xvi) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan

kinerja aparatur; (xvii) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (xviii) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi; dan (xix) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

#### *2.7.8.21. Urusan Ketahanan Pangan*

Isu-isu strategis urusan ketahanan pangan (i) masih adanya alih fungsi lahan pertanian; dan (ii) adanya iklim cuaca yang sulit diprediksi, sehingga hasil panen belum optimal.

#### *2.7.8.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (i) masih rendahnya pemahaman sumber daya aparatur pemerintahan desa mengenai program dan kegiatan; dan (ii) terbatasnya kualitas dan kuantitas kader dilapangan.

#### *2.7.8.23. Urusan Statistik*

Isu strategis urusan statistik, yaitu masih terbatasnya kualitas dan kuantitas data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

#### *2.7.8.24. Urusan Kearsipan*

Isu-isu strategis urusan kearsipan (i) perlu dilakukan sosialisasi mengenai kearsipan; dan (ii) terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang kearsipan.

#### *2.7.8.25. Urusan Komunikasi dan Informatika.*

Isu-isu strategis urusan komunikasi dan informatika (i) masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk menunjang kinerja bidang komunikasi dan informatika; dan (ii) perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang komunikasi dan telekomunikasi.

#### *2.7.8.26. Urusan Perpustakaan*

Isu-isu strategis urusan perpustakaan (i) perlu adanya sosialisasi mengenai perpustakaan; (ii) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang perpustakaan; (iii) perlu peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang perpustakaan.

### **2.7.9. Isu Lingkungan Strategis**

Untuk menentukan jenis dan karakteristik suatu isu strategis sebagai isu lingkungan internal dan eksternal, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain :

### *2.7.9.1. Isu Strategis Lingkungan Internal*

Data dan informasi yang perlu digali dan diuraikan dalam isu strategis lingkungan internal, mencakup antara lain (i) posisi geografis dan geoekonomi; (ii) kondisi demografi; (iii) geologi; (iv) topografi; (v) klimatologi; (vi) lingkungan sosial budaya; (vii) kondisi makro ekonomi daerah; dan (ix) fasilitas infrastruktur wilayah.

Isu strategis lingkungan internal di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, terkait dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain yaitu (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; (2) mengelola aparatur supaya agar dapat bekerja lebih profesional, kompetitif dan akuntabel; (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan porsi belanja langsung untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan (4) tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat cepat, tepat, mudah dan murah.

### *2.7.9.2. Isu Strategis Lingkungan Eksternal*

Isu strategis lingkungan eksternal dapat datang dari berbagai dinamika, baik adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terlepas dari berbagai bentuknya, setiap isu harus dapat dicarikan solusinya, terutama solusi dalam bentuk program/kegiatan. Isu strategis lingkungan eksternal, disamping dapat dipandang sebagai kendala/tantangan dalam pengembangan institusi, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan berbagai potensi unggulan daerah.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka hasil telaah dan analisis terhadap data dan informasi, serta dinamika yang berkembang, identifikasi terhadap isu strategis lingkungan eksternal dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

#### *2.7.9.2.1. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Maluku*

Keputusan politik pemerintah pusat untuk mengurangi subsidi BBM dan tarif Dasar listrik berimplikasi pada inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin, penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk belanja rutin dan belanja modal, terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat perlu lebih di efisienkan.

Demikian pula kebijakan moratorium PNS sepanjang Tahun 2015-2019, kiranya dapat dijadikan sebagai momentum bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menginspirasi lahirnya berbagai

inovasi dan kreasi mendidik masyarakat untuk berwirausaha, sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan adanya program-program terobosan yang lebih inspiratif dengan melibatkan peran serta kalangan dunia usaha.

#### 2.7.9.2.2. Integrasi Pasar Bebas (AFTA, AFT dan MEA)

Sesuai dengan kesepakatan diantara negara se asia, bahwa pada akhir tahun 2015 akan diberlakukan kerjasama AFTA, AFT dan MEA. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Terkait dengan berlakunya AFTA, AFT dan MEA, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu wilayah digugusan nusantara, harus mempersiapkan mental, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas sumber dayanya. Langkah yang perlu mendapat pertimbangan dalam menghadapi integrasi pasar bebas dimaksud, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi antara lain sebagai berikut : (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; dan (iii) meningkatkan arus investasi, meningkat kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan ke pasar-pasar di ASEAN; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi kunjungan wisata, terutama wisata laut yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

#### 2.7.9.2.3. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty;
- Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor –pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Kesepakatan global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif.

Untuk mencapai target tersebut, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur supaya diarahkan

untuk mencapai berbagai target indikator sasaran, antara lain (i) menurunkan angka kemiskinan; (ii) meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang urusan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan; (iv) menciptakan lapangan kerja baru, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (v) mengupayakan secara maksimal kualitas ekosistem lingkungan hidup; (vi) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan akuntabel; (vii) menciptakan kondisi wilayah tertib, nyaman dan aman; dan (viii) terlaksananya penegakan hukum yang profesional.

#### **2.7.10. Isu-isu Strategis Nasional**

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada masa mendatang. Dokumen perencanaan tingkat nasional akan menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik regional maupun nasional.

##### *2.7.10.1. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2015-2019*

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada periode tahun 2015-2019, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi dalam rangkaian dalam bait-bait kata secara implisit memiliki makna yang sangat strategis dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Makna dimaksud adalah sebagai berikut :

Gotong Royong, merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat, adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk

mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian, memiliki makna antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Berkepribadian, harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perlu ditempuh melalui rumusan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya dalam upaya mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Balidan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

#### Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan gambaran kondisi riil yang perlu menjadi perhatian dan merupakan isu untuk dapat diantisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan untuk periode tahun 2014-2019. Isu strategis dimaksud, meliputi :

- Isu-isu Strategis Global
- Perubahan iklim dan bencana alam;
- Terorisme global;
- Perdagangan bebas;
- Demokrasi dan HAM; dan
- Trafficking; dan
- Sustainable Development Goals (SDGs).

#### 2.7.10.2. Isu-isu Strategis Daerah

- Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien;
- Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- Terbatasnya infrastruktur dasar;
- Belum optimalnya pelayanan pendidikan;
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan;

- Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan terluar dan terdepan;
- Ketimpangan antar wilayah;
- Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama;
- Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

## **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan bagian dari negara Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional. Kondisi tahun 2016 dan proyeksi perekonomian di tahun 2017-2018 digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang sekaligus merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasilguna.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2018 yaitu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas dan berkesinambungan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, terjaganya stabilitas keamanan dan ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta terjaganya stabilitas fiskal daerah.

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan semakin berfungsinya kelembagaan lokal di pedesaan. Penguatan kedua elemen dimaksud, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Seram Bagian Timurditikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada keunggulan komoditi lokal di perdesaan.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, akan dilakukan upaya dalam meningkatkan investasi daerah dan penggunaan belanja daerah untuk mendorong peningkatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, serta penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus diupayakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2015 terbesar disumbangkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 28,20%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%.

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi, maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor primer untuk memperkecil ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua stakeholder dan lingkungan. Penerapan kebijakan tersebut dalam konsep yang lebih implementatif adalah sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing

Program dan kegiatan diarahkan pada:

- a. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, UMKM dan koperasi;
- b. Penyediaan berbagai ragam ketrampilan untuk mengembangkan kewirausahaan untuk laki-laki dan perempuan

- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
  - d. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
  - e. Peningkatan peran BUMDES dan BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
  - g. Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
  - h. Akselerasi pertumbuhan ekonomi;
  - i. Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis.
- Program dan kegiatan diarahkan pada:
- a. Menuju kemandirian pangan;
  - b. Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal potensial dan strategis;
  - c. Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal potensial dan strategis dari hulu sampai dengan hilir.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Capaian indikator ekonomi makro dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2011 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp1,723,341.91 juta, pada tahun 2012 Rp. 2,144,076.52 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 2,438,914.35 juta pada tahun 2015, sedikit menurun menjadi Rp. 2,209,982.73 juta, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp. 2,438,000.00juta pada tahun 2018 seiring dengan membaiknya harga minyak di pasaran dunia.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp. 1,431,888.87 juta, dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sebesar Rp. 1,760,234.28 juta. Diperkirakan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 2,000,000.00 Juta pada tahun 2018.

Struktur perekonomian daerah selama lima tahun terakhir cenderung tidak berubah. Pada tahun 2015 sektor terbesar disumbangkan dari sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti pertambangan, jasa pemerintah, perdagangan, dan konstruksi. Sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 8,54%, kemudian turun menjadi 3,94%, turun kembali pada tahun 2013 sebesar 3,27%. Pada tahun 2014 naik pesat menjadi 8,23% dan turun menjadi 5,82% pada tahun 2015.

Sejalan dengan masih melambatnya kondisi perekonomian dunia sehingga berdampak pada perekonomian nasional yang juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan memberikan tekanan pada perekonomian daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2016. Namun ditengah kondisi potensi perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia maupun nasional, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur masih akan tetap tumbuh meskipun tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan dan perikanan mulai mantap dan mampu menjadi penopang sektor pertambangan.

Melihat kondisi diatas, maka prospek perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur di perkirakan tumbuh pada kisaran 5-6%. Mantapnya sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan perlu dukungan melalui penerapan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah, kemudian mendorong pencapaian pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Uraian	2012	2013	2014	2015*
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,94	3,27	8,23	5,82
Inflasi (%)	8,9	8,2	4,4	5,2
PDRB Harga Berlaku (juta)	1,723,341.91	2,144,076.52	2,438,914.35	2,209,982.73
PDRB Harga Konstan (juta)	1,488,346.93	1,537,041.70	1,663,493.13	1,760,234.28

\*)angka sementara

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Seram Bagian Timur , 2016 (tahun dasar 2010)

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan

eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

#### *3.1.2.1. Tantangan*

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan;
- 2) Menurunkan angka pengangguran;
- 3) Memperkecil Ketimpangan.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- 6) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- 7) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global; dan
- 9) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

#### *3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah*

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 dan 2018 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

- 1) Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis; dan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.
- 5) Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan berwawasan lingkungan.

Bercermin dari kinerja perekonomian daerah pada tahun sebelumnya yang masih tetap stabil walaupun mengalami sedikit perlambatan bersamaan dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, maka perekonomian daerah memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan

mencapai target makro ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, maka prospek perekonomian pada Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,40% dan pada tahun 2017 mampu tumbuh 5,74%. Target tahun 2018 sebesar 6,18% (sesuai dengan target RKP 2018).
- 2) Inflasi pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,9 %, target pada tahun 2017 sebesar 4,7% dan tahun 2018 sebesar 3,5 %.
- 3) Jumlah penduduk miskin diharapkan menurun dengan kisaran 2-3%
- 4) Dibidang perkreditan, prospek kondisi perbankan di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan masih mampu meningkatkan ekspansinya dalam pemberian kredit kepada masyarakat, pemberian kredit kepada UKM hendaknya pada tahun 2018 diharapkan dapat lebih ditingkatkan.

### **3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2005-2025 di tahun ke tigabelas, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, intensifikasi dana perimbangan dan pengembangan pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber-sumber dana lainnya yang sah, untuk dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, baik itu untuk membiayai belanja tidak langsung maupun biaya langsung, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur masih tergantung pada dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dana dalam bentuk subsidi lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa keuangan daerah masih di dominasi oleh Pusat, walaupun pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap jumlah total APBD masih minim, yang mana dapat mempengaruhi dalam penentuan kebutuhan belanja daerah. Selain itu juga, Pemerintah Pusat memberikan batasan-batasan atas penggalan sumber-sumber PAD oleh Daerah, sedangkan kestabilan jumlah pendapatan yang bersumber dari transfer pusat yang diterima oleh daerah pada setiap tahunnya tidak pasti.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi anggaran yang diperuntukkan membiayai baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung ditentukan oleh adanya ketersediaan dari pendapatan daerah, sehingga dari seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dapat dicapai, oleh karena itu perlu ditetapkan arah kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan pengelolaan daerah ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel. Adapun arah kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup yakni arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah dan arah kebijakan belanja daerah.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri

dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah, untuk itu diharapkan dapat terus mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah harus diupayakan untuk menghindari penerimaan daerah yang dapat menambah beban bagi masyarakat.

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 8,1% dari tahun 2017 khususnya kenaikan dari komponen PAD;
- 3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU dan Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai dan pemenuhan prosentase Dana Desa. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2016.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Peninjauan kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan.
- 3) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- 4) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 5) Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan.
- 6) Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas.
- 7) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan.
- 8) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- 9) Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- 10) Meningkatkan kerjasama dengan investor / sektor swasta dengan tujuan untuk pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal tanpa membebani masyarakat;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit biokrasi guna mempermudah investasi.
- 6) Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan.
- 7) Intensifikasi pendapatan melalui pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 8) Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan

yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak.

- 9) Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya dibidang perijinan yakni melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta pemantapan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerapan program “one stop service”
- 10) Meningkatkan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi, perbaikan manajemen BUMD, menumbuhkembangkan iklim yang sehat pada BUMD dengan memacu kinerja usaha/laba perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
- 11) Melaksanakan review terhadap system dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini.
- 12) Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 13) Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah.

Penetapan kebijakan diatas, dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Tabel 3.2. Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 2015-2016 (dalam satuan Rupiah dan Persen)

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD	Proporsi PAD terhadap Pendapatan APBD
2015	17,114,669,288	930,792,234,521	1.84%
2016	17,977,693,562	863,879,740,351	2.08%

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015, hal ini dapat dicapai karena telah maksimalnya upaya pencapaian target pendapatan pada sumber-sumber pendapatan asli daerah. Posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2015-2016 kemampuan pendapatan daerah sesuai

dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3. Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Selama Tahun 2015–2016 (dalam rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
2015	17,114,669,288	787,507,330,233	126,125,000,000	930,792,234,521
2016	17,977,693,562	729,318,266,826	4,891,488,902	881,857,433,913

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

Peran Pajak Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik. Selama tahun 2015-2016 tingkat kontribusinya mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 diharapkan akan terus mengalami kenaikan baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016

Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan PAD	Kontribusi Pajak terhadap PAD
2015	3,309,000,000	17,114,669,288	3.00%	19.33%
2016	2,985,610,009	17,977,693,562	5.00%	16.61%

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015–2016

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan APBD
2015	787,507,330,233	930,792,234,521	84.61%
2016	729,318,266,826	881,857,433,913	82.70%

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 2015-2016 mengalami kenaikan

yang sangat signifikan, bila dilihat dari perkembangannya yang sangat baik maka keberadaannya sangat menunjang/pendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6. Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015-2016

Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Pendapatan APBD
2015	126,170,235,000	930,792,234,521	13.56%
2016	4,891,488,902	881,857,433,913	0.55%

Sumber: Bappeda Kab. Seram Bagian Timur (2017)

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu 2015-2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015 – 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2015	Realisasi Tahun Anggaran 2016	Prediksi Tahun Anggaran 2017	Prediksi Tahun Anggaran 2018
1	Pendapatan Asli Daerah	17,114,669,288	17,977,693,562	19,220,822,667	20,585,501,076
1.1	Pajak Daerah	3,309,000,000	2,985,610,009	3,474,450,000	3,721,135,950
1.2	Retribusi Daerah	700,632,850	836,907,275	896,327,692	959,966,958
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,980,036,438	2,230,800,260	2,079,038,260	2,226,649,976
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	11,125,000,000	11,924,376,018	12,771,006,715	13,677,748,192
2	Dana Perimbangan	787,507,330,233	727,422,099,879	779,069,068,970	834,382,972,867
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	45,633,519,033	47,543,541,879	50,919,133,352	54,534,391,820
2.1.3	Dana Alokasi Umum	493,078,172,000	509,430,093,000	545,599,629,603	584,337,203,305
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	248,795,639,200	170,448,465,000	182,550,306,015	195,511,377,742
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	126,170,235,000	129,669,984,622	134,592,982,192	144,149,083,928
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	7,070,300,000	10,931,266,422	7,423,815,000	7,950,905,865
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119,099,935,000	118,738,718,200	127,169,167,192	136,198,178,063
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>930,792,234,521</b>	<b>875,069,778,063</b>	<b>943,343,596,646</b>	<b>999,117,557,871</b>

### 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 7,10% dari tahun 2017;
- 2) Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2017 dengan akses 1,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- 6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- 7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 8 (delapan) prioritas pembangunan Tahun 2018.
- 8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur 2015 – 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2015	Realisasi Tahun Anggaran 2016	Prediksi Tahun Anggaran 2017	Perediksi tahun Anggaran 2018
2.1	Belanja Tidak Langsung	486,318,640,955	405,245,334,687	434,017,753,450	482,907,046,872
2.1.1	Belanja Pegawai	307,050,469,215	244,577,503,447	261,942,506,192	298,614,457,059
2.1.2	Belanja Hibah	11,509,125,000	9,954,564,000	10,661,338,044	11,418,293,045
2.1.3	Belanja Subsidi	5,629,373,500	710,638,000	761,093,298	815,130,922
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	144,242,773,240	131,313,079,240	140,636,307,866	150,621,485,725
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10,886,900,000	14,241,000,000	15,252,111,000	16,335,010,881
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000	4,448,550,000	4,764,397,050	5,102,669,241
2.2	Belanja Langsung	509,908,319,366	519,670,448,995	556,567,050,874	596,083,311,486
2.2.1	Belanja Pegawai	23,926,379,351	23,926,379,351	25,625,152,285	27,444,538,097
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275,930,968,584	275,930,968,584	295,522,067,353	316,504,134,136
2.2.3	Belanja Modal	210,050,971,431	219,813,101,060	235,419,831,235	252,134,639,253
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>996,226,960,321</b>	<b>924,915,783,682</b>	<b>990,584,804,323</b>	<b>1,078,990,358,358</b>

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk itu arah kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2018 ini terdiri atas arah kebijakan penerimaan daerah dan arah kebijakan pengeluaran daerah.

Arah kebijakan pada penerimaan daerah pada tahun 2018 lebih diarahkan untuk dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata – rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah ini mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Sedangkan arah kebijakan pengeluaran daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk:

- 1) Menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui upaya peningkatan penerimaan pembiayaan atau dengan menekan pengeluaran pembiayaan pada belanja yang direncanakan pada tahun 2018.
- 2) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- 3) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015-2018

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018
3	Penerimaan	66,684,725,800	121,848,993,752	130,500,272,308	139,765,791,642
3.1	Penerimaan Pembiayaan	66,684,725,800	121,848,993,752	130,500,272,308	139,765,791,642
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	66,684,725,800	121,848,993,752	130,500,272,308	139,765,791,642
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,250,000,000	1,250,000,000	1,338,750,000	1,433,801,250
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	1,250,000,000	1,250,000,000	1,338,750,000	1,433,801,250
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>65,434,725,800</b>	<b>123,098,993,752</b>	<b>131,839,022,308</b>	<b>141,199,592,892</b>

Sumber: Bappeda Kab. Seram bagian Timur (2017)

## BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu dua puluh tahun (Tahun 2005 – 2025) adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”

Visi di atas, pada hakekatnya menjelaskan tentang niat dan tekad segenap komponen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk merencanakan dan melaksanakan suatu proses pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan potensi lokal dalam semangat “ita wotu nusa” (mari kita membangun negeri). Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang rukun dan aman merupakan prasyarat mutlak bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang maju dan mandiri. Dalam konteks ini, proses pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan tetap mengakselerasi perubahan-perubahan masyarakat baik pada level Provinsi Maluku maupun pada level nasional dan internasional. Perubahan-perubahan yang adaptif dan fungsional terhadap peningkatan kerukunan, keamanan, keadilan, kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian masyarakat Seram Bagian Timur menjadi prioritas untuk diwujudkan melalui pengembangan sumberdaya kepulauan.

Merujuk pada visi di atas, maka Misi RPJP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 – 2025 adalah:

- Pertama** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan.
- Kedua** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan.
- Ketiga** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD 2016-2021

Untuk mencapai visi jangka panjang tersebut, maka setiap 5 tahun ditetapkan prioritas rencana Pembangunan Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan serta memperhatikan motto “Ita Wotu Nusa” telah dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 adalah :

*“Terwujudnya Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal”*

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

**1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan Dan Kelembagaan Lokal Di Daerah Perdesaan.**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan semakin berfungsinya kelembagaan lokal di pedesaan. Penguatan kedua elemen dimaksud, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dititik beratkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada keunggulan komoditi lokal di perdesaan.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

## **2. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah.**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :

- Tidak ada korupsi;
- Tidak ada pelanggaran hukum;
- APBD baik;
- Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik;
- Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap;
- Komunikasi dengan publik berjalan baik;
- Penggunaan waktu efektif dan produktif;
- Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah; dan
- Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Kuat Dan Kompetitif.**

Keunggulan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan dalam membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak, utamanya dengan masyarakat dari berbagai tingkatan di daerah yang berangkuta (stakeholders). Namun demikian, pada akhirnya semua keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia (birokrasi) sebagai operator yang mengimplementasikan berbagai kerjasama kemitraan dengan para pemangku kepentingan tersebut. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan, bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya integrasi dalam pengembangan jejaring kemitraan antar level stakeholder yang saling melengkapi dan saling mengisi. Oleh karena itu, faktor penting yang harus sejak dini dipersiapkan adalah kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi integrasi kemitraan dimaksud. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi dalam rangka mewujudkan pengembangan perekonomian daerah yang kuat dan kompetitif.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Seram Bagian Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal diluar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

#### **4. Mendorong Penguatan Demokrasi Dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka, Akuntabel Dan Bertanggungjawab.**

Fungsi pemerintahan sebagai agen pembangunan merupakan salah satu fungsi yang strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Dengan fungsi dimaksud, maka kewenangan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan tidak semata-mata menjadi hak prerogatif pemerintah semata, tetapi ada stakeholders lain yang juga mempunyai peran yang kurang lebih sama dengan peran strategis yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu partisipasi masyarakat (publik) dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Melalui mekanisme melibatkan partisipasi publik inilah, maka sesungguhnya pemerintah daerah telah mendorong terwujudnya penguatan demokrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel. Untuk terciptanya masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud, maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, yaitu (i) Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat; (ii) Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum; (iii) Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah; (iv) Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab; dan (v) Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

#### **5. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan Dan Perikanan.**

Kabupaten Seram Bagian Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan kepulauan disamping memiliki kekayaan sumber daya alam daratan yang beraneka ragam, seperti jagung, pala, coklat, cengkeh dan kacang tanah juga dikarunai berbagai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah ruah. Kekayaan laut dan perikanan yang beraneka ragam dalam jumlah yang besar, diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini kekayaan laut dimaksud belum memberi manfaat yang optimal kepada masyarakat. Penyebabnya adalah kekayaan dimaksud belum dapat dikelola secara profesional. Nelayan, yang sehari-hari menggantungkan hidup pada kekayaan laut, belum dapat mengelola kekayaan laut secara maksimal.

Beberapa kendala ketidak maksimalan dalam mengelola hasil laut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (i) Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur masih menempatkan kekayaan sumber daya daratan sebagai lahan untuk mengais rejeki yang paling mudah dan menjanjikan; (ii) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut; dan (iii) Masih adanya pandangan dikalangan masyarakat, termasuk nelayan bahwa kekayaan sumber daya laut sebagai produk unggulan yang dalam pengelolaannya memerlukan teknologi yang mahal.

Atas dasar kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan didorong untuk dikembangkannya produk-produk hasil kelautan menjadi sektor unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Untuk mewujudkan target dimaksud, maka langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah, antara lain (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas dukungan sarana dan prasarana; (ii) meningkatkan kapasitas dan keterampilan para nelayan; (iii) menerbitkan berbagai regulasi terkait untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan; dan (iv) membuka berbagai akses kemudahan kepada para nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan.

#### **6. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan Dan Pasar.**

Pembangunan daerah yang dilakukan secara masif berbagai sektor untuk masa 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan berdampak positif terhadap berbagai target, diantaranya meningkatkan daya saing pemerintah daerah. Strategi ini sangat penting dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain dari pada itu, meningkatnya daya saing pemerintah daerah akan membawa dampak positif terhadap arus investasi, terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatnya pendapat asli daerah dan hidupnya aktivitas perekonomian makro daerah dan pekonomian rakyat.

Terkait dengan maksud tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan pemerintah daerah akan berupaya untuk membangun dan mengembangkan kuantitas dan kualitas berbagai aksesibilitas infrastruktur, serta membangun dan mengembangkan berbagai jaringan dalam rangka penerapan teknologi informasi. Juga akan dilakukan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan bagi seluruh masyarakat, terutama untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal lain yang juga akan didorong akses terhadap sektor keuangan dan membuka pasar untuk komoditi unggulan daerah.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk

membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

#### **7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**

Integrasikan ekonomi antara negara Asean yang secara efektif akan dimulai pada tahun 2015, harus disikapi dengan berbagai pengembangan strategi. Integrasi ekonomi diantara negara Asean selain menjadi tantangan, juga membuka peluang pasar baru atas produk-produk unggulan daerah yang selama ini kurang terpromosi secara baik. Oleh karena itu, untuk dapat merebut pangsa pasar yang terbuka luas tersebut maka kualitas produk-produk unggulan daerah yang akan diandalkan menjadi sumber bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan target sebagaimana telah diuraikan diatas, maka langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, adalah (i) meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia; (ii) memperkuat dan mengembangkan kelembagaan lokal, terutama kelembagaan pada masyarakat diperdesaan dan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga dapat memenangkan dalam pasar persaingan, baik pada tingkat regional, nasional maupun persaingan global pada tingkat asia tenggara.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun (2016-2021) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016–2021

<b>Misi 1 : Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan Dan Kelembagaan Lokal Di Daerah Pedesaan.</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Memetakan dan mengembangkan potensi unggulan di daerah pedesaan.	1) Terpetakannya dan berkembangnya produk produk unggulan daerah.
b. Mengembangkan ekonomi di pedesaan berbasis kawasan dan komoditi unggulan.	2) Berkembangnya perekonomian masyarakat berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung ekonomi kawasan.	3) Berkembangnya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan lokal dan mendukung ekonomi kawasan.
d. Penataan tata ruang desa dalam mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan.	4) Tertatanya tata ruang pedesaan dalam mendukung aktivitas ekonomi pedesaan.
e. Terbangunnya sistem perdagangan dalam pembentukan BUMDesa dan BUMDesa antar desa dalam suatu kawasan ekonomi.	5) Terbangunnya sistem perdagangan yang terintegrasi dengan BUMDes dalam upaya menciptakan kelembagaan perdagangan di pedesaan yang kuat.
f. Mengembangkan daya saing produk pasca panen di kawasan ekonomi.	6) Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
g. Mendorong kerjasama antar pihak dalam percepatan pengembangan ekonomi pedesaan.	7) Terciptanya kerjasama dengan multi pihak dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan.

<b>Misi 2 : Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah.</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN.	1) Tersusunya dan terlaksananya nilai dan prinsip penyelenggaraan yang bersih dan baik.
b. Meningkatkan kualitas dan performa pelayanan publik aparatur pemerintahan daerah berbasis kinerja.	2) Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah.
c. Mendorong peningkatan belanja publik yang proporsional.	3) Meningkatnya belanja untuk publik secara proporsional sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah.
d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan.	4) Terbangunnya sistem koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
e. Meningkatkan legislasi pertanahan bagi pembangunan milik masyarakat.	5) Terbinya peraturan daerah tentang pertanahan bagi pembangunan milik rakyat.
f. Mendorong sertifikasi lahan bagi lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat.	6) Tersertifikasinya lahan untuk pertanian dan perkebunan milik masyarakat.
g. Melindungi lahan untuk tujuan pertanian yang berkelanjutan.	7) Terbangunnya sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup berdimensi pembangunan berkelanjutan.

**Misi 3 : Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Kuat Dan Kompetitif.**

Tujuan	Sasaran
a. Mendorong iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.	1) Meningkatnya jumlah investor ke Kabupaten Seram Bagian Timur.
b. Desain tata kelola perizinan dan pengembangan dunia usaha yang cepat dan transparan.	2) Tersusunnya pedoman perijinan di dunia usaha mudah, murah, cepat dan transparan.
c. Mengembangkan forum mitra usaha antar stakeholder di daerah, kawasan dan nasional.	3) Terbangunnya kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan di daerah, Kawasan dan nasional.
d. Akselerasi dan penyesuaian regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung investasi dunia usaha.	4) Tersusunnya regulasi kebijakan daerah yang mendukung investasi di daerah.
e. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda daerah yang kuat dan mandiri.	5) Tumbuhnya wirausaha muda di daerah yang kuat dan mandiri.
f. Memfasilitasi pengembangan korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terhubung dengan dunia usaha.	6) Terbangunnya korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terkoneksi dengan dunia usaha.
g. Mengembangkan usaha sektor riil dan ekonomi kreatif.	7) Berkembangnya dunia usaha dan ekonomi kreatif.

**Misi 4 : Mendorong Penguatan Demokrasi Dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka, Akuntabel Dan Bertanggungjawab.**

Tujuan	Sasaran
a. Membuka akses yang luas bagi partisipasi publik dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.	1) Terbukanya akses partisipasinya masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.
b. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga non government, seperti Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan.	2) Terbangunnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan LSM, Ormas, Organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
c. Mengembangkan forum Musrenbang yang demokratis dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.	3) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
d. Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.	4) Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.
e. Membangun relasi yang dan sinergis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui asistensi dan konsultasi.	5) Terciptanya relasi yang strategis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

**Misi 5 : Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan Dan Perikanan.**

Tujuan	Sasaran
a. Penataan kawasan dan potensi unggulan kelautan dan perikanan.	1) Tepetakannya kawasan dan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.
b. Pembentukan rezim investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektoral.	2) Meningkatnya investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

	perikanan.
c. Mempercepat alih teknologi dan pengetahuan sektor kelautan dan perikanan.	3) Terwujudnya alih teknologi dan pengetahuan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.
d. Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi unggulan kelautan dan perikanan melalui berbagai media dan forum.	4) Meningkatnya produk potensi unggulan kelautan dan perikanan.
e. Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan, serta pengembangan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan.	5) Berkembangnya sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan.
f. Mengembangkan sektor wisata eco marine tourism.	6) Berkembangnya sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan dan sektor pariwisata perairan.

<b>Misi 6 : Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan Dan Pasar.</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah.	1) Meningkatnya aksesibilitas perhubungan laut antar wilayah untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah.
b. Mengembangkan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan.	2) Berkembangnya berbagai infrastruktur darat, laut dan udara.
c. Meningkatkan akses transportasi laut yang cepat dan aman.	3) Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi laut yang handal, cepat dan aman.
d. Mengembangkan pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.	4) Berkembangnya pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.
e. Mendorong peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi melalui kerjasama multi stakeholder.	5) Meningkatnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi.
f. Meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi,	6) Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi.
g. Memfasilitasi pembangunan perguruan tinggi di daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi.	7) Berkembangnya sektor pendidikan secara terintegrasi mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

<b>Misi 7 : Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lokal sesuai standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia.	1) Meningkatnya kualitas SDM lokal sesuai dengan standar kualifikasi kompetensi nasional.
b. Memfasilitasi SDM lokal pada berbagai bursa tenaga kerja ditingkat daerah, nasional maupun internasional.	2) Terfasilitasinya SDM lokal ke berbagai bursa tenaga kerja di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
c. Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi bagi SDM lokal.	3) Berkembangnya dan terfasilitasinya akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi SDM lokal.

<b>Misi 7 : Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).</b>	
Tujuan	Sasaran
d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik dan Asean (AFTA dan MEA).	4) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik (AFTA) dan MEA.
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.	5) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.
f. Memfasilitasi sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.	6) Terfasilitasinya sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.

## 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 atau disebut nawacita adalah sebagai berikut :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sembilan Agenda Prioritas tersebut diatas dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dengan tema pembangunan “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Tema pembangunan tahun 2018 Provinsi Maluku adalah “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 yaitu :

Dengan mengacu agenda pembangunan Nasional, indikasi tema pembangunan Maluku, dan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur, maka tema pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018 adalah **“Percepatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi Lokal”**. Keselarasan tema pembangunan Seram Bagian Timur dengan tema pembangunan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur

Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah	Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Percepatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi Lokal

Dengan tema yang selaras, diharapkan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten akan turut memberi sumbangan kepada Nasional, demikian juga sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2018 akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, antara lain ; 1) Pengembangan Wilayah, 2) Pembangunan Pendidikan, 3) Pembangunan Kesehatan, 4) Pembangunan perumahan dan Permukiman, 5) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, 6) Ketahanan Energi, 7) Ketahanan Pangan, 8) Penanggulangan Kemiskinan, 9) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, 10) Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2018, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan dan gizi masyarakat, 3) Pengembangan Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, 4) Percepatan Pembangunan infrastruktur, 5) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 6) Peningkatan Ketahanan Pangan, 7) Peningkatan Iklim investasi dan pengembangan usaha, 8) Pentaan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, 9) Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2018, kemudian dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya dengan berbagai permasalahan dan isu strategis internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk Kesejahteraan masyarakat Kabupaten SBT dengan tema 2018 “ Percepatan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal ”, menetapkan prioritas pembangunan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan Infrastruktur
- 2) Pengembangan Ekonomi Lokal
- 3) Penuntasan Kemiskinan
- 4) Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan
- 5) Reformasi Birokrasi
- 6) Revolusi Mental
- 7) Peningkatan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 diatas, maka dari ketujuh prioritas tersebut dapat dijelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Prioritas Infrastruktur.

Tujuan :

- Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah, dalam upaya peningkatan ekonomi lokal di desa
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang

Sasaran :

- Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur
- Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang baik
- Meningkatnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara
- Meningkatnya kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan daerah (produk dan proses)
- Tersedianya data dan informasi terkini, akuntable, dan reliable berkaitan dengan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan dan pencapaian visi misi kabupaten
- Tercapainya Peningkatan Kapasitas pelayanan Perizinan

#### 2) Pengembangan Ekonomi Lokal

Tujuan :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan melalui kelompok masyarakat, Koperasi dan UMKM.

Sasaran :

- Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan
- Meningkatnya kesejahteraan keluarga nelayan dan kuatnya kelompok nelayan
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan kuatnya kelompok tani
- meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM

### 3) Prioritas Penuntasan Kemiskinan.

#### Tujuan :

- Melakukan percepatan penuntasan kemiskinan dan desa tertinggal

#### Sasaran :

- menurunnya angka kemiskinan
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan anak
- Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

### 4) Prioritas Pendidikan dan Kesehatan.

#### Tujuan :

- Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, murah, dan mudah terjangkau
- Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

#### Sasaran :

- Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar 9 tahun
- Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar;
- Meningkatnya budaya baca dan pentingnya arsip daerah
- meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

### 5) Prioritas Reformasi Birokrasi

#### Tujuan :

- Meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan
- Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah;
- Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN.

#### Sasaran :

- Tercapainya Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
- Tercapainya Peningkatan Kapasitas pelayanan Perizinan
- terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah;
- Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah;
- Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel;

- Terwujudnya perilaku aparaturnya yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik.

#### 6) Revolusi Mental

Tujuan :

- Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku.

Sasaran :

- Terkendalinya pemeliharaan Kamratibmas dan tidak kriminal
- Meningkatnya sumber daya manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- terwujudnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat;

#### 7) Peningkatan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Tujuan :

- Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.
- meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran :

- Meningkatnya keindahan kota Bula
- terkendalinya fungsi lingkungan hidup terhadap pembangunan

Tabel 4.3. REKAPAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	<b>Prioritas Percepatan Infrastruktur</b>					
	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah, dalam upaya peningkatan ekonomi lokal di desa	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur	Panjang jalan jembatan terbangun	60%	Program pembangunan jalan, jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			panjang saluran drainase terbangun	60%	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			panjang turap, talud, bronjong terbangun	60%	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan pengelolaan jaringan irigasi, air bersih, air minum	60%	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/air bersih/air minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	60%	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan infrastruktur pedesaan	60%	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan pengembangan	60%	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan kualitas jasa konstruksi	60%	Program pembinaan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara	20%	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara	Dinas Perhubungan
			cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut	40%	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut	Dinas Perhubungan
			cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat	60%	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat	Dinas Perhubungan
			cakupan pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	20%	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			cakupan pengembangan destinasi pariwisata	20%	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
			cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	20%	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Dinas Informasi Dan Komunikasi
		Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang baik	Persentase, jalan, jembatan dan irigasi yang baik	40%	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara	persentase peningkatan pelayanan	50%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
			persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	10%	Program peningkatan dan pengamanan lalulintas	Dinas Perhubungan
			persentase penurunan kecelakaan pengguna angkutan	10%	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan daerah (produk dan proses)	Partisipasi masyarakat yang semakin berkualitas	80%	Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda & Litbang
			Dokumen perencanaan yang semakin berkualitas	80%		
			Dokumen KUA dan PPAS tersusun dengan baik	80%		
			Meningkatnya kompetensi perencana di tiap skpd	80%		
			Dokumen Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah semakin mantap digunakan untuk perencanaan	80%		
			Adanya kesepahaman SKPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah	80%	Program koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah	Bappeda & Litbang
		Tersedianya data dan informasi terkini, akuntable, dan reliable berkaitan dengan pembangunan daerah untuk mendukung	Tersedianya data dan informasi daerah	50%	Program pengembangan data/informasi/statistik	Bappeda & Litbang

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
		perencanaan dan pencapaian visi misi kabupaten				
			Tersajikannya data dan informasi pembangunan daerah yang terkini, akuntable dan reliable	50%	Program pengembangan data dan informasi pembangunan daerah	Bappeda &Litbang
			Tersajikannya hasil survei berguna untuk pengembangan program	50%	Program penelitian dan pengembangan	Bappeda &Litbang
			Adanya kesepahaman antar SKPD melihat potensi dan pengembangan sosial budaya	50%	Program perencanaan budaya dan pemerintah daerah	Bappeda &Litbang
			Adanya kesepahaman antar SKPD melihat potensi dan pengembangan ekonomi	50%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda &Litbang
			Adanya kesepahaman antar SKPD melihat potensi dan pengembangan fisik dan prasarana	50%	Program perencanaan tata ruang	Bappeda &Litbang
				50%	Program pengembangan perumahan	Bappeda &Litbang
				50%	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Bappeda &Litbang
	Meningkatkan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang	Tercapainya Peningkatan Kapasitas pelayanan Perizinan	Meningkatnya jumlah bangunan yang berijin	20%	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal
	<b>Prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal</b>					

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan melalui kelompok masyarakat, Koperasi dan UMKM.	Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan	Terbentuk dan berkembangnya Bumdes/ bumdes kerjasama	40%	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga nelayan dan kuatnya kelompok nelayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya		Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Tersedianya kawasan Budidaya		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap		Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jenis dan kuantitas produksi yang berhasil dipasarkan		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Kelompok masyarakat yang terorganisir	10%	Program pemberdayaan usaha masyarakat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Ragam Jenis dan kuantitas produksi yang berhasil dipasarkan		Program pengembangan pemasaran	Dinas Pariwisata
			Peningkatan jumlah kelompok nelayan yang kuat	10%	Program pengembangan kapasitas	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan kuatnya kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang mampu mengelola organisasi dengan baik	10%	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Dinas Pertanian

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
			jumlah dan jenis produk		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian
			jumlah kelompok tani yang kuat		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Pengembangan agribisnis peternakan	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Program pengembangan agribisnis pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian
			jumlah dan jenis produk		Program pengembangan sarana prasarana pertanian	Dinas Pertanian
			jumlah kelompok tani yang kuat	10%	Program peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Ketahanan Pangan
			jumlah kelompok yang kuat	10%	Program peningkatan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			jumlah dan jenis produk		Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan
		meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM		40%	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
				40%	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
	<b>Penuntasan Kemiskinan</b>					

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	Melakukan percepatan penuntasan kemiskinan dan desa tertinggal	menurunnya angka kemiskinan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KAT & PMKS Lainnya	60%	Program pemberdayaan fakir miskin. Kat & pmks lainnya	Dinas Sosial
			Terlaksananya Program Pelayanan & Rehabilitasi Sosial	60%	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
			Terlaksananya Program Pembinaan Anak Terlantar	60%	Program pembinaan anak terlantar	Dinas Sosial
			Terlaksananya Program Pembinaan Para penyandang Cacat Dan Trauma	60%	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinas Sosial
			Terlaksananya Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	60%	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan anak	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	50%	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Negeri	50%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
			Adanya pelatihan dan peningkatan aparatur desa	50%	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	50%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
			Meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan	50%	Program peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Anak
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Penurunan Angka pengangguran terbuka	5%	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					Program peningkatan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
					Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	<b>Prioritas Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan</b>					
	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, murah, dan mudah terjangkau	Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasara 9 tahun	SPM		Program pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar;			Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Dinas Pendidikan
					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Dinas Pendidikan
					Program pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Pendidikan
					Program pendidikan menengah	Dinas Pendidikan
					Program pengelolaan keragaman budaya	Dinas Pendidikan
					Program upaya pencegahan penyalagunaan narkoba	Dinas Pendidikan
					Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Dinas Pendidikan
					Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
					Program manajemen pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya budaya baca dan pentingnya arsip daerah		80%	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				80%	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
				80%	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	SPM		Program obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program pencegahan & penanggulangan penyakit	Dinas Kesehatan
					Program penyehatan lingkungan	Dinas Kesehatan
					Program upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
					Program standarisasi pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
					Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Dinas Kesehatan
					Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/paru/mata	Dinas Kesehatan
					Program standarisasi pelayanan kesehatan	RSUD
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
					Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	RSUD

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	Meningkatkan pelayanan dasar meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	Terdatanya jumlah jiwa penduduk secara tertib dan bertanggungjawab	persentase pendataan penduduk	100%	Program penataan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Meningkatnya partisipasi penduduk dalam keluarga berencana	jumlah peserta KB	40%	Program keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program kesehatan reproduksi remaja	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program pelayanan kontrasepsi	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Promosi kesehatan ibu bayi anak dan remaja melalui kegiatan masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program kkbpk lini lapangan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program pelayanan kb	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				60%	Program penyuluhan kb	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	<b>Prioritas Reformasi Birokrasi</b>					
	Meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan	Tercapainya Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	peningkatan investasi	75%	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah;	Tercapainya Peningkatan Kapasitas pelayanan Perizinan	Meningkatnya jumlah bangunan yang berijin	75%	Program peningkatan kapasitas pelayanan perizinan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal
	Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN.	terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah
		Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;	SPM	75%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sekretariat Daerah
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggung jawab dan akuntabel;	SPM	75%	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bagian Umum
		Terwujudnya perilaku aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik.	SPM	75%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bagian Umum
			SPM	75%	Program penyelenggaraan pemerintah daerah	Bagian Umum
			SPM	75%	Program pengembangan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah	Bagian Humas Dan Protokol
			SPM	75%	Program kerjasama informasi dengan media berita	Bagian Humas Dan Protokol
			SPM	75%	Program pelayanan kehumasan dan protokoler	Bagian Humas Dan Protokol
			SPM	75%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bagian Humas Dan Protokol
			SPM	75%	Program peningkatan pelayanan keagamaan	Bagian Kesra
			SPM	75%	Program peningkatan pendidikan	Bagian Kesra

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
			SPM	75%	Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Bagian Ortala
			SPM	75%	Program peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Bagian Ortala
			SPM	75%	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Bagian Ortala
			SPM	75%	Program penataan daerah otonom baru	Bagian Tata Pemerintahan
			SPM	75%	Program penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bagian Tata Pemerintahan
			SPM	75%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bagian Ekbang
			SPM	75%	Program peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah	Bagian Ekbang
			SPM	75%	Program layanan pengadaan barang/jasa	Bagian Ulp
			SPM	75%	Program kemitraan	Bagian Ulp
			SPM	75%	Program Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	
			SPM	75%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Inspektorat
			SPM	75%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	Inspektorat
			SPM	75%	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Inspektorat
			SPM	75%	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	Inspektorat
			SPM	75%	Program pendidikan kedinasan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
			SPM	75%	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
		Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah;	SPM	75%	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dinas Informasi Dan Komunikasi
			SPM	75%	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang informasi dan	Dinas Informasi Dan Komunikasi

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
					komunikasi	
			SPM	75%	Program kerjasama informasi dengan mas media	Dinas Informasi Dan Komunikasi
			SPM	75%	Program peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Informasi Dan Komunikasi
			SPM	75%	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dinas Informasi Dan Komunikasi
			SPM	75%	Program tata kelola persandian	Dinas Informasi Dan Komunikasi
	<b>Prioritas Revolusi Mental</b>					-
	Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku.	Terkendalnya pemeliharaan Kamratribmas dan tidak kriminal	Kecilnya angka kriminalitas		Program pemeliharaan kamratribmas dan pencegahan tindak kriminal.	Satpol Pp
				80%	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	Satpol Pp
				80%	Program pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Satpol Pp
		Meningkatnya sumber daya manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan daerah.		80%	Pemeliharaan kamratribmas dan pencegahan tindak kriminal	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		terwujudnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat		80%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				80%	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				80%	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				80%	Pendidikan politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	<b>Peningkatan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup</b>					
	Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.	Meningkatnya keindahan kota Bula	persentase sampah terkelola di Bula	60%	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran pembangunan	Indikator	Target	Program	Skpd Penanggungjawab
	meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	terkendalinya fungsi lingkungan hidup terhadap pembangunan	Ada data pemantauan dan pengendalian fungsi lingkungan hidup	80%	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				80%	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				80%	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup
				80%	Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				80%	Program perlindungan fungsi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				80%	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Lingkungan Hidup

## BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pada tahun anggaran 2018 diprediksikan total anggaran sebesar Rp.1,082,270,289,478,- terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.512,465,899,333,- meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung sebesar Rp.569,804,390,145,- meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tertuang didalam program dan kegiatan yang tersebar di masing-masing SKPD.

Selengkapnya mengenai rencana belanja langsung program dan kegiatan di SKPD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 (dalam .000)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>PENDIDIKAN</b>				<b>71,285,044</b>	<b>29,325,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1,102,000</b>		
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bula	100%	7,000		
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Aadanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Bula	100%	60,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor	Bula	100%	65,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor	Bula	100%	120,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bula	100%	100,000		
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam & Luar Daerah	Terciptanya Koordinasi yang baik di Dalam maupun luar Daerah	Bula	100%	750,000		
<b>Progran Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>			<b>4,685,000</b>	<b>3,125,000</b>	<b>2,600,000</b>
Pembangunan Gedung Kantor	Pembuatan Gedung Arsip Dinas Pendidikan Kab. SBT	Bula	100%	750,000		
Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dinas Pendidikan	Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan	10 Kecamatan	100%	1,125,000	1,625,000	2,600,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penambahan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua	Bula	100%	650,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penambahan Peralatan Gedung Kantor	Bula	100%	150,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penambahan Peralatan Gedung Kantor	Bula	100%	100,000		
Pengadaan Mebelair Sekolah	Penyediaan Mebelair Sekolah	Bula	100%	1,500,000	1,500,000	
Pengadaan Mebelair Kantor	Penyediaan Mebelair Kantor	Bula	100%	200,000		
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor aman dan Nyaman	Bula	100%	35,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional	Bula	100%	25,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional	Bula	100%	25,000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Kantor	Bula	100%	125,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Keahlian Aparatur Pemerintahan</b>			<b>3,200,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Mutu Pegawai	Bula	100%	150,000		
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Diketahui dan di pahami Juknis DAK 2018	Bula	100%	400,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Diketahui dan di pahami Juknis Pengelola data guru	Bula	100%	150,000		
Peningkatan Manajemen Implementasi Data Pegawai	Terlaksananya Data Kepegawaian PTK	Luar dan Dalam daerah	100%	500,000		
Program penyetaraan kualifikasi S1		Luar Daerah	100%	2,000,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Bula		<b>55,000</b>		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		Bula	100%	15,000		
Penyusunan Laporan Keuangan Semester		Bula	100%	10,000		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Bula	100%	15,000		
Penyusunan Renstra dan RKA SKPD		Bula	100%	15,000		
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				<b>3,212,000</b>	<b>1,000,000</b>	
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		Bula	100%	200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		Bula	100%	200,000		
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anaka Usia Dini		Bula	100%	250,000		
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini		Bula	100%	1,662,000		
Pemberian Bantuan Operasional TK		Bula	100%	150,000		
Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK, dan audio interaktif TK		Bula	100%	750,000		
Pembangunan Gedung TK/PAUD					1,000,000	
<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>				<b>2,100,000</b>		
Pendataan Potensi Kepemudaan		Bula	100%	100,000		
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda		Bula	100%	350,000		
Penelitian dan Pengkajian kebijakan - kebijakan pembangunan kepemudaan		Bula	100%	250,000		
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan berbasis E-YOUTH		Bula	100%	200,000		
Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan		Bula	100%	200,000		
Penyusunan pedoman komunikasi, informasi edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda		Bula	100%	250,000		
Penyusunan Rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat		Bula	100%	200,000		
Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan		Bula	100%	250,000		
Perumusan Kebijakan kewirausaahn bagi pemuda		Bula	100%	300,000		
<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>				<b>21,826,914</b>	<b>23,000,000</b>	
Pembangunan Gedung Sekolah		Tersebar	100%	2,500,000	2,500,000	
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir (Pagar Sekolah)		Tersebar	100%	3,000,000	15,000,000	
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah		15 Kec	100%	800,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		15 Kec	100%	2,000,000	2,000,000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Bula - Ambon	100%	500,000		
Pelatihan K13		Bula	100%	1,000,000		
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi		Bula	100%	700,000		
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar		Bula	100%	976,914		
Bantuan Operasional Sekolah Daerah SD/SMP		Bula	100%	10,000,000		
Penyelenggara Akreditasi Sekolah Dasar		Bula	100%	350,000		
Pembangunan Pagar SD/SMP		15 Kec			2,000,000	
Pembangunan Laboratorium SMP		Bula			1,500,000	
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				<b>4,785,000</b>	<b>800,000</b>	
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		Bula	100%	800,000		
Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno		Bula	100%	250,000		
Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan Budaya Lokal Daerah		Bula	100%	300,000		
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah		Bula	100%	300,000		
Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah		Bula	100%	200,000		
Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka		Bula	100%	150,000		
Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala		Bula	100%	175,000		
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program pengelolaan kekayaan budaya		Bula	100%	300,000		
Pendukung pengelolaan musem dan taman budaya di daerah		Bula	100%	150,000		
pengelolaan karya cetak dan karya rekam		Bula	100%	200,000		
Pengembangan Database sistem informasi sejarah purbakala		Bula	100%	260,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Swasta		Bula	100%	250,000		
Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi		Bula	100%	500,000		
Fasilitasi penyusunan RKS dan RKAS		Bula	100%	950,000		
Pembangunan Gedung Seminar Budaya Lokal		Bula			800,000	
<b>Program Pendidikan Menengah</b>				<b>15,554,130</b>		
Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera		Bula	100%	554,130		
Pembinaan Minat Bakat Guru Kontrak		Bula	100%	15,000,000		
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				<b>3,525,000</b>		
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		Bula	100%	250,000		
Penyusunan Sistem Informasi database bidang kebudayaan		Bula	100%	75,000		
Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan		Bula	100%	400,000		
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Bula	100%	300,000		
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Kabupaten	100%	2,500,000		
<b>Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba</b>				<b>150,000</b>		
Pemberian Penyuluhan Tentang Budaya		Bula	100%	150,000		
<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>				<b>3,600,000</b>	<b>1,400,000</b>	
Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga		Bula	100%	250,000		
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat		Bula	100%	150,000		
Pembinaan Cabang Olah Raga Potensi di Tingkat Daerah		Bula	100%	200,000		
Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlit, Pelatih dan Teknis Olah Raga		Bula	100%	300,000		
Pelatihan Tenaga Keolah Ragahan		Bula	100%	800,000		
Seleksi Olimpiade Olah Raga Pelajar Nasional (O2SN)		Luar dan Dalam daerah	100%	600,000		
Pendampingan Pelaksanaan HAORNAS		Luar dan Dalam daerah	100%	200,000		
Penyelenggaraan Hari Olah Raga Nasional		Luar dan Dalam daerah	100%	350,000		
Pembangunan Gedung Pramuka		Bula	100%	750,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Lapangan Olah Raga Futsal					700,000	
Pembangunan Lapangan Olah Raga Basket					700,000	
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				<b>5,940,000</b>		
Pelaksanaan Sertifikasi		Bula	100%	250,000		
Pelaksanaan uji Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan		Bula	100%	500,000		
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi		Luar Daerah	100%	350,000		
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)		Bula	100%	500,000		
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPP-G)		Bula	100%	450,000		
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi		Luar Daerah	100%	640,000		
Pengembangan Mutu dan Kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		Bula		650,000		
Peningkatan Kinerja Pengawas Pendidikan		Luar dan Dalam daerah	100%	1,500,000		
Sosialisasi Angka Kredit		Bula	100%	600,000		
Penyelenggaraan Kepramukaan		15 Kec	100%	500,000		
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>				<b>1,550,000</b>		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Luar dan Dalam daerah	100%	950,000		
Penyediaan Soal Ujian Nasional Akhir Sekolah/Nasional		Bula	100%	600,000		
<b>Kesehatan</b>				<b>17,003,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>133,439,350</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>2,755,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	25,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	300,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan produktivitas kerja	Tersebar	100%	850,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	150,000		
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Peningkatan produktivitas	Bula	100%	30,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
	kerja					
Penyediaan ATK	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	150,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	150,000		
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar Daerah	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	800,000		
Penyediaan Jasa pemelihara dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	50,000		
Pengadaan Komputer dan Meubeler Kantor Dinas Kesehatan	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	250,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>575,000</b>		<b>14,600,000</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala	Bula	100%	150,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (suku cadang)	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%	75,000		
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Jakarta Baru	Terlaksananya rehab beratrumah dinas dokter	Jakarta Baru	100%			570,000
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Waru	Terlaksananya rehab berat rumah dinas dokter	Waru	100%			570,000
Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Jakarta Baru	Terlaksananya pembanguna mess paramedis	Jakarta Baru	100%			570,000
Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Afang	Terlaksananya pembanguna mess paramedis	Afang	100%			670,000
Rehab. Berat Mess paramedis Puskesmas Atiahu	Terlaksananya pembanguna mess paramedis	Atiahu	100%			670,000
Rehab. Berat Mess paramedis Puskesmas Miran	Terlaksananya pembanguna mess paramedis	Miran	100%			670,000
Rehab. Berat Mess paramedis Puskesmas Werinama	Terlaksananya pembanguna mess paramedis	Werinama	100%			670,000
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Spesialis Rumah Sakit Bula (4 UT)	Peningkatan produktivitas kerja	Bula	100%			2,250,000
Rehab berat Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kataloka	Terlaksananya rehab berat rumah dinas dokter	Kataloka	100%			570,000
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Batuasa	Terlaksananya pembanguna rumah dinas dokter	Batuasa	100%			570,000
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teor	Terlaksananya rehab berat rumah dinas dokter	Teor	100%			570,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Pratama P Gorom	Terlaksananya rehab berat rumah dinas dokter	Pulau Gorom	100%			2,500,000
Pembangunan Mess Paramedis Rumah Sakit Pratama P Gorom	Peningkatan produktivitas kerja	Pulau Gorom	100%			2,500,000
Pojok asap rokok	Terlaksananya pembanguna pojok asap rokok	Dinkes	100%	250,000		
Pengadaan Kendaraan operasional Roda Dua (Motor) bagi petugas	Tersedianya kendaraan operasional	Tersebar	100%	100,000		1,250,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>1,190,000</b>	<b>600,000</b>	
Pendidikan dan pelatihan Formal	meningkatkan kinerja	Bula	100%	500,000		
Bimtek Kepegawaian dan Keuangan	meningkatkan kinerja	Tersebar	100%	175,000		
Pelatihan Manajemen Puskesmas di Kabupaten	meningkatkan kinerja	Tersebar	100%	130,000	150,000	
monitoring dan evaluasi management pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu	meningkatkan kinerja	Tersebar	100%	150,000	150,000	
Pelatihan penyusunan sasaran kerja pegawai	meningkatkan kinerja	Tersebar	100%	160,000	150,000	
Peningkatan kapasitas pengelola SP2TP puskesmas	meningkatkan kinerja	Tersebar	100%	75,000	150,000	
<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>				<b>2,150,000</b>		<b>4,400,000</b>
Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan	Tersebar	100%	1,400,000		2,700,000
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan	meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan	Tersebar	100%	200,000		
Peningkatan Mutu Pelayanan farmasi Gudang Farmasi	meningkatkan pengelolaan obat	Tersebar	100%	100,000		
Operasional instalasi farmasi	meningkatkan kualitas pelayanan	Tersebar	100%	200,000		
Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Peningkatkan kualitas pelayanan	Tersebar	100%	250,000		1,700,000
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				<b>875,000</b>	<b>185,000</b>	
Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	meningkatkan promosi & informasi sadar ber-PHBS	Tersebar	100%	100,000	100,000	
Penyuluhan PHBS	meningkatkan cakupan RT ber-PHBS	Tersebar	70%	150,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pelatihan Dokter kecil dan Guru UKS	Meningkatkan promosi kesehatan & pemberdayaan anak sekolah	Tersebar	100%	85,000		
Pengembangan, Penggerakan dan Pemberdayaan Pamong Sakabhaktihususada	Meningkatkan promosi kesehatan & pemberdayaan anak sekolah	Tersebar	100%	100,000	85,000	
Pengembangan Desa ber PHBS Percontohan	meningkatkan cakupan RT ber-PHBS	Elnusa Pulau Goa	100%	240,000		
Penyuluhan dan promosi kesehatan dampak/bahaya rokok	menurunkan prevalensi perokok pada usia ≤ 18 tahun	Tersebar	5,6%	200,000		
<b>PROGRAM PENCEGAHAN &amp; PENANGGULANGAN PENYAKIT</b>				<b>1,381,000</b>	<b>460,000</b>	<b>155,000</b>
Indoor Residual Spraying sarang nyamuk	meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk	Tersebar	100% tercapai	100,000	90,000	
Peningkatan Imunisasi	meningkatkan cakupan imunisasi dasar	Tersebar	tercapainya cakupan imunisasi dasar 95%	85,000		
Penyelidikan Epidemiologi, Penanggulangan KLB dan bencana	meningkatkan penanggulangan KLB penyakit dan bencana	Tersebar	100% tercapai	200,000		
Penanggulangan TB	penemuan dan pengobatan TB	Tersebar	cakupan penemuan 75% pengobatan 100%	80,000		
Penyuluhan dan Penanggulangan HIV/AIDS	pengecanaan/penanggulangan HIV/AIDS	Bula	100% tercapai	50,000	90,000	
Pelacakan dan Intensifikasi Pengendalian Kusta	meningkatkan penemuan penderita kusta	Tersebar	Prevalensi penderita kusta	85,000	80,000	
Pengadaan Alat Semprot (Sprycan)	tersedianya alat semprot (Sprycan)	Tersebar	100% tercapai	146,000		155,000
Sosialisasi Perda No 3 tahun 2014 tentang KTR	Meningkatkan informasi	Tersebar	100% tercapai	100,000	100,000	
Pelatihan PTM Bagi Petugas Puskesmas	Meningkatkan kinerja petugas	Tersebar	100% tercapai	85,000	100,000	
Pembentukan dan Pelaksanaan Posbindu PTM Kantor dinas kesehatan	Meningkatnya upaya pencegahan PTM	Bula	100% tercapai	450,000		
<b>PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>				<b>615,000</b>	<b>75,000</b>	
Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi Puskesmas (Sanitasi Pangan)	meningkatkan kapasitas petugas kesling	Tersebar	100% tercapai	95,000		
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Industri rumah tangga	meningkatkan produk industri rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan menjadi	Tersebar	85% tercapai	100,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengawasan dan Pemeriksaan Air Bersih	meningkatkan persentase keluarga menggunakan air bersih	Tersebar	74% tercapai	120,000	75,000	
Pedampingan Penyusunan Rencana Pemicuan STBM	meningkatkan cakupan rumah sanitasi dasar yang memenuhi	Tersebar	cakupan sanitasi dasar 81,4% tercapai	150,000		
Monitoing dan evaluasi Pelaporan Kesling	Meningkatnya pelaporan kesehatan lingkungan	Tersebar	100% tercapai	150,000		
<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>13,652,000</b>	<b>280,000</b>	<b>17,929,350</b>
Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan masalah gizi	meningkatkan penanganan masalah gizi	Tersebar	100% balita gizi buruk mendapat penanganan	150,000		
Survey Gizi Kurang dan Buruk	persentase gizi buruk ditemukan	Tersebar	meningkatkan persentase gizi buruk dan kurang	200,000		
Penanggulangan KEK pada ibu Hamil	menurunkan prevalensi ibu hamil dengan KEK	Tersebar	38% tercapai	350,000		
Pengawasan makanan jajanan anak sekolah	meningkatkan makanan jajanan anak sekolah memenuhi persyaratan kesehatan	Tersebar	70% tercapai	100,000		
Pegobatan Masal gratis	meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Tersebar	100% tercapai	250,000		
Sunatan Masal gratis	meningkatkan cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin	Tersebar	100% tercapai	250,000		
Manajemen Terpadu Balita Sakit	meningkatkan penanganan balita sakit	Tersebar	menurunya AK balita 1,04 (per 1000 KH)	100,000	80,000	
Perbaikan Gizi buruk/kurang pada anak/balita	meningkatkan cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	Tersebar	100% tercapai	650,000		
Survey dan Pemberian kapsul vitamin A	meningkatkan cakupan Vit-A pada balita	Tersebar	menigkatnya cakupan Vit-A menjadi 85%	550,000	100,000	
Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Tersebar	100% tercapai			4,200,000
Pelatihan management JKN pada FKTP	meningkatkan kualitas manajemen JKN pada FKTP	Tersebar	100% tercapai	100,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rekrutmen Tenaga PTT paramedis dan kesehatan lainnya	terpenuhinya kebutuhan petugas paramedis dan kesehatan lainnya	Tersebar	95% tercapai	5,802,000		
Rekrutmen Dokter & Dokter gigi PTT	meningkatkan rasio dokter dan dokter gigi	Tersebar	tercapainya Rasio dr umum 35/100.000 penduduk & dr gigi 11/100,000 penduduk	3,240,000		
Penyuluhan dampak sex bebas	meningkatkan pengetahuan siswa terhadap dampak sex bebas	Tersebar	menurunya AKI, AKB dan penyakit menular seksual	150,000		
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya bantuan operasional (BOK) masyarakat	Tersebar	100% tercapai			13,729,350
Managemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat pusat gugus	meningkatkan penanganan balita sakit	Tersebar	menurunya AK balita 1,04 (per 1000 KH)	350,000	100,000	
Operasional Puskesmas Pembantu	meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat masyarakat	59 Pustu	100% tercapai	885,000		
Operasional Puskesmas rawat jalan	meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat jalan	14 Puskesmas	100% tercapai	525,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>				<b>1,837,000</b>		<b>2,000,000</b>
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil Kurang Mampu	meningkatkan pengetahuan dan informasi kesehatan	Tersebar	70% tercapai	375,000		
Pelatihan ANC terintegrasi	meningkatkan integrasi program tentang ANC	Bula	ANC (K4) 95% tercapai	150,000		
Pegadaan alat SHC	tersedianya alat deteksi dini masalah kesehatan pada bayi usia < 30 hari	Bula	100% tercapai	30,000		
Peningkatan kegiatan SHC	Meningkatkan kegiatan SHC	Bula	100 tercapai	260,000		
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	tersedianya jaminan persalinan	Tersebar	ibu melahirkan mendapatkan jaminan persalinan			2,000,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Sosialisasi dan Advokasi penggunaan Rumah Tunggu Kelahiran	Meningkatkan informasi dan advokasi tentang penggunaan rumah tunggu kelahiran	Tersebar	meningkatkan penggunaan rumah tunggu kelahiran bagi ibu risti	525,000		
Monitoring KIA dan Gizi	meningkatkan pengawasan kesehatan Ibu dan Anak	Tersebar	100% tercapai	120,000		
Operasional rumah tunggu	meningkatkan pelayanan ibu melahirkan dengan risti di rumah tunggu	Tersebar	90% tercapai	377,000		
<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>				<b>1,140,000</b>		
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	meningkatkan Standar Pelayanan	Tersebar	100% tercapai	175,000		
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan	meningkatkan Standar Pelayanan	Bula	100% tercapai	450,000		
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	meningkatkan Standar Pelayanan	Bula	100% tercapai	140,000		
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	meningkatkan Standar Pelayanan	Tersebar	100% tercapai	170,000		
Penyusunan Lkip	meningkatkan Standar Pelayanan	Bula	100% tercapai	30,000		
Bimtek management Standar pelayanan kesehatan	meningkatkan management Standar Pelayanan	Bula	80% tercapai	175,000		
<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>				<b>240,000</b>		
Pendidikan dan pelatihan petugas kesehatan lansia	Menigkatnya management kesehatan lansia	Bula	100% tercapai	120,000		
Olah Raga lansia	Menigkatkan upaya kesehatan lansia	Bula	100% tercapai	120,000		
<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANYA</b>				<b>4,245,000</b>		<b>52,955,000</b>
Pengadaan Alkes Puskesmas dan Pustu	Tersedianya alkes pada Puskesmas dan Pustu	Tersebar	80 % tercapai	500,000		7,000,000
Pengadaan Bidan Kit	meningkatkan ketersediaan paket bidan kit per desa	Tersebar	100% tercapai	125,000		
Distribusi dan Pemerataan Alkes	Meningkatkan distribusi alkes	Tersebar	100% tercapai	350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Puskesmas Pembantu Tunsai	tersedianya Pustu Tunsai	Tunsai	100% tercapai			550,000
Pembangunan Puskesmas Pembantu Abuleta	tersedianya Pustu abuleta	Abuleta	100% tercapai			550,000
Pembangunan Puskesmas Pembantu Balakeu	tersedianya Pustu Balakeu	Balakeu	100% tercapai			550,000
Pembangunan Puskesmas Pembantu Kufar	tersedianya Pustu Kufar	Kufar	100% tercapai			550,000
Pembangunan Puskesmas Pembantu Lahema	tersedianya Pustu Lahema	Lahema	100% tercapai			550,000
Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Polin	Penambahan ruangan puskesmas polin	Polin	100% tercapai			570,000
Pembangunan Gudang Farmasi Puskesmas Batuasa	Tersedianya gudang farmasi puskesmas Batuasa	Batuasa	100% tercapai			800,000
Pembangunan Rumah Tunggu 21 Puskesmas	tersedianya rumah tunggu	Tersebar	100% tercapai	750,000		7,125,000
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Werinama	Tersedianya Laboratorium puskesmas Werinama	Werinama	100% tercapai			750,000
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Waru	Tersedianya Laboratorium Puskesmas Waru	Waru	100% tercapai			750,000
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Banggoi	Tersedianya Laboratorium puskesmas Banggoi	Banggoi	100% tercapai			750,000
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Geser	Tersedianya Laboratorium puskesmas Geser	Geser	100% tercapai			750,000
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Miran	Tersedianya Laboratorium puskesmas Miran	Miran	100% tercapai			750,000
Rehabilitasi Berat Rawat Inap Puskesmas Banggoi	Terlaksananya rehab berat rawat inap puskesmas banggoi	Banggoi	100% tercapai			850,000
Peningkatan Puskesmas Miran Menjadi Puskesmas Rawat Inap	meningkatnya kualitas pelayanan	Miran	100% tercapai			850,000
Peningkatan Puskesmas Teor Menjadi Puskesmas Rawat Inap	Terlaksananya peningkatan rawat inap	Teor	100% tercapai			850,000
Peningkatan Puskesmas pembantu Utta Menjadi Puskesmas	Terlaksananya peningkatan rawat inap	Utta	100% tercapai			650,000
Peningkatan Puskesmas Atiahu Menjadi Puskesmas Rawat Inap	Terlaksananya peningkatan rawat inap	Atiahu	100% tercapai			850,000
Pembangunan POSKESDES (10 UT)	Terlaksananya pembangunan poskesdes	Tersebar	100% tercapai			4,500,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Pustu Ruku - Ruku	Terlaksananya pembangunan Pustu	Ruku - Ruku	100% tercapai			570,000
Rehab.Ringan Pustu Bula Air	Terlaksananya pembangunan Pustu Pustu Bula Air	Bula Air	100% tercapai	200,000		
Pembangunan Pustu Tuha	Terlaksananya pembangunan Pustu	Tuha	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Tunas Ilur	Terlaksananya pembangunan Pustu	Tunas Ilur	100% tercapai			570,000
Rehab. Berat Pustu Namalen	Terlaksananya rehab berat Pustu	Namalen	100% tercapai			500,000
Rehab. Berat Pustu Gusalaut	Terlaksananya rehab berat Pustu	Gusalaut	100% tercapai			500,000
Rehab. Ringan Pustu Waimatakabu	Terlaksananya rehab ringan pustu	Waimatakabo	100% tercapai	200,000		
Pembangunan Pustu Amarlaut	Terlaksananya pembangunan Pustu	Amarlaut	100% tercapai			585,000
Pembangunan Labororium Puskesmas Kilmuri	Terlaksananya pembangunan Labororium	Kilmuri	100% tercapai			850,000
Pembangunan Labororium Puskesmas Afang	Terlaksananya pembangunan Labororium pelayanan	Afang	100% tercapai			830,000
Pembangunan Gudang Farmasi Puskesmas Geser	Terlaksananya pembanguna gudang farmasi	Geser	100% tercapai			750,000
Pembangunan Gudang Farmasi Puskesmas Atiahu	Terlaksananya pembanguna gudang farmasi	Atiahu	100% tercapai			750,000
Pembangunan Pustu Iliili	terlaksananya pembangunan Pustu	Iliili	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Guli-guli	terlaksananya pembangunan Pustu	Guli-guli	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Romeon	terlaksananya pembangunan Pustu	Rumeon	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Solan	terlaksananya pembangunan Pustu	Solan	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Akibobo	terlaksananya pembangunan Pustu	Akibobo	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Wumin	terlaksananya pembangunan Pustu	Wumin	100% tercapai			650,000
Pembangunan Pustu Kelangan	terlaksananya pembangunan Pustu	Kelangan	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Argam	terlaksananya pembangunan Pustu	Argam	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pustu Ketta Rumadan	terlaksananya pembangunan Pustu	Ketta Rumadan	100% tercapai			570,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Pustu Rumoga	terlaksananya pembangunan Pustu	Rumoga	100% tercapai			570,000
Pembangunan Pagar puskesmas Kataloka	terlaksananya pembangunan pagar	Kataloka	100% tercapai	270,000		
Pembangunan Pagar Dinas Kesehatan	terlaksananya pembangunan pagar	Bula	100% tercapai			850,000
Penambahan Ruangan kantor dinas Kesehatan	Terlaksananya penambahan bangunan kantor dinas kesehatan	Bula	100% tercapai			2,500,000
Pembangunan Pustu Lapela	terlaksananya pembangunan Pustu	Lapela	100% tercapai			570,000
Rehab. Berat Pustu Garogos	Terlaksananya rehab berat Pustu	Garogos	100% tercapai			500,000
Rehab. Berat Pustu Mida	Terlaksananya rehab berat Pustu	Mida	100% tercapai			500,000
Rehab. Berat Pustu Amarwatu	Terlaksananya rehab berat Pustu	Amarwatu	100% tercapai			500,000
Pengadaan Pusling Darat Double Gardan	Tersedianya pusling darat	Tersebar	100% tercapai			1,530,000
Pengadaan Pusling Air/Laut	tersedianya pusling air/laut	Tersebar	100% tercapai			2,375,000
Pengadaan Sarana Posyandu	Tersedianya sarana posyandu	Tersebar	100% tercapai	750,000		
Pengadaan Meubeler Puskesmas/ Puskesmas pembantu	Peningkatan kualitas pelayanan	Tersebar	100% tercapai	1,100,000		
Pembangunan Laboratorium Puskesmas Polin	terlaksananya pembangunan Laboratorium	Polin	100% tercapai			830,000
<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/PARU/MATA</b>						<b>41,400,000</b>
Pembangunan Drainase RS Pratama	Terlaksana dan tersedianya pada rumah sakit pratama	Gorom - Werinama	100% tercapai			1,850,000
Pembangunan Pagar Rumah Sakit Pratama Pulau Gorom		Gorom	100% tercapai			850,000
Pembangunan dan pengadaan oksigen sentral	Terlaksana dan tersedianya oksgen central	Bula	100% tercapai			3,700,000
Pembangunan Paket RS Pratama Werinama	Terlaksananya pembangunan paket RS pratama	Werinama	100% tercapai			35,000,000
<b>RSUD</b>				<b>17,130,029</b>		<b>11,000,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2,575,029</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Optimalnya Pelaksanaan Surat Menyurat	RSUD Bula	100 % Tercapai	6,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet, Air & Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Komunikasi (Telepon & Internet), Air dan Listrik	RSUD Bula	100 % Tercapai	450,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	RSUD Bula	100 % Tercapai	598,201		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kebutuhan ATK	RSUD Bula	100 % Tercapai	113,764		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	RSUD Bula	100 % Tercapai	120,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Bula	100 % Tercapai	60,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makan dan Minum Pasien	RSUD Bula	100 % Tercapai	677,064		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	RSUD Bula	100 % Tercapai	550,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1,825,000</b>		
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Rumah Jabatan/Dinas dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	RSUD Bula	100 % Tercapai	200,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % Tercapai	295,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	RSUD Bula	100%Tercapai	165,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	RSUD Bula	100%Tercapai	190,000		
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit	RSUD Bula	100%Tercapai	195,000		
Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Tersedianya Alat-Alat Komunikasi	RSUD Bula	100% Tercapai	190,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Dokter	RSUD Bula	100 % Tercapai	195,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	RSUD Bula	100 % Tercapai	200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	RSUD Bula	100 % Tercapai	195,000		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>150,000</b>		
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai RS	RSUD Bula	100 % Tercapai	150,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>950,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Aparatur	RSUD Bula	100 % Tercapai	450,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Aparatur	RSUD Bula	80 % Tercapai	500,000		
<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				500,000		
Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan / Sistim Informasi dan Manajemen Rumah Sakit	Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan (Sistim Informasi Rumah Sakit)	RSUD Bula	100% Tercapai	500,000		
<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>				<b>5,450,000</b>		<b>11,000,000</b>
Pembangunan Gudang Obat/Apotik ( DAK )	Tersedianya Gedung Apotik Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % Tercapai	150,000		1,800,000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit ( DAK )	Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % Tercapai	250,000		6,300,000
Pengadaan Obat-Obatan RS	Tersedianya Obat-Obatan RS	RSUD Bula	100 % Tercapai	3,000,000		
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah ( DAK )	Tersedianya Ambulance/Mobil Jenazah	RSUD Bula	100 % Tercapai	150,000		1,100,000
Pengembangan Tipe Rumah Sakit (Akreditasi RS)	Tercapainya Pengembangan Tipe Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % Tercapai	400,000		
Pembangunan Selasar Rumah Sakit	Adanya Selasar Penghubung Antar Ruang Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % tercapai	500,000		
Pembangunan Instalasi IPSRS Rumah Sakit ( DAK )	Adanya Instalasi IPSRS Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % tercapai	150,000		1,800,000
Pembangunan Fasilitas Parkir & Taman Rumah Sakit	Tersedianya Taman Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % tercapai	350,000		
Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Sakit	Tersedianya Instalasi Terpadu Air Bersih Rumah Sakit	RSUD Bula	100 % tercapai	500,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>				<b>680,000</b>		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang VIP	RSUD Bula	80 % Tercapai	180,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan	Terawatnya Alat-Alat Kesehatan	RSUD Bula	80 % Tercapai	500,000		
<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>				<b>5,000,000</b>		
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	RSUD Bula	100% Tercapai	3,000,000		
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Tersedianya Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	RSUD Bula	100% Tercapai	2,000,000		
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>				<b>166,225,000</b>	<b>154,050,000</b>	<b>199,247,650</b>
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
Pembangunan Jalan					<b>20,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
Pembangunan Jalan Kilmuri Afang Ruas Jalan Kota Baru - Air Nanang.		Kec. Kilmuri	1 Paket		20,000,000	
Pembangunan Jalan Hotmix Werinama - Banggoi (DAK)		Kec. Werinama - Bula Barat	1 Paket			20,000,000
Pembangunan Jalan Hotmix Kota Bula (DAK)		Kec. Bula	1 Paket			20,000,000
<b>Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan</b>				<b>6,275,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>15,000,000</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Werinama - Banggoi STA 40+000 s/d 55 + 000		Kec. Werinama	15 KM	5,825,000		
Rehab/ Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kota Bula (Swakelola)		Kec. Bula	1 Paket	450,000		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Werinama - Kota Baru					20,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Air Nanang - Kota Baru					20,000,000	
Rehab/ Pemeliharaan Ruas Jalan Bula Kufar (DAK)		Kec. Bula Timur	1 Paket			10,000,000
Pemeliharaan Jalan (Pekeejaan Bronjong) Ruas Jalan Werinama -		Kec. Werinama	1 Paket			5,000,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Banggoi (DAK)						
<b>Pembangunan Jembatan</b>				<b>54,325,000</b>		<b>73,250,000</b>
Pembangunan Jembatan Salagor Kota (Lanjutan)		Kecamatan Lianfitu	15 M	1,500,000		
Pembangunan Jembatan Way Kampung Baru (DAK)		Teluk Waru	15 M			3,500,000
Pembangunan jembatan penghubung		Desa rarat	30 M	600,000		
Pembangunan Jembatan Way Kola Lanjutan		Kec. Bula	100	5,000,000		
Pembangunan Jembatan Way Lutin		Kec. Werinama	8 M	1,200,000		
Pembangunan Jembatan Way Kampung Baru		Teluk Waru	15 M	3,500,000		
Pembangunan Jembatan Nilayawan Lanjutan		Kec. Werinama	50 M	2,500,000		
Pembangunan Jembatan Wai Beli Tahap 4		Kec. Bula	50	6,000,000		
Pembangunan Jembatan Way Balifar Lanjutan		Kec. Bula	100 M	1,200,000		
Pembangunan Jembatan Beton Way Air Kabur-Kabur		Kecamatan Bula	15 Meter	2,575,000		
Pembangunan Jembatan wai Suru atas (lanjutan)		Lian Fitu	35 M	6,000,000		
Pembangunan Jembatan wai Soer (DAK)		Lian Fitu	15 M			3,500,000
Pembangunan Jembatan wai Sirit 2 (DAK)		Lian Fitu	25 M			6,250,000
Pembangunan Jembatan Way Kwaos 2 (DAK)		Lian Fitu	40 Meter			10,000,000
Pembangunan Jembatan Way Masa Cs (DAK)		Lian Fitu	1 Paket			3,750,000
Pembangunan Jembatan Way Birit (DAK)		Lian Fitu	20 M			5,000,000
Pembangunan Jembatan Way Baas (DAK)		Kec. Gorom Timur	15 M			3,750,000
Pembangunan Jembatan Way Sam (DAK)		Kec. Werinama	50 M			12,500,000
Pembangunan Jembatan Way Air Kay (DAK)		Kec. Kian Darat	60 Meter			15,000,000
Pembangunan Jembatan Way Angar (DAK)		Kec. Kian Darat	40 Meter			10,000,000
Pembangunan Jembatan wai Sirit 2		Lian Fitu	25 M	6,250,000		
Pembangunan Jembatan wai Kwaos 1		Lian Fitu	10 M	1,500,000		
Pembangunan Jembatan wai Kwaos 2		Lian Fitu	40 Meter	8,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan Jembatan Way Masa Cs		Lian Fitu	1 Paket	3,750,000		
Pembangunan Jembatan Way Birit		Lian Fitu	20 M	2,750,000		
Pembangunan Jembatan Way Kian (Lanjutan)		Kec. Kian Darat	100 Meter	2,000,000		
<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>						
<b>Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan</b>				<b>3,000,000</b>		
Rehabilitasi Jembatan Pelopor Ruas Jalan Lingkar Pulau Gorom		P. Gorom	20 M	1,000,000		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Way Dawang Cs		Kec. Bula	1 Paket	2,000,000		
<b>Peningkatan Jalan</b>				<b>14,500,000</b>		<b>14,500,000</b>
<b>Pembangunan Jalan Lingkar Kesui</b>		Wakate	10 Km	10,000,000		
Peningkatan Jalan Lapen Batuasa - Waikudal		Kecamatan Werinama	3 Km	4,500,000		
Peningkatan Jalan Kufar Pantai		Kecamatan Tutuk Tolu	3 Km			3,000,000
Peningkatan Jalan Lapen Ruas Jembatan Basa - Rukun Jaya		Kec. Bula Barat	1 Paket			5,500,000
Peningkatan Jalan Lapen Sumber Agung		Kec. Bula Barat	1 Paket			4,000,000
Peningkatan Jalan Lapen Bula Air		Kec. Bula Barat	1 Paket			2,000,000
<b>Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan</b>				<b>6,275,000</b>		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Werinama - Banggoi STA 40+000 s/d 55 + 000		Kec. Werinama	15 KM	5,825,000		
Rehab/ Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kota Bula (Swakelola)		Kec. Bula	1 Paket	450,000		
<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>				<b>10,650,000</b>		
Pembangunan Gorong-gorong Ruas Jalan Werinama - Banggoi STA 30+000 s/d 40+000		Kec. Werinama	1 Paket	2,500,000		
Pembangunan Drainase dalam Kota Bula, Cs		Kec. Bula	1 Paket	1,000,000		
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pulau Gorom		Kec. P. Gorom	3 KM	3,300,000		
DED/Master Plant Saluran Drainase Kecamatan Gorom Timur		Kec. P. Gorom Timur	1 Paket	450,000		
DED/Master Plant Saluran Drainase Kecamatan Lian Fitu		Kec. P. Gorom Timur	1 Paket	450,000		
Pembangunan Saluran Drainase Dalam Kota		Kec.Bula	1 Paket		5,000,000	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Bula						
Pembangunan Saluran Drainase Kec. Kian Darat		Kec.Kian Darat	1 Paket		3,000,000	
DED/Master Plant Saluran Drainase Kecamatan Teor		Kec. P. Teor	1 Paket	450,000		
DED/Master Plant Saluran Drainase Kecamatan Kilmury		Kec. Kilmury	1 Paket	450,000		
DED/Master Plant Saluran Drainase Kecamatan Teluk Waru		Kec. P. Gorom	1 Paket	450,000		
Pembangunan Saluran Drainase Desa Guli - Guli		Kec.Seram Timur	1 Pkt	600,000		
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Siwalalat ( Lanjutan )		Kec. Siwalalat	1 Pkt	800,000		
Pembangunan Gorong-gorong Vesan Desa Karay		Kec. Teluk Waru	1 Pkt	200,000		
<b>Pembangunan Gedung Kantor</b>				<b>3,500,000</b>		
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR		Kec. Bula	1 Pkt	2,000,000		
Pembangunan Pagar SMU Negeri. 1 Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	1 Pkt	400,000		
Pembangunan Pagar SMP Negeri. 2 Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	1 Pkt	400,000		
Rehab Gedung SMU Negeri 1 Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	1 Pkt	500,000		
Penimbunan Halaman Kantor UPTD Pendidikan Bula		Kec. Bula	1 Pkt	200,000		
Pembangunan Pagar Sekolah PAUD		Negeri Kataloka	1 Pkt	300,000		
Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri 1		Negeri Kataloka	1 Pkt	325,000		
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Pulau Gorom		Kec P Gorom	1 Pkt	350,000		
<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong</b>						
<b>Pembangunan Turap/Talud/Brojong</b>				<b>34,000,000</b>	<b>47,800,000</b>	
Normalisasi bronjong Sungai Abuleta		Kec. Siwalalat		5,000,000		
Pemb.Tanggul Penahan Banjir Desa Bula Cs		Kec. Bula	2500 Meter	10,600,000		
Pemb. Talud Pengaman Pantai Dusun Kampung Baru Desa Dawang		Kec. Teluk Waru	250 Meter	1,000,000		
Pemb. Talud Pengaman Pantai Dusun Namalas		Kec. Seram Timur	250 Meter	300,000		
Pemb. Pemecah Ombak Amarsekaru		Kec. P Gorom	200 Meter	5,500,000		
Pemb. Pemecah Ombak Negeri Adm Namalean		Kec. P Gorom	125 Meter	2,000,000		
Normalisasi Tanggul Way Salas		Kec. Bula			1,000,000	
Normalisasi Tanggul Way Niff		Kec. Teluk Waru			4,000,000	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Normalisasi Tanggul Way Mer		Kec. Teluk Waru			4,000,000	
Normalisasi Tanggul Way Kola		Kec. Teluk Waru			4,000,000	
Normalisasi Tanggul Way Beli		Kec. Teluk Waru			4,000,000	
Normalisasi Tanggul Way Masiwang		Kec. Teluk Waru			4,000,000,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Desa Geser		Kec. Seram Timur			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Kecamatan Werinama		Kec. Werinama			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Kecamatan Siwalalat		Kec. Siwalalat			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Kecamatan Pulau Gorom		Kec. P Gorom			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Kecamatan Wakate		Kec. Wakate			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Desa Amarsekaru		Kec. P Gorom			2,800,000	
Pemb. Talud Pengaman Pantai Keta		Kec. Lianfitu	125 Meter	500,000		
Pemb. Pemecah Ombak Garogos		Kec. P Gorom	250 Meter	2,500,000		
Pembangunan Talud Pemecah ombak Negeri Kataloka		Kec P Gorom	1000 M		10,000,000	
Pemb. Tanggul Pengaman Sungai Dulak Desa Kian		Kec. Kian Darat	125 Meter	300,000		
Pemb. Tanggul Pengaman Sungai Desa Artafela		Kec. Kian Darat	350 Meter	300,000		
Pemb. Tanggul pengaman Banjir Karlokin		Kec. Teor	200 Meter	500,000		
Pemb. Talud Pengaman Pantai Amarwatu		Kec. Gorom Timur		300,000		
Pemb. Talud Pengaman Pantai Dusun Aroa		Kec. P Gorom	500 Meter	400,000		
Pemb. Tanggul Pengaman Banjir Waelutin		Kec. Werinama		1,000,000		
Pemb. Talud Penahan Ombak Negeri Adm. Guliar		Kec Wakate	200 Meter	500,000		
Pemb. Talud Pengaman Pantai Kumelang		Kec. Kilmuri	125 Meter	500,000		
Pemb. Tanggul Pengaman Sungai Dawang		Kec. Teluk Waru	125 Meter	500,000		
Rehab Tanggul Pengaman Banjir Desa Gaa		Kec. Tutuk Tolu	125 Meter	800,000		
Pemb. Tanggul Penahan Ombak Desa Atiahu		Kec. Siwalalat	125 Meter	1,000,000		
Pemb. Tanggul Penahan Banjir Pantai Tikus (Lanjutan)		Kec. Bula	125 Meter	500,000		
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Air bersih/Air</b>						

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Minum</b>						
<b>Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum</b>				<b>5,850,000</b>	<b>750,000</b>	
DED/ Master Plant SPAM Kec. Kian Darat		Kec. Kian Darat	1 Paket	200,000		
Pembangunan SPAM Dalam Kota Bula		Kec. Bula	1 Paket	2,000,000		
DED/ Master Plant SPAM Miran - Aran		Kec. Gorom Timur	1 Paket	400,000		
DED/ Master Plant SPAM Kecamatan Siwalalat		Kec. Siwalalat	1 Paket	400,000		
DED/ Master Plant SPAM Amarlaut - Kurwar		Kec. Wakate	1 Paket	400,000		
Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air Kws. Dulak, Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timu		Kec. Pulau Gorom	1 Paket		250,000	
Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air Kws. Wunin Eldedora, Kec. Wakate,Kab. Seram Bagian Timur		Kec. Wakate	1 Paket		250,000	
Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air Kws. Kilwaru, Kec. Seram Timur,Kab. Seram Bagian Timu		Kec. Teluk Waru	1 Paket		250,000	
DED/ Master Plant SPAM Rumeon, Dadaa , dan Aroa		Kec. Pulau Gorom	1 Paket	400,000		
DED/ Master Plant SPAM Kecamatan Kilmury		Kec.Kilmury	1 Paket	500,000		
DED/ Master Plant SPAM Kecamatan Teor		Kec.Teor	1 Paket	500,000		
DED/ Master Plant SPAM Kecamatan Pulau Panjang		Kec. Pulau Panjang	1 Paket	400,000		
Penyediaan Air Bersih Desa ADM. Usung Kec. Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	1 Paket	100,000		
Penyediaan Air Bersih Desa Adm Namalean Kec. Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	1 Paket	150,000		
Penyediaan Air Bersih Perumahan Pemda		Kec. Bula	1 Paket	200,000		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Bokan		Kec. Seram Timur	1 Paket	200,000		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Wawasa		Kec. Seram Timur	1 Paket	200,000		
Pembangunan Jaringan Air Bersih Jakarta Baru ( Lanjutan )		Kec. Bula Barat	1 Paket	200,000		
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi</b>						
<b>Peningkatan Saluran Irigasi</b>				<b>1,000,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>56,497,650</b>
Pemb. Embung Bula Timur				1,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Potensial Minapolitan Kws. Kec. Tututolu Desa Gah, Kufar ( Jalan Lapen )		Kec. Tutuk Tolu	1 Paket		6,250,000	
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws Bula (Jembatan Basa - Lanjutan) ( Jalan Lapen )		Kec. Bula	1 Paket		6,250,000	
Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Potensial Agropolitan Kws. Kec. Teluk Waru Desa Dawang (Jalan Lapen )		Kec. Teluk Waru	1 Paket		7,500,000	
Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Potensial Agropolitan Kws. Kec. Teluk Waru Desa Kampung Baru (Jalan Lapen )		Kec. Teluk Waru	1 Paket		7,500,000	
Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Potensial Agropolitan Kws. Desa Belis (Jalan Lapen )		Kec. Teluk Waru	1 Paket		5,000,000	
Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Potensial Agropolitan Kws. Desa Karay (Jalan Lapen )		Kec. Teluk Waru	1 Paket		5,000,000	
Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Lola Besar		Kec Bula Barat	4000 M			5,299,530
Pemb. Embung Batuasa		Kec. Werinama	1 Paket			30,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi D. I WaeSamet		Kec Bula Barat	4000 M			5,299,530
Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Jembatan Basah		Kec Bula Barat	4000 M			5,299,530
Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Sumber Agung		Kec Bula Barat	4000 M			5,299,530
Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Jakarta Baru		Kec Bula Barat	4000 M			5,299,530
<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>						
<b>Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan</b>				<b>11,100,000</b>		
Pembangunan Jalan Lapen Dalam Kota Bula		Kec. Bula	2 km	4,000,000		
Pembangunan Trotoar dan Taman Kota Bula		Kec. Bula	2 KM	4,000,000		
Pembangunan Jalan Setapak Amarsekaru Lanjutan		Pulau Gorom	1 KM	1,000,000		
Pembangunan Jalan Setapak Dadaa Ena		Pulau Gorom	1 Paket	200,000		
Pembangunan Jalan		Pulau Gorom	1 Paket	200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Setapak Jalan Baru Dadaa						
Rehab Jalan Gazza Ujung Rel		Kec. Bula	1 Paket	200,000		
Pembangunan Rabat Beton Dalam Kota Bula, Cs		Kec. Bula	1 Paket	500,000		
Rehabilitasi Jembatan Penghubung Namalean - Sekaru		Kec. Pulau Gorom	1 Pkt	200,000		
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Desa Solan		Kec. Teluk Waru	1 Pkt	200,000		
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Desa Rarat Tinarin		Kec. Gorom Timur	1 Pkt	200,000		
Rehabilitasi Jembatan Penyeberangan Neg. Adm. Rumbouw Bati		Kec. Kian Darat	1 Pkt	200,000		
Pemb. Jembatan Penyeberangan Neg. Adm. Kulugowa		Kec. Pulau Gorom	1 Paket	200,000		
<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>						
<b>Pembangunan Prasarana Infrastruktur Pemukiman</b>				<b>6,000,000</b>		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Teor		Kec. Teor	50 Unit	1,000,000		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Wakate		Kec. Teor	50 Unit	1,000,000		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Teluk Waru		Kec. Teor	50 Unit	1,000,000		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Pulau Gorom		Kec. Pulau Gorom	50 Unit	1,000,000		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Kilmury		Kec. Kilmury	50 Unit	1,000,000		
Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Rumah Kecamatan Seram Timur		Kec. Seram Timur	50 Unit	1,000,000		
<b>Perencanaan Tata Ruang</b>				<b>1,900,000</b>		
Implementasi Perda Bangunan Gedung				300,000	2,000,000	
Pembangunan RTH Kawasan Kota Bula				1,000,000		
Study Banding Tata Ruang				600,000		
<b>Pemanfaatan Ruang</b>				<b>3,600,000</b>		
Penyusunan zoning regulator kota				100,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan RTH Kota Hunimua				3,000,000	2,000,000	
Pembebasan Lahan Kota Bula				500,000		
Implementasi Perda IMB				250,000		
<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>				<b>850,000</b>		
Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang				250,000		
Pelatihan argis penataan ruang				600,000		
<b>BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI</b>				<b>3,400,000</b>		
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah				400,000		
Pembinaan Penanggung Jawab BUJK				350,000		
Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Sertifikasi K3)				300,000		
Pelatihan Mandor Bangunan (Sertifikasi Tukang)				300,000		
Peningkatan Layanan IUJK elektronik				350,000		
Pengawasan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Sesuai SIKAP)				250,000		
Sosialisasi peraturan Jasa Konstruksi				200,000		
Hukum Kontrak				300,000		
Pelatihan Ahli Pengawasan Konstruksi Gedung				250,000		
Pelatihan Alat Berat (sertifikasi Alat Berat) dan Operator Alat Berat				300,000		
Bimtek Pelatihan Teknik Irigasi				400,000		
<b>Pembangunan MCK</b>					<b>8,000,000</b>	
Pembangunan IPLT Desa Air Fatollo DED 2015, Kab. Seram Bagian Timur		0	1 Paket		5,000,000	
Pembangunan Sanimas Desa Kian Darat, Kab. Seram Bagian Timur		Kec. Kian Darat	1 Paket		3,000,000	
<b>DINAS SOSIAL</b>				<b>10,715,000</b>	<b>200,000</b>	<b>10,400,000</b>
<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>695,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor	Bula	100%	20,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor	Bula	100%	75,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor	Bula	100%	75,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor(ATK)	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor	Bula	100%	100,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor	Bula	100%	75,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Bula	100%	350,000		
<b>Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur</b>			<b>970,000</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Bula	100%	250,000		
Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Bula	100%	300,000		
Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Perbaikan Kendaraan Dinas secara Berkala	Bula	100%	300,000		
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Terpenuhinya Perbaikan Kendaraan Dinas secara Berkala	Bula	100%	120,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur</b>			<b>250,000</b>		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional	Bula	100%	250,000		
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KAT &amp; PMKS Lainnya</b>	<b>Terlaksananya Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KAT &amp; PMKS Lainnya</b>			<b>5,000,000</b>	<b>200,000</b>	<b>7,500,000</b>
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Meningkatnya SDM Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Tersebar	100%	300,000		
Pembinaan dan Pendampingan Keluarga Miskin	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Keluarga Miskin	Tersebar	100%	200,000		
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya Ketrampilan Barusaha bagi Keluarga Miskin	Tersebar	100%	350,000	200,000	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersebar	100%	200,000		
Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pesisir Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pesisir Pulau-Pulau Kecil	15 Kec	100%			5,000,000
Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	15 Kec	100%			2,500,000
Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri	Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri	Tersebar	100%	250,000		
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Tersebar	100%	200,000		
Bantuan Bahan Bangunan Bagi Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Program Bantuan Bahan Bangunan Bagi Rumah Tidak Layak Huni	15 Kec	100%	2,500,000		
Siaga Bantuan bagi masyarakat yang kena dampak bencana	Terlaksananya bantuan bagi masyarakat yang kena dampak bencana	Tersebar	100%	1,000,000		
<b>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Terlaksananya Program Pelayanan &amp; Rehabilitasi Sosial</b>			<b>2,900,000</b>		<b>1,250,000</b>
Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia	Adanya Jaminan hidup Bagi Lansia	Tersebar	100%	300,000		1,250,000
Transportasi Buffer Stock Bencana Alam	Tersedianya Biaya Transportasi Buffer Stock Bencana Alam	Tersebar	100%	300,000		
Pembinaan dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan	Terwujudnya Program Keluarga Harapan	Tersebar	100%	250,000		
Pembangunan Gudang Logistik	Terlaksananya Pembangunan Gudang Logistik	Bula	100%	1,200,000		
Pembangunan Kantor Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH)	Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH)	Bula	100%	350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Bantuan Operasional Bagi UP - PKH dan PEKSOS	Terlaksana kegiatan Operasional bagi Pendamping UP-PKH PEKSOS	Tersebar	100%	500,000		
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Terlaksananya Program Pembina Anak Terlantar</b>			<b>500,000</b>		<b>200,000</b>
Penyusunan Data Dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersedianya Data Dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersebar	100%	300,000		-
Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan Anak	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan Anak	Tersebar	100%	200,000		200,000
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma</b>	<b>Terlaksananya Program Pembinaan Para penyandang Cacat Dan Trauma</b>			<b>200,000</b>		<b>1,250,000</b>
Pangadaan Sarana Penunjang Aktifitas Hidup Bagi Penyandang Disabilitas	Adanya Sarana Penunjang Aktifitas Hidup Bagi Penyandang Disabilitas	Tersebar	100%	200,000		1,250,000
<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>	<b>Terlaksananya Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>			<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersebar	100%	200,000		200,000
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>5,200,000</b>	<b>440,000</b>	<b>85,880,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>980,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	50,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	100,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	50,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	75,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	80,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	50,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	Bula	1 Paket	75,000		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terciptanya Administrasi Perkantoran Dengan Baik dan Profesional	makassar-jakarta	1 Paket	500,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan</b>				<b>800,000</b>		
Pengadaan Mebeuleur	Adanya Peningkatan Kerja Aparatur Sumber Daya Kepada Masyarakat	Bula	1 Paket	500,000		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Peningkatan Kerja Aparatur Sumber Daya Kepada Masyarakat	Bula	1 Paket	300,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</b>				<b>500,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Makassar, Jakarta	1 Paket	500,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan</b>						
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makassar	1 Paket	150,000		
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makassar	1 Paket	150,000		
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja</b>				<b>450,000</b>	<b>120,000</b>	
Penyusunan Data Base Ketenaga Kerjaan	Terlaksananya Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	15 Kecamatan	1 Keg	350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan	Kec Bula	1 Keg	100,000	120,000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>				<b>390,000</b>	<b>170,000</b>	<b>380,000</b>
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Adanya jumlah pencari kerja yang terdaftar, ditempatkan dan dihapuskan	Bula	1 Keg	60,000	70,000	
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Adanya informasi tentang bursa tenaga kerja serta terselenggaranya a pengendalian dan pembinaan bagi angkatan kerja	Bula	1 Keg	80,000	100,000	120,000
Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tersedianya modal usaha bagi masyarakat	Dusun Nama Kec. Siritaun Wida Timur dan Kec. Kiandarat Desa Kian	2 Keg	250,000		260,000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>				<b>260,000</b>		
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan HI	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Perselisihan	Bula	1 Keg	50,000		
Fasilitasi Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	Terlaksananya Kegiatan Jamsostek	Bula	1 Keg	30,000		
Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	Bula	1 Keg	80,000		
Monitoring dan Pelaporan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Terlaksananya Kegiatan Monev	Bula	1 Keg	20,000		
Pembentukan Dewan Pengupahan	Terlaksananya Kegiatan Dewan Pengupahan	Bula	1 Keg	80,000		
<b>PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>1,820,000</b>	<b>150,000</b>	<b>85,500,000</b>
Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Permukiman	Tersedianya unit pemukiman transmigrasi baru	SP 6 Hote dan SP 1 Dawang	2 Keg			85,000,000
Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi (Penerbitan Sertifikasi Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II)	Tercapainya legalitas hukum kepemilikan lahan transmigran	UPT : U Airmatakabo (D5 dan D6), R Banggoi, T Silat, Y Bula, Z Bula	2,212 Persil Keg			500,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pemukiman Transmigrasi (Penataan Status Kawasan Transmigrasi)	Tercapainya legalitas hukum kawasan transmigrasi	UPT : U Airmatakabo (D5 dan D6), R Banggoi, T Silat, Y Bula, Z Bula	1 Keg	400,000		
Kegiatan Pengembangan Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi (redesain RTSP, RTSP Pugar Desa)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Satuan Pemukiman	SP 1,2 Salas dan Desa Dawang	2 Keg	500,000		
Kegiatan Pengembangan Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi (redesain RTSP, RTSP Pugar Desa)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Satuan Pemukiman	SP 1 Belis, SP 1 Waru	1 Keg		150,000	
Peningkatan Sumberdaya Manusia Anak-anak di Daerah transmigrasi	Tersedianya SDM yang Berkualitas	UNSOED Porwokerto Jateng	1 Keg	550,000		
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi dikawasan Transmigrasi	Meningkatkan Perekonomian dikawasan Transmigrasi	Kec Bula Barat	1 Keg	250,000		
Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi dikawasan Transmigrasi diperbatasan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan di UPT	UPT R Banggoi, UPT T Silat, UPT X Bula	1 Keg	120,000		
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>10,565,000</b>		<b>11,500,000</b>
<b>Urusan Wajib</b>						
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah.</b>	Bula				<b>11,500,000</b>
Pembangunan Gudang dan Garasi DAMKAR (DAK)	Tersedianya Gudang dan Garasi DAMKAR.	Bula				1,600,000
Pembangunan Pos WMK DAMKAR (DAK)	Tersedianya Pos WMK DAMKAR bagi Petugas DAMKAR.	Bula				1,200,000
Pengadaan Kendaraan DAMKAR dan SUPPORT DAMKAR (DAK)	Tersedianya Kendaraan DAMKAR dan SUPPORT DAMKAR.	Bula				1,800,000
Pengadaan Alat Proteksi Petugas DAMKAR.	Tersedianya Alat Proteksi Petugas DAMKAR.	Bula				1,500,000
Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamat Korban Kebakaran (DAK)	Tersedianya Alat Pertolongan bagi Petugas DAMKAR.	Bula				1,300,000
Pengadaan Kendaraan Angkut Bahan Logistik SATPOL PP (DAK)	Tersedianya Kendaraan Angkut Logistik SATPOL PP dalam Operasi dilapangan.	Bula				1,300,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan Alat Pelindung Diri Petugas anggota SATPOL PP (DAK)	Tersedianya Alat Pelindung Diri Petugas anggota SATPOL PP.	Bula				1,500,000
Pengadaan Alat Komunikasi Petugas SATPOL PP dilapangan (DAK)	Tersedianya Alat Pendukung Komunikasi bagi anggota SATPOL PP.	Bula				1,300,000
<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>4,252,200</b>		
Penyediaan Bahan logistik	Tersedianya Bahan Logistik Atribut Pakaian	Bula		35,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas SATPOL PP, LINMAS dan DAMKAR Tersedianya Makan dan Minum bagi Staf dan Anggota SATPOL PP	Bula		35,000		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan RAKOR dalam dan Luar Daerah	Aparatur		750,000		
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS anggota SATPOL PP	Tersedianya Gaji/Honorarium Non PNS Anggota SATPOL PP		118 Orang	3,432,200		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2,719,800</b>		
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Ruang Tambahan Gedung Kantor	Bula		200,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Tersedianya Kendaran Dinas/Operasional al Lapangan staf pengelola administrasi dan Anggota	Bula		713,300		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Alat-alat Pendukung Aktivitas Administrasi Kantor	Bula		200,000		
Pengadaan Mebeler Gedung Kantor	Tersedianya Tambahan Mebeler Gedung Kantor.	Bula		75,000		
Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan dan Taman Halaman Kantor	Tersedianya Tempat Parkir Kendaraan dan Taman Halaman Kantor.	Bula		400,700		
Pembangunan Pos Induk Penjagaan dan Garasi Kendaraan Dinas	Tersedianya Pos Induk Penjagaan dan Garasi Kendaraan Dinas.	Bula		270,800		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan Peralatan Operasional Lapangan Anggota SATPOL PP, LINMAS dan DAMKAR	Tersedianya Peralatan Keamanan dan Penertiban bagi Petugas SATPOL PP, LINMAS dan DAMKAR dilapangan.	Bula		800,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor.	Bula		30,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Roda Empat dan Mobil Pejabat Eselon II.	Bula		30,000		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>588,000</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PDH, PDL, PDU, Olahraga dan DW.	Bula		588,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>1,070,000</b>		
Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Penegakan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya Sosialisasi Pembinaan dan Penyuluhan bagi Aparatur daerah dan Masyarakat	Bula		75,000		
Sosialisasi Pembinaan Jelang PILKADA di daerah.	Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan Jelang PILKADA di daerah	Kecamatan		500,000		
Patroli Penegakan Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah.	Terlaksananya patroli penegakan disiplin Aparatur daerah.	Bula		75,000		
Bimbingan Teknis penyidik PPNS bagi Aparatur Daerah.	Tersedianya Tenaga Penyidik PPNS Daerah.	Pusat dan Provinsi		100,000		
Peningkatan Kapasitas SDM bagi Aparatur Daerah dan Anggota SATPOL PP	Tersedianya Tenaga Trampil dalam mengatasi permasalahan TERANTIB, LINMAS, DAMKAR dan Aplikasi Komputer Sistim Penyusunan, Pelaporan	Pusat dan Provinsi		320,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelaporan dan Keuangan.</b>			<b>35,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.	Bula		35,000		
<b>Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.</b>	<b>Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Tindak Kriminal.</b>			<b>300,000</b>		
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Terlaksanya pengendalian PAM Hari-hari besar Nasional dan HUT Kabupaten	Bula		300,000		
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.</b>	<b>Percapainya Sistim Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat.</b>			<b>1,500,000</b>		
Dukungan Kelancaran PEMILU di Daerah	Terlaksananya Sistim Ketertiban dan Keamanan PEMILU di Daerah dalam Masyarakat.	Bula		1,500,000		
<b>Program Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah</b>	<b>Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah.</b>			<b>100,000</b>		
Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Terlaksanya pengendalian sistim pengawasan peraturan daerah.	Bula		100,000		
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>4,111,200</b>		
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>288,200</b>		
Penyediaan Jasa surat Menyurat	presentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat	Bula		8,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Air Dan Listrik	terpenuhinya pelayanan administrasi SKPD	Bula		20,000		
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	terpenuhinya pelayanan administrasi SKPD	Bula		12,500		
Penyediaan Alat Tulis kantor	terpenuhinya pelayanan administrasi SKPD	Bula		10,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya administrasi perkantoran	Bula		15,700		
Rapat - Rapat Koordinasi, Kunsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	peningkatan sumber daya aparatur	Tersebar		222,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>174,000</b>		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peningkatan pelayanan Aparatur	bula		115,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Bula		10,000		
Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya Kantor	Bula		49,000		
<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>170,000</b>		
pendidikan dan pelatihan formal,( Diklat Intelegen,Diklat kepegawain,Bimtek Keuangan , pelatihan Kebencanaan)	tersedianya pendidikan dan pelatihan	Tersebar		170,000		
<b>Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>52,000</b>		
Penyusunan laporankinerja iktisar realisaasi kinerja SKPD, penyusunan RKA	Terpenuhinya penyusunan RKA SKPD	Bula		12,000		
Penyusunan Laporan Keuangan Per Triulan	terpenuhinya penyusunan laporan keuangan per triulan SKPD	Bula		10,000		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Bula		15,000		
Penyusunan Lakip	terpenuhinya penyusunan Lakip SKPD	Bula		15,000		
<b>Pemeliharaan KAMTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				<b>298,000</b>		
Rapat - Rapat Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)	terlaksananya KONTRATIBMAS	tersebar		298,000		
<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>870,000</b>		
sosialisasi Peningkatan dan perkuatan wawasan Kebangsaan	terlaksananya sosialisasi	tersebar		125,000		
rapat - rapat koordinasi tingkat kabupaten	terlaksananya rapat-rapat koordinasi muspika dan latupati se-Kabupaten	Bula		745,000		
<b>Kemitraan pengembangan wawasan Kebangsaan</b>				<b>460,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
pembentukan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat( <b>FKDM</b> ) dan Operasionalnya	terlaksananya FKDM	tersebar		157,000		
pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan( <b>FPK</b> ) dan Operasionalnya	terlaksananya FPK	tersaebar		150,000		
pembentukan Forum Komunikasi umat Beragama( <b>FKUB</b> ) dan Operasionalnya	Terlaksananya FKBU	tersebar		153,000		
<b>Peningkatan pembrantasan penyakit Masyarakat</b>				<b>187,000</b>		
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan MIRAS dan NARKOBA	Masyarakat Pengguna Miras dan Narkoba	tersebar		187,000		
<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>				<b>1,612,000</b>		
Pertemuan Antar Organisasi kemasyarakatan,kepemudaan dan LSM	terlaksananya pertemuan	Bula		100,000		
Penelitian Pemberkasan Persyaratan Administrasi,Pengajuan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol Tingkat Kabupaten	terlaksananya ferifikasi berkas administrasi	Bula		37,000		
Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Penyelenggaraan PILGUB 2018	terlaksananya Pembentukan Tim	Tersebar		1,300,000		
Monitoring Dan evaluasi	terlaksananya monitoring dan Evaluasi	tersebar		175,000		
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				<b>5,651,000</b>		<b>9,160,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>475,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Bula	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat 4 Paket	10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasih, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Bula	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 3 Paket	35,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Bula	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 2 Orang	20,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK	Bula	Tersedianya ATK 4 Paket	100,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bula	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket	10,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Korrdinasi, Konsultasi	Bula	Tersedianya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>225,000</b>		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor	Bula	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket	200,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				25,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas	Bula	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 2 Paket	50,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>45,000</b>		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja	Bula	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja	35,000		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Terlaksananya Laporan Keuangan Semester	Bula	Tersedianya laporan keuangan semester	10,000		
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Petani</b>			<b>926,000</b>		
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis	16 Kecamatan	Tersedianya Petani dan Pelaku agribisnis yang Profesional	626,000		
Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender	Terlaksananya Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender	9 Kecamatan, 19 Desa, 186 Kelompok	tersedianya dukungan dana	300,000		
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>				<b>3,050,000</b>		<b>370,000</b>
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Penguatan SKPG)	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	16 Kecamatan	tersedianya bantuan penanganan daerah rawan pangan	250,000		
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan	tersebar	meningkatnya ketahanan pangan	250,000		
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan	16 Kecamatan	tersedianya data akses Pangan	430,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengembangan desa mandiri pangan	Tersedianya kawasan mandiri pangan	1 Kecamatan	Meningkatnya tahapan penumbuhan menjadi tahapan pengembangan	910,000		150,000
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terwujudnya fasilitas lumbung pangan desa	3 Kecamatan	Tersedianya Fasilitas lumbung pangan desa sebanyak 3 unit	180,000		120,000
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		14 Desa	1 Pkt	780,000		100,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	16 Kecamatan		250,000		
<b>PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>				<b>930,000</b>		<b>8,790,000</b>
Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksibi/Promos atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksibi/Promos atas hasil produksi pertanian/perkebunan	5 Kecamatan		500,000		
Pemberdayaan Unit Usaha Penampungan dan Pemasaran Hasil Produksi Pangan				330,000		
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	2 Kecamatan	Tersedianya usaha produktif pertanian dalam rangkai Peningkatan Akses Pangan Masyarakat			200,000
Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)		2 Kecamatan	1 Pkt			260,000
Pengembangan Mitra Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia	1 Kecamatan	Tersedianya Toko Tani Indonesia	100,000		30,000
Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	16 Kec	Terlaksananya Model Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan/ Rumah Pangan Lestari			300,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5 Home Industri	Terciptanya Home industri berbasis pangan lokal di 16 Kec			500,000
Pendampingan Kawasan Mandiri Pangan (SOLID) (TP)		1 Kecamatan 1 Desa				500,000
Dukungan Manajemen dan Teknis (SOLID) (TP)		9 Kecamatan, 19 Desa, 186 Kelompok				7,000,000
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>3,715,000</b>		<b>1,700,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>260,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		35,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		25,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		20,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		20,000		
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula dan Luar daerah		150,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>140,000</b>		
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lab&Pengawasan	Ada nya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Bula		20,000		
Pembayaran tahunan aktivasi Sistem Informasi Lingkungan	Ada nya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Bula		120,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>125,000</b>		
Bimbingan Teknis Amdal dan LAB	Ada nya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Bula		125,000		
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				<b>1,650,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tercapaiannya Pengelolaan Persampahan yang optimal	Bula,Gorom &Geser		1,500,000		
Penyediaan Perawatan dan pemanfaatan TPA	Tercapaiannya Pengelolaan Persampahan yang optimal	Bula		150,000		
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>				<b>450,000</b>		
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup	Adanya Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	15 kecamatan		450,000		
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>						<b>600,000</b>
Konservasi Sumber mata air	Adanya Perlindungan dan Peningkatan konservasi sumber daya alam	bula				600,000
<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>						<b>1,100,000</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tercapaiannya Pengelolaan Persampahan yang optimal	15 kecamatan				1,100,000
<b>Program Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup</b>				<b>800,000</b>		
Pembangunan/pemeliharaan Taman Hijau Kota dan Hutan Kota	Adanya Perlindungan dan Fungsi Lingkungan Hidup	bula		300,000		
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Definitif	Adanya Perlindungan dan Fungsi Lingkungan Hidup	Hunimua		500,000		
Fisibility Study Lokasi TPA	Adanya Perlindungan dan Fungsi Lingkungan Hidup	Hunimua : Gorom				
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>				<b>290,000</b>		
Konsultasi Legalisasi PERDA Bangunan Gedung	adanya pengendalian dan pemanfaatan ruang	bula		150,000		
Konsultasi Penyusunan PERDA Pengelolaan Persampahan	adanya pengendalian dan pemanfaatan ruang	bula		140,000		
<b>DINAS KEPENDUDUKAN</b>				<b>4,712,535</b>		<b>300,000</b>

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>DAN CATATAN SIPIIL</b>						
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan dalam Penataan / Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>589,150</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik		Bula		54,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Bula		150,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Bula		25,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bula		15,000		
Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Luar Daerah		250,000		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		bula		20,000		
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bula		10,150		
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		bula		50,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dalam 1 tahun		bula		15,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan tugas dan tanggungjawab serta Efisiensi Kinerja Aparatur</b>			<b>1,440,000</b>		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Bula		50,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Bula		50,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Bula		30,000		
Pengadaan mebeleur		Bula		300,000		
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor				-		
Pengadaan Komputer/Laptop		Bula		50,000		
Pengadaan mobil Pelayanan Keliling		Bula		750,000		
Pengadaan Kendaraan bermotor roda 2				210,000		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab</b>			<b>45,000</b>		
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Bula		45,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>			<b>150,000</b>		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Luar Daerah		150,000		
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Penataan Administrasi Jumlah Jiwa Penduduk secara tertib dan bertanggung jawab</b>			<b>2,488,385</b>		<b>300,000</b>
Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu (DAK non Fisik)		Bula				100,000
Pemeliharaan, pengaman dan pengawasan perangkat SIAK		kabupaten dan kecamatan				200,000
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Luar Daerah		150,000		
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		kabupaten/kecamatan		250,000		
Sosialisasi kebijakan kependudukan		15 Kecamatan		600,000		
Pengembangan data base kependudukan		Dalam dan luar daerah		250,000		
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan		Luar daerah		158,101		
Penyusunan kebijakan kependudukan (DAK non Fisik)		bula-luar daerah		280,284		
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil (DAK non Fisik)		Bula		350,000		
Peningkatan Pelayanan KTP-EI di kecamatan dan Negeri Administratif (mobile)		kabupaten/kecamatan		200,000		
Peningkatan Kepemilikan AKTE Kelahiran		kabupaten/kecamatan		100,000		
Peningkatan Kepemilikan AKTE Pencatatan Sipil		kabupaten/kecamatan		150,000		
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Anak</b>				<b>12,140,000</b>		<b>3,475,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>655,000</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air dan komunikasi untuk keperluan kantor	Bula	75%	30,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bula	75%	35,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bula	75%	50,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan dan Penggandaan dokumen kantor	Bula	75%	40,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Bula	25%	50,000		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Tersebar	75%	450,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>785,000</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Bula	50%	100,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Bula	50%	85,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Bula	50%	75,000		
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana kerja yang memadai	Bula	75%	500,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan siap pakai	Bula	1 unit	25,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tersedianya laporan keuangan dan program kegiatan yang akuntabel</b>			<b>30,000</b>		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis Realisasi Anggaran Dana Desa	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis	Bula	75%	10,000		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dana Desa	Tersusunannya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bula	75%	10,000		
Penyusunan RKA, DPA/DPPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Bula	75%	10,000		
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa</b>			<b>3,250,000</b>		<b>1,340,000</b>
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis dan masyarakat	Bula	80%	600,000		
Distribusi dan Monitoring Raskin	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Raskin	15 Kec.	80%	700,000		
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Tentatif	75%	350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
	desa					
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi TP PKK desa dan Dasawisma	15 Kec.	75%	410,000		
Pelatihan dan Pendampingan Perencanaan, Penganggaran dan pemantauan yang Pro Poor		15 Kec.		640,000		
Pelatihan dan Pelaksanaan Monitoring Berbasis Masyarakat		Teluk Waru		550,000		
Pemb DataBase dan Updating data Base Desa (Sistim Informasi Desa=SID) untuk Memperkuat alokasi dan monitoring dana Desa		Teluk Waru				1,340,000
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>	<b>Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan</b>			<b>3,500,000</b>		<b>2,135,000</b>
Gelar Teknologi Tepat Guna	Disebarluaskannya informasi produksi rumah tangga dan kerajinan masyarakat di tingkat nasional	Tentatif	75%	750,000		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data yang akurat	15 kec	80%	350,000		
Pembentukan, Penataan BUMDes dan pendampingan intensif serta Penguatan Kelembagaan BUMDes	Terbentuknya BUMDes disetiap desa	15 Kec, 198 desa	80%	800,000		
Peningkatan Pendaya Gunaan Teknologi Tepat Guna Berbasis potensi SDA lokal	Pemanfaatan SDA Berbasis TTG Bagi kesejahteraan Masyarakat	Kec. Pulau Panjang & P. Gorom	75%	300,000		
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penyusunan data dan Publikasi Program	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	15 kec	75%	350,000		
Pembentukan Pos Pelayanan TTG Desa (Posyantekdes)	Penerapan Teknologi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran	15 kec	75%	750,000		
Pelatihan Kerajinan/Industri Rumah Tangga	Meningkatnya keterampilan ibu rumah tangga dalam pengolahan makanan berbahan pokok lokal	Bula	15%	200,000		
Pemb Kantor BUMDES						1,200,000
Perekrutan dan Pelatihan staf pengelola BUMDES		Teluk Waru				300,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyusunan aturan main pengelolaan BUMDES		Teluk Waru				80,000
Penguatan Pendampingan						75,000
Insentif pengelola BUMDES						480,000
Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Pembentukan P2TP2A	15 kec	75%	350,000		
Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Anak	Tersosialisasinya Inpres NO. 5 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak	15 kec	75%	350,000		
<b>Pogram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Negeri</b>			<b>1,950,000</b>		
Perlombaan Desa	Terlaksananya perlombaan desa tingkat Kabupaten	15 Kec	80%	450,000		
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa	15 Kec	80%	750,000		
Pembinaan Kelompok Masyarakat/Dasawisma terhadap 10 Program PKK	Terlaksananya pembinaan Kelompok Dasawisma dan TP PKK Desa dalam membangun desa	15 Kec.	75%	750,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Adanya pelatihan dan peningkatan aparatur desa</b>			<b>970,000</b>		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	Bula	30%	520,000		
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatnya kapasitas Saniri/BPNA	3 Kec	30%	450,000		
<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan</b>			<b>350,000</b>		
Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Terwujudnya keluarga yang damai	3 kec	25%	350,000		
<b>Program Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan</b>			<b>650,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat Kerja Tim Penggerak PKK / LP3PKK ( Latihan Program Pemberian Makanan Tambahan)	Meningkatkan koordinasi PKK Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan; penguasaan LP3PKK	Provinsi, Kabupaten	50%	650,000		
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>6,280,000</b>		<b>2,900,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>465,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	Bula		5,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air dan komunikasi untuk keperluan kantor	Bula		35,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bula		25,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bula		25,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan dan Penggandaan dokumen kantor	Bula		15,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Keperluan Kantor	Bula		50,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bula		10,000		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	-		300,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>350,000</b>		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Bula		50,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Bula		50,000		
Pengadaan Mebeleur Kantor	Tersedianya Kebutuhan kantor	Bula		150,000		
Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana kerja yang memadai	Bula		50,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan siap pakai	Bula		50,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sumberdaya Aparatur</b>			<b>200,000</b>		
Bimtek KB	Terpenuhinya Pengetahuan Aparatur			200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Terciptanya Keluarga Sejahtera</b>			<b>1,850,000</b>		
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Tercapainya Pelayanan KB Bagi keluarga Prasejahtera	Bula		350,000		
Pembentukan Kampung KB	Terwujudnya Kampung KB	16 Kec		350,000		
Pembinaan Kampung KB	Meningkatnya Pemahaman Informasi Tentang KB	16 Kec		200,000		
Pendistribusian Alat Kontrasepsi	Tersalurnya Alat Kontrasepsi Kepada Masyarakat	16 Kec		250,000		
Pengadaan Alat Kontrasepsi	Tersediannya Alat Kontrasepsi	Bula		700,000		
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Remaja</b>			<b>400,000</b>		
Sosialisasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi	Bula		150,000		
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Bina ketahanan Remaja	Meningkatnya Pemahaman dan terbentuknya Kelompok Bina Ketahanan Remaja	5 KEC		250,000		
<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>Adanya Pelayanan Kontrasepsi</b>			<b>550,000</b>		
Pelatihan Pemasangan dan Pencabutan Implant	Adanya Pelatihan Dan Pemasangan dan Pencabutan Implant	Bula		300,000		
Bulan Bakti KB	Meningkatnya Partisipasi Dan Keikutsertaan Masyarakat Untuk BerKB	Bula		250,000		
<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>				<b>1,040,000</b>		
Sosialisasi dan Desminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersediannya Data Penyebaran Kependudukan dan keluarga berencana	Kec. Bula		150,000		
Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk	Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16 Kec		380,000		
Penyusunan Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten	Tersediannya data profil kependudukan dan keluarga berencana	Kec. Bula		150,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pemutahiran Data Penduduk Keluarga Berencana	Tersedianya data Penduduk dan Keluarga Berencana dari setiap Kecamatan	16 Kec		360,000		
<b>Promosi Kesehatan Ibu Bayi Anak dan Remaja Melalui Kegiatan Masyarakat</b>						
H A R G A N A S	Tercapainya Keikutsertaan HUT Harganas			350,000		
<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Tercipta Keluarga Sejahtera</b>			<b>1,425,000</b>		
Pembinaan Kelompok BKB dan Lansia	Terbinanya Keluarga Balita dan Lansia yg sejahtera	16 Kec		250,000		
Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera	Terbentuknya Bina Keluarga Sejahtera	16 Kec		350,000		
Pembentukan PKB/PLKB dan Kader KB	Terbentuknya Petugas Lapangan di setiap Puskemas Maupun pustu Kecamatan dan Desa	16 Kec		150,000		
Sosialisasi Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN)	Tercapainya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kelembagaan Adpin	16 Kec		275,000		
Study Banding Kependudukan dan KB	Mendapatkan Hasil Perbandingan Kependudukan dan KB	Bali		250,000		
Insentif penyuluh, Petugas Klinik KB	tersedianya insentif petugas Klinik KB	16 Kec		150,000		
<b>Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini lapangan</b>						<b>1,700,000</b>
Biaya Langganan Jasa (Listrik) (DAK)						100,000
Pertemuan kelompok Kerja Kampung KB (DAK)						800,000
Pertemuan Forum Musyawarah Di desa Kampung KB (DAK)						800,000
<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB</b>						<b>1,100,000</b>
Pengadaan Kendaraan Antar Jemput Calon Akseptor (DAK)						600,000
Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (Mulyan) KB (DAK)						500,000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB</b>						100,000
Pengadaan Porsenal Komputer Untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang (10 unit) - (DAK)						100,000
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>5,465,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>41,830,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>590,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000		
Penyediaan Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik				60,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				50,000		
Penyediaan Jasa Perbaikan Perawatan Kantor				30,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor				60,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10,000		
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah				250,000		
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor				45,000		
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				75,000		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>60,000</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas	Bula	100	60,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>200,000</b>		
Pendidikan dan Kegiatan Formal	Terlaksananya Pendidikan Formal	Tersebar	100	200,000		
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>						<b>10,000,000</b>
Pembangunan Bandara Kataloka P. Gorom (Tahap I)	Tersedianya Bandar Udara	Kec. P. Gorom	100			10,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>						

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Pengadaan Sarana Transportasi</b>	Tersedianya Sarana Transportasi Laut	Kec. Kilmury, Kec. Teor, Kec. P.Gorom. Kec. Teluk waru, Kec. Werinama, Kec. Gorom Timur, Kec. Wakate, Kec. Seram Timur	100			<b>6,450,000</b>
-Pengadaan Long boad + Mesin Tempel 15 PK						5,700,000
- Pengadaan SpeadBoat 200PK			100			750,000
<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>						
<b>Pembangunan Dermaga / Pelabuhan Laut</b>	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Laut		100			<b>8,180,000</b>
-Pembangunan Tambatan Perahu Desa Garogos		Kec. P. Gorom				545,000
-Pembangunan Tambatan Perahu Desa Manggis		Kec. Seram Timur				545,000
-Pembangunan Tambatan Perahu Desa Aenena		Kec. Seram Timur				545,000
-Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tinarin		Kec. P. Gorom				545,000
-Pembangunan Dermaga Rakyat Pulau Panjang		Kec. P. Panjang				1,500,000
-Pembangunan Dermaga Rakyat Derak		Kec. P. Gorom				1,500,000
-Pembangunan Dermaga Flexybell		Kec. Kilmury, Kec. P.Gorom				3,000,000
<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas</b>	Tercapainya Keselamatan Lalulintas di Jalan Raya			<b>1,250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>3,150,000</b>
Pengadaan Rambu-Rambu lalu Lintas		Kec. Bula,Kec. Bula Barat,Kec. Teluk Waru,Kec. P.Gorom,Kec. Gorom Timur	100	250,000	250,000	300,000
Pengadaan Marka Jalan		Kec. Bula,Kec. Teluk Waru	100	250,000		
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Kec. Bula	100	750,000		
- Pengadaan Zebra Cross		Kec. Bula,Kec. Bula Barat	100			400,000
- Pengadaan Zona Keselamatan Sekolah (ZSS)		Kec. Bula,Kec. Bula Barat,Kec. Teluk Waru,Kec. P.Gorom,Kec. Gorom Timur	100			450,000
<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian</b>	Tercapainya Keselamatan Pengguna				<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Kendaraan Bermotor</b>	Angkutan					
Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor		Kec. Bula	100		1,000,000	1,000,000
<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>				<b>3,000,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>10,850,000</b>
Pekerjaan Terminal Tipe C	Tercapainya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Bula	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
Pemb. Rambu-rambu Laut		Geser, Gorom, Kesui	3 Paket		1,500,000	
Pengadaan Mooring Buih		Kec. Gorom, Kec. Seram Timur	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
Pengadaan Transportasi Bis Perintis		Kab. SBT	1 Unit			850,000
Perpanjangan RunWay Bandara Kufar	Tersedianya RunWay Bandara	Bandara Kufar	300 M			10,000,000
<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>					<b>1,250,000</b>	<b>2,200,000</b>
Pemb. Delinuator	Tercapainya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				500,000	500,000
Pemb. Gadriel	Tercapainya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kec. Bula, Kec. Bula Barat			500,000	500,000
Pagar Pengaman Jalan Bandara Kufar	Terlaksnanya Pagar Pengaman Bandara	Kec. Bula				1,200,000
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tercapainya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lingk. P. Gorom	Gorom			250,000	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Tercapainya Pelayanan Angutan Darat Dan Laut			<b>365,000</b>		
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang		Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Bula Timur, Kec. Werinama, Kec. Gorom	100	150,000		
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan		Ambon	100	65,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Bula,Kec. Bula Barat,Kec. Bula Timur,Kec. Werinama,Kec. Gorom,Kec. Tutuktolu,kec. Kiandarat,Kec. Lianfitu,Kec. S eram Timur, Kec. Kilmuri,Kec. Werinama,Kec. Siwalalat, Kec. P.Panjang,Kec. P.Gorom, Kec. Gorom Timur	100	150,000		
Pengusunan Data Base Infrastruktur Perhubungan	Tersediannya Data Transportasi Perhubungan	Kec. Bula,Kec. Bula Barat,Kec. Bula Timur,Kec. Werinama,Kec. Gorom	100	350,000		
<b>DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>				<b>6,690,000</b>	<b>61,000,000</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>755,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		25,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bula		30,000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bula		45,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bula		25,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Bula		50,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Bula		35,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bula		20,000		
Penyediaan Makan Minum	Tersediannya Penyediaan Makan Minum	Bula		25,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	Bula dan Luar daerah		500,000		
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1,170,000</b>		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bula		80,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan kantor	Bula		950,000		
Pengadaan meubelair	Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler	Bula		100,000		
Pengadaan/Sewa gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan/Sewa a gedung kantor	Bula		40,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>200,000</b>		
Bimtek Kesekretariatan	Tercapainya Bimtek Kesekretariatan	Jakarta		200,000		
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>1,150,000</b>	<b>61,000,000</b>	
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	15 Kecamatan		450,000	61,000,000	
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Bula		500,000		
Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Bula		200,000		
<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>				<b>1,030,000</b>		
Studi Tiru Implementasi E-Government	Terlaksananya Studi Tiru Implementasi E-Government	Kab. Bogor, Kota Tangerang		300,000		
Penyusunan Rencana Induk Planning (RIP) Implementasi E-Government	Tersedianya Penyusunan RIP Implementasi E-Government	Bula		100,000		
Survey Infrastruktur IT/Updating Database Bidang TIK	Terlaksananya Updating Data	Bula, Bula Barat, Seram Timur, P. Gorom, Werinama, Siwa lalat,		230,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
		Wakate dan Teor				
Sosialisasi/Launching Layanan Informasi dan Komunikasi berbasis Android	Terselenggaranya Sosialisasi/Launching Layanan Informasi dan Komunikasi berbasis Android	Bula		150,000		
Sosialisasi PPID	Terselenggaranya Sosialisasi PPID	Bula		250,000		
<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi</b>				<b>950,000</b>		
Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Bidang TIK	Jakarta		300,000		
Pelatihan Pengelolaan Website Desa	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Website Desa	Bula		200,000		
Lomba Desain Web	Terlaksananya Lomba Desain Web	Bula		50,000		
Bimtek Pengelolaan, Portal, Website	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan, Portal, Website	Jakarta		100,000		
Bimtek Penulisan Berita/Press Release	Terlaksananya Bimtek Penulisan Berita/Press Release	Bula		250,000		
Pelatihan Operator Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pelatihan Operator Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Bula		50,000		
<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>				<b>200,000</b>		
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebarluasan Informasi kepada masyarakat			100,000		
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Tersedianya media informasi	15 Kecamatan		100,000		
<b>Program Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>				<b>585,000</b>		
Pembuatan Aplikasi Layanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Android (SiMAYA E-Office, Layanan Pengaduan Masyarakat, SBTLive)	Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Layanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Android	Bula		200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan Layanan Manggo Sky	Terlaksananya Pengadaan Layanan ManggoSky	Kilmury, Werinama, Bula Barat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, P. Gorom, Gorom Timur, Wakate, Teor		325,000		
Pembuatan Domain Id (Website) Desa	Terlaksananya Pembuatan Domain Id (Website) Desa	jakarta		60,000		
<b>Program pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah</b>				<b>300,000</b>		
Pengelolaan data PDRB/Inkesra	Terlaksananya Pengelolaan data PDRB/Inkesra	Bula		150,000		
Pengumpulan Data Suseda	Terlaksananya Pengelolaan Data Suseda			150,000		
<b>Program Tata Kelola Persandian</b>				<b>350,000</b>		
Bimtek Tata Kelola Sandi	Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Sandi	Jakarta, Makassar		100,000		
Sosialisasi /Workshop Bidang Persandian	Terlaksananya Sosialisasi /Workshop Bidang Persandian	Bula		250,000		
<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				<b>6,148,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>20,700,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>776,000</b>		
Penyediaan jasa komunikasi dan listrik	terlaksananya kegiatan pelayanan	bula	100%	30,000		
Penyediaan jasa kebersihan	terlaksanananya kebersihan kantor	bula	100%	36,000		
Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya atk	bula	100%	60,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bula	100%	50,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya kor	dalam/luar daerah	100%	600,000		
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			100%	<b>295,000</b>		
pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur	bula	100%	150,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan kerja	bula	100%	100,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	bula	100%	15,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	bula	100%	30,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>250,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	tersedianya SDM yang berkualitas		100%	250,000		
<b>Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan</b>				<b>390,000</b>	<b>350,000</b>	<b>750,000</b>
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	tersedianya barang beredar yang aman dikonsumsi	dalam daerah	100%	390,000		
Operasional dan Pengembangan UPTD Kemetrollogian Daerah	Tersedianya peralatan Kemetrollogian	Dalam Daerah	100%		350,000	500,000
Pendidikan dan pelatihan SDM Kemetrollogian	tersedianya pegawai tera di SBT	luar daerah	100%		-	250,000
<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	<b>Terlaksananya Program</b>			<b>375,000</b>	-	-
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	terdapatnya produk hasil industri sesuai standart	dalam/luar daerah	100%	375,000		
<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah</b>				<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	-
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumberdaya	Berkembangnya IKM	Dalam daerah	100%	250,000	1,500,000	
Identifikasi potensi unggulan	terlaksananya pendataan	dalam daerah	100%	500,000		
Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya		Teluk Waru	100%	750,000		
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</b>				<b>245,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,600,000</b>
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha kecil menengah dan koperasi	berkembangnya koperasi dan UKM	sbt	100%	245,000		
Pembangunan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah (Gallery)	tepenuhnya pemasaran produk UMKM	sbt	100%		4,000,000	4,000,000
Pembangunan Rumah Kemasan		Teluk Waru	100%			350,000
Pengadaan Mesin Pencetak Logo Kemasan		Teluk Waru	100%			250,000
<b>Perogram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>				<b>567,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000,</b>

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya monev	sbt	100%	287,000		
Penguatan Usaha Bagi Koperasi dan UMK	terbentuknya Koperasi dan UMKM yang kuat	sbt	100%	100,000		
Penghargaan Koperasi Award untuk koperasi berprestasi tahun 2018 di kab. SBT	terlaksananya pemberian penghargaan bagi koperasi	sbt	100%		1,000,000	1,000,000
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Teluk Waru	100%	180,000		
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				<b>1,750,000</b>	<b>250,000</b>	<b>13,350,000</b>
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	terlaksananya pengembangan pasar dan produk	dalam/luar daerah	100%	350,000		
Pengadaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dalam daerah	100%	100,000		100,000
Pengawasan Pelayanan Pasar	PAD	dalam daerah	100%	350,000		
Pelaksanaan Pasar Murah	tercapainya pelaksanaan pasar murah	dalam daerah	100%	250,000	250,000	250,000
Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Rakyat	tersbangunnya sarana perdagangan	dalam daerah	100%	150,000		5,000,000
Pengadaan Bantuan Sarana Bagi Pedagang Berupa Tenda dan Gerobak	tersedianya tenda dan gerobak usaha	dalam daerah	100%			6,000,000
Pembangunan Gudang Resi	tersedianya gudang resi	dalam daerah	100%			1,000,000
Pembangunan Gudang Non Resi	tersedianya gudang Non resi	dalam daerah	100%			1,000,000
Pengembangan Sistem Pemasaran Online		Teluk Waru	100%	50,000		
Bantuan Kapal Motor dan Penumpang		Teluk Waru		500,000		
<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>terlaksananya program</b>			-	<b>200,000</b>	<b>1,000,000</b>
Penguatan Modal bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	tersedianya Modal bagi pedagang kaki lima	dalam daerah	100%		200,000	1,000,000
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>28,900,000</b>		
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				375,000		
Penyediaan jasa Surat Menyurat				10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor				20,000		
Penyediaan jasa				15,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
kebersihan Kantor						
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20,000		
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah				300,000		
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				1,880,000		
Pengadaan Sewa Gedung Kantor				80,000		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional				250,000		
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				50,000		
Pembangunan Gedung Kantor BPBD				1,500,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				200,000		
Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal				200,000		
<b>Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana</b>				1,450,000		
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam				200,000		
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana ( PRB )				800,000		
Pembuatan rambu-rambu jalur evakuasi				100,000		
Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kabupaten				350,000		
<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>				7,100,000		
Pengadaan Logistik Tanggap Darurat				400,000		
Penyediaan Alat Dan Peralatan Logistik Penanggulangan Bencana				300,000		
Pengambilan Buffer Stock Barang Logistik				300,000		
Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi				500,000		
Pengadaan Obat-obatan, Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang dan Hunian Sementara				200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Bimbingan teknis peningkatan Sumber daya aparatur dalam rangka penanggulangan resiko bencana.				200,000		
Pembentukan & Pelatihan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan				100,000		
Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana				100,000		
Persediaan Dana Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur				5,000,000		
<b>Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>				13,895,000		
Relokasi Pembangunan Permukiman Korban Bencana Alam Negeri Adm. Salagor Air				8,320,000		
Pembangunan Drainase Desa Tansi Ambon Akibat Bencana Alam				200,000		
Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Adm. Adar				1,625,000		
Pembangunan Penahan Banjir Penahan Banjir Desa Rumanamakotawow Akibat Bencana Alam				3,750,000		
<b>Rehabilitasi Talud/Bronjong Pengaman Tanah</b>				1,000,000		
Pembangunan Talud Penahan Ombak Akibat Bencana Alam, Negeri Adm. Aran Tuha Baas				500,000		
Rehabilitasi Talud Penahan Ombak Akibat Bencana Alam Desa Namalean, Kec. P. Gorom				500,000		
<b>Rehabilitasi Jembatan</b>				1,000,000		
Rehabilitasi Jembatan Akibat Korban Bencana Alam				1,000,000		
<b>Drainase</b>				1,000,000		
Rehabilitasi/Rekonstruksi Drainase/gorong - gorong melindungi sarana permukiman masyarakat korban				1,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
bencana Alam						
<b>Pembangunan Jaringan Air Bersih</b>				700,000		
Pembangunan Jaringan Air Bersih Akibat Bencana Kekeringan, Neg. Adm. Air Kampung Kecamatan Kesui.				400,000		
Pembangunan Jaringan Air Bersih Akibat Bencana Kekeringan, Desa Kinali Kecamatan P. Gorom.				300,000		
<b>Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana</b>				300,000		
Pelatihan bagi masyarakat korban bencana pasca terjadinya bencana alam				300,000		
<b>DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>1,713,800</b>		
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>			<b>354,750</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				24,200,		
Penyediaan Alat Tulis Kantor				36,550,		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				15,000		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah				250,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Kinerja Aparatur</b>			<b>80,000</b>		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				30,000		
Pengadaan/Sewa Gedung Kantor				50,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>29,050</b>		
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				29,050		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			<b>250,000</b>		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				250,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Promosi &amp; Kerjasama Investasi</b>			<b>500,000</b>		
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha				500,000		
Penyelenggaraan Pameran Investasi				340,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Kapasitas pelayanan Perizinan</b>			<b>500,000</b>		
Peningkatan Pelayanan Perizinan				500,000		
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				<b>5,125,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>515,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Sistem Pengelolaan Administrasi yang Efektif dan Efisien	Bula	100%	20,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bula	100%	25,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bula	100%	25,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bula	100%	45,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bula	100%	50,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bula	100%	150,000		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dalam Dan Luar Daerah	100%	200,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>2,435,000</b>		
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Bula	100%	1,500,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas	Bula	100%	400,000		
Penggadaan / Sewa Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula	100%	60,000		
Pengadaan Meubeler	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	150,000		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	50,000		
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	25,000		
Belanja Kendaraan Dinas	Tersedianya 10 Unit Kendaraan Dinas	Bula	100%	200,000		
Pengadaan / Sewa Sewa Gedung Pelayanan (Perpustakaan)	Adanya Gedung Kantor	Bula	100%	50,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>200,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bula	100%	200,000		
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				<b>1,300,000</b>		
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Perpustakaan dan Indeks Minat Baca	Ambon jakarta	100%	50,000		
Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Perpustakaan dan Indeks Minat Baca	Bula dan Tersebar	100%	200,000		
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan kusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dalam Daerah	100%	150,000		
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Meningkatnya Pustaka Bahan Koleksi yang Memadai	Bula	100%	150,000		
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Meningkatnya Pustaka Bahan Koleksi yang Memadai	Bula	100%	200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Sosialisasi, Publikasi, Promosi, Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Perpustakaan dan Indeks Minat Baca	Werinama, Siwalalat, P. Goro m, LianVitu	100%	200,000		
Pengembangan Perpustakaan Digital	Meningkatnya Otonomi Layanan Perpustakaan	Bula	100%	200,000		
Beda Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kecamatan	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan di Desa dan Kecamatan	Tersebar 10 Desa	100%	150,000		
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>				<b>300,000</b>		
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Kearsipan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Kearsipan	Ambon, Jakarta	100%	100,000		
Sosialisasi Arsip Masuk Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan di Desa	Bula	100%	200,000		
<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>				<b>375,000</b>		
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip	Bula	100%	100,000		
Penyusunan dan Penerbitan Naska Sumber Arsip	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Bula	100%	200,000		
Bedah Arsip di SKPD	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Bula	100%	75,000		
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>8,340,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>3,150,000</b>
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Peningkatan Pelayanan Publik			<b>850,000</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik	Dinas	12 bulan	55,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas	12 bulan	35,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas	12 bulan	30,000		
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Dinas	12 bulan	30,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinas	2 Paket	350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Tersebar	12 bulan	350,000		
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan Kinerja Aparatur			<b>400,000</b>		
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas	1 Keg.	20,000		
Pengadaan Kendaraan Operasioanl Dinas	Tersedianya kendaraan Dinas bagi aparatur	Dinas	1 Paket	80,000		
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas	2 Unit	100,000		
Pembangunan Pagar Kantor	Pengamanan terhadap peralatan khusus	Bula	1 Paket	200,000		
<b>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Meningkatnya Sumberdaya aparatur			<b>700,000</b>		
Magang Aparatur pada Lokal Budidaya	Tersedianya SDM yang siap dipakai	Ambon	1 Keg.	300,000		
Penyediaan Data Statistik Perikanan	Tersedianya Data Statistik Perikanan	Tersebar	1 Keg.	400,000		
<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya			<b>650,000</b>		
Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	4 Kecamatan	200 org	650,000		
<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	Tersedianya kawasan Budidaya			<b>1,400,000</b>		<b>450,000</b>
Identifikasi dan inventarisasi lahan potensial budidaya perikanan	Tersedianya Data Pembudidaya	Tersebar	1 Keg.	150,000		
Percontohan Budidaya Air laut (Pengadaan KJA & KJT)		Kec. Seram Timur (kiltai, urung), P Gorom		750,000		
Percontohan Budidaya Air Payau (Pengadaan Tambak Udang)		Kec. Tutuktolu (Kufar)		500,000		
Bantuan Armada dan Alat Tangkap		Teluk Waru				450,000
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap</b>			<b>400,000</b>	<b>350,000</b>	<b>2,700,000</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan alat bantu penangkapan	Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	Kec Seram Timur, Gorom, Gorom Timur,	1 Keg.			2,700,000
Seleksi dan Identifikasi Calon Penerima Bantuan	Tersedianya calon penerima bantuan yang sudah di identifikasi		1 Keg.	100,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan	Kec. Seram Timur, P.Gorom, dan Wakate	1 Keg.		350,000	
Penyusunan Detail Design dan Fisibility Study TPI	Tersedianya tempat/sentra produksi untuk pembangunan TPI	Kec. Bula, Seram Timur, P.Gorom, werinama dan Teor	1 Keg.	300,000		
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	Tersedianya Sarana & Prasarana Pemasaran			<b>1,940,000</b>	<b>2,200,000</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Peningkatan Mutu	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan dan peningkatan mutu	Kec. Bula, Seram Timur, P.Gorom, dan Gorom Timur	1 Keg.	350,000		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran	Kec. Bula, Seram Timur, P.Gorom, dan Gorom Timur	1 Keg.	200,000		
Rehabilitasi Bangunan Cold Storage PPI	Tersedianya Cold Storage PPI Tamher Timur	Kec. Wakate	1 Keg.		700,000,	
Penyediaan Sarana Rantai Dingin	Tersedianya sarana dan prasarana Sarana Rantai Dingin	Kec. Seram Timur	1 Keg.		1,500,000	
Produksi aneka empek empek ikan laut berbahan sagu		Teluk Waru		540,000		
Magang Produksi Di Palembang		Teluk Waru		60,000		
Pengadaan Peralatan Produksi		Teluk Waru		150,000		
Produksi aneka kripik dan kerupuk Ikan		Teluk Waru		150,000		
Produksi Ikan Asin berkadar garam rendah		Teluk Waru		60,000		
Produksi abon berbagai jenis Ikan		Teluk Waru		120,000		
Pengadaan peralatan Pengolahan aneka kripik dan kerupuk Ikan		Teluk Waru		60,000		
Pengadaan Peralatan Produksi abon berbagai jenis ikan		Teluk Waru		60,000		
Pengadaan Peralatan Produksi ikan asin berkadar garam rendah		Teluk Waru		40,000		
Pengadaan pengolahan produksi hasil perikanan		Teluk Waru		150,000		
<b>Program Pemberdayaan Usaha Kelompok Nelayan</b>				<b>2,000,000</b>		
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir	Tersedianya Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat			500,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembinaan dan Penguatan kapasitas kelembagaan nelayan	tersediaanya pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan	Kec. Bula, Seram Timur, P.Gorom,Wakate dan Teor	1 th	1,500,000		
<b>DINAS PARIWISATA</b>				<b>4,155,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>6,500,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>385,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat	Bula		10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersediaanya Jasa Komunikasi & Sumberdaya Air dan Listrik	Bula		20,000		
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Tersediaanya Bahan Cetak & Penggandaan	Bula		25,000		
Penyediaan ATK	Tersediaanya Alat Tulis Kantor	Bula		30,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dalam & Luar Daerah	Tersebar		300,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>			<b>120,000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersediaanya Perizinan & Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Bula		20,000		
Penyediaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersediaanya Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Bula		100,000		
<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				<b>1,750,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>6,500,000</b>
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6. Kec			3,500,000	6,500,000
Pengembangan Desa Wisata	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Desa Wisata	Pulau Gorom		350,000	700,000	
Peningkatan Transportasi Wisata	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Transportasi Wisata	Bula		1,400,000		
<b>Program Pengembangan Pemasaran</b>				<b>1,450,000</b>		
Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran wilayah	Terlaksananya Kegiatan Analisa objek Wisata	Bula	Penyebaran informasi dan daya tarik Wisata	200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	Terlaksananya Festival Kataloka	Pulau Gorom	Tercapainya kegiatan promosi pariwisata	1,000,000		
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan	Bula, Ambon	tersedianya SDM pemandu pariwisata	250,000		
<b>Program Pengembangan Kapasitas</b>				<b>450,000</b>		
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Menbangun Kerjasamanya yang baik dengan lembaga terkait (WWF)	Kecamatan		450,000		
<b>DINAS PERTANIAN</b>				<b>11,495,000</b>		<b>35,900,000</b>
<b>Pelayanan Administarsi perkantoran</b>				<b>520,000</b>		
Penyedia Jasa Surat Menyurat		Bula		20,000		-
Penyedia Jasa Komonikasi Sumber daya Air dan Listrik.		Bula		50,000		-
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor		Bula		50,000		-
Penyedia Alat Tulis Kantor		Bula		50,000		-
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan		Bula		50,000		-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		Ambon, Jakarta		300,000		-
<b>Program peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur</b>				<b>500,000</b>		<b>0</b>
Pendidikan dan pelatihan formal (Pelatihan Inseminasi Buatan/IB dan PKB, Bimtek Penyuluh/Diklat Teknis dan Magang, Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Bercocok tanam (kultur jaringan), Bimtek Perencanaan, Bimtek Tenologi Perkebunan.		Ambon, Jakarta, Makassar, Malang, Riau		500,000		-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>150,000</b>		<b>0</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Bula		100,000		-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Bula		50,000		-
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>				<b>2,900,000</b>		<b>10,100,000</b>

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengembangan pertanian Pada lahan kering (kebun negeri)		Kec, P. Gorom, Seram Timur, teluk waru, kilmuri, siwalalat, gorom timur, lian fitu, kian darat, Ukar Sengan		1,200,000		-
Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian (Kedelai, Ubi jalar Ubi Kayu)		Teor, Wakate, P.Gorom, Seram Timur, P. Panjang, Kilmuri, Ukar Sengan, Bula Barat		-		1,850,000
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (padi 500 ha dan Jagung 10.000.000 ha)		15 Kecamatan		-		8,250,000
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan		Siwallat, Werinama, Kilmuri, Ukar sengan, Kian Darat, Lian Vitu, Tutuk Tolu, Teluk Waru, Bula, Bula Barat		700,000		
Monitoring dan Evaluasi		15 Kecamatan		1,000,000		-
<b>Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>				<b>325,000</b>		-
Pengelolaan Informasi Pasar Hasil Produksi Pertanian (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Pertanian Terpadu)		15 Kecamatan		325,000		-
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna</b>				<b>700,000</b>		-
Pengadaan Sarana prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna( Mesin Pengering Cengkeh dan Pala)		Pulau Gorom, Tutuk Tolo		500,000		-
Pembangunan rumah pengasapan kopra dan lantai jemur serta sarana penunjang		Seram Timur, Pulau Parang		200,000		-
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>				<b>2,050,000</b>		-
Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan		Tutuk Tolu, Kian Darat, Lian Vitu, , Seram Timur, Pulau Gorom, Gorom Timur, Wakate, Teor dan Pulau Panjang		700,000		
Peyediaan Sarana Pengaman Kebun Tanaman Perkebunan		Waru, Bula Barat		750,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan (Pengendalian OPT)		Kian Darat, Lian Vitu, Pulau Gorom, Gorom Timur, Wakate, Teor, Kilmury		600,000		
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>				<b>1,150,000</b>		<b>1,000,000</b>
Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Dinas		1,150,000		-
Pengadaan sarana pendukung balai penyuluh pertanian (BP3K) di tingkat kecamatan		Dinas		-		500,000
Pengadaan kendaraan roda dua penyuluh PNS dan THL		Dinas		-		500,000
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>				<b>250,000</b>		<b>500,000</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Bula, Bula Barat		250,000		500,000
<b>Pengembangan Agribisnis Peternakan</b>				<b>1,500,000</b>		<b>1,750,000</b>
- Pengembangan Ternak Kambing		5. Kec( Kilmuri, Tutuk Tolo, Werinama, Bula Barat, Teor		750,000		750,000
- Pengembangan Ternak Ayam petelur		5. kec ( Bula, Siwalat, Kilmuri, Seram Timur, Tutuk Tolo)		250,000		-
- Integrasi Ternak Perkebunan Rakyat		P. Gorom		500,000		-
- Sarana Pendukung Poskeswan dan Balai Pembibitan Ternak		Bula, Bula Barat				1,000,000
<b>Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan</b>				<b>600,000</b>		-
Pengembangan Tanaman Hortikultura Sayuran (Bawang Merah)		Bula		500,000		-
Pemeliharaan Pohon Induk Durian Gumumae		Dawang		100,000		-
<b>Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian</b>				<b>2,000,000</b>		<b>23,050,000</b>
Pembangunan /perbaikan sumber sumber air ( Irigasi air Tanah Dangkal/dalam, embung, dam parit / Long storage						

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
- Pembangunan long stroage		Kec. Bula barat		-		550,000
- Pembangunan jaringan irigasi tanah dalam		Kec. Bula barat		-		2,000,000
- Pembangunan Embung		Kec. Kian Darat, Kec. Tutuk Tolu, Kecamatan Lian Vitu		-		900,000
- Perbaikan Embung		bula barat, bula				1,350,000
- Perbaikan Dam Parit		bula barat,				550,000
- Pembangunan jaringan irigasi perpipaan/pompanisasi		Kec. Bula barat		-		1,200,000
- Pembangunan jalan usaha tani (10 KM)		Kec. Bula barat		-		5,500,000
- Perbaikan jalan usaha tani		Kec. Bula barat		-		2,250,000
- Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam		Kec. Bula barat		-		2,000,000
- Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		P. Gorom, Gorom Timur, Wakate, Seram Timur		-		3,000,000
Pembangunan RMP ( Rice Miller Procesion)		Bula Barat		2,000,000		-
Pembangunan Irigasi Permukaan		Bula Barat				3,750,000
Perbaikan Irigasi Permukaan		Bula Barat				2,000,000
Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)		Bula				650,000
Sarana Pendukung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)		Bula				500,000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		Bula Barat				2,000,000
<b>SEKERTARIAT DAERAH</b>				<b>98,018,589</b>		
<b>SEKERTARIAT DAERAH</b>				<b>24,344,920</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>17,150,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				550,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				750,000		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				550,000		
Penyediaan alat tulis kantor				950,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				850,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				200,000		
Penyediaan makanan dan minuman				1,850,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				11,450,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>4,744,920</b>		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				1,252,920		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				400,000		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				647,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				850,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				650,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				945,000		
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>200,000</b>		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				200,000		
<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>				<b>1,400,000</b>		
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA				250,000		
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ departemen /Lembaga Pemerintah Non departemen / Luar negeri				400,000		
Operasional Inspeksi / Kunjungan Kepala Daerah				750,000		
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>850,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal				850,000		
<b>Bagian UMUM</b>				<b>30,550,000</b>		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>29,350,000</b>		
Pembangunan gedung kantor		Kec. Kab.		5,500,000		
Pembangunan Gedung Serbaguna		kec.Gorom		5,000,000		
Pengadaan mobil jabatan				2,000,000,000		
pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Kab.		2,500,000,000		
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Kec. Kab.		3,600,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor		Kab.		3,250,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengadaan mebeleur		Kec. Kab.		4,000,000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah /Dinas		Kec. Kab.		3,500,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>250,000</b>		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Relaisasi Kinerja SKPD		Kec. Kab.		250,000		
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>				<b>250,000</b>		
Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik		Kec. Kab.		250,000		
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>				<b>700,000</b>		
Pelayanan Penyelenggaraan Kantor Penghubung Pemda		Kec. Kab.		700,000		
<b>Bagian HUMAS dan Protokol</b>				<b>3,734,500</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>289,500</b>		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bula	100	25,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bula	100	48,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	Bula	100	175,500		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi	Bula	100	21,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bula	100	20,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>125,000</b>		
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan keprotokolan dan kehumasan	Bula	70	125,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH</b>				<b>370,000</b>		
Presentase Kegiatan Kepala daerah yang didokumentasikan	Jumlah dokumentasi yang didokumentasikan / jumlah dokumentasi pemerintah daerah x 100%	Bula	70	200,000		
Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah	Bula	77	170,000		
<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA BERITA</b>				<b>450,000</b>		
Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan prosentase pemberitaan positif di media masa tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Bula	80	300,000		
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersusunnya buku/majalah data dan informasi pembangunan daerah	Bula	80	150,000		
<b>PROGRAM PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER</b>				<b>1,300,000</b>		
Pendampingan Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH	Terselenggaranya informasi/dokumentasi dan protokoler KDH/WKDH pada kunjungan kerja 15 kecamatan	Bula		850,000		
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah	Terselenggaranya tata laksana dan protokol pelayanan/penerimaan kunjungan tamu daerah	Bula		200,000		
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan	Bula	80	250,000		
<b>Program PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>				<b>1,200,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Terselenggaranya Upacara dan Acara	Terselenggaranya Tata laksana dan protokol acara dan upacara hari besar nasional, agama, dan daerah	Bula		1,200,000		
<b>Bagian KESRA</b>				<b>20,739,169</b>		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN</b>				<b>19,239,169</b>		
- Fasilitasi Aparatur dalam Bidang Keagamaan				2,723,340		
- Fasilitasi Kegiatan LPTQ				3,500,000		
- Fasilitasi Kegiatan LASQI				1,750,000		
Peningkatan Pelayanan Keagamaan				5,169,950		
- Fasilitasi Kegiatan MUI				750,000		
- Fasilitasi Kegiatan Pesparawi				950,000		
- Fasilitasi Kegiatan Ibadah Haji				1,750,000		
Pembinaan Pelayan Keagamaan				645,879		
Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rumah Ibadah				2,000,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN</b>				<b>1,500,000</b>		
Pemberian Bea Siswa bagi siswa tidak mampu				1,000,000		
fasilitasi Operasional pada majelis ta'lim, TPA TPQ				500,000		
<b>Bagian ORTALA</b>				<b>1,720,000</b>		
<b>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>				<b>745,000</b>		
Penyusunan LAKIP Kabupaten Thn 2017	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Bula	60 dokumen	255,000		
Penyusunan TAPKIN Thn 2018	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Bula	60 dokumen	245,000		
Penyusunan IKU Kabupaten Thn 2018	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Bula	60 dokumen	245,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah</b>				<b>650,000</b>		
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah	Bula	60 dokumen	250,000		
Bimtek Peningkatan Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur	Tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah	Luar Daerah	1 keg	150,000		
Penyusunan standar kompetensi jabatan	Tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah	Bula	60 dokumen	250,000		
<b>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>				<b>325,000</b>		
penyusunan tata naskah dinas	Tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah	Bula	60 dokumen	150,000		
pelayanan kinerja unit pelayanan publik	Tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah	Bula	1 keg.	175,000		
<b>Bagian TATA PEMERINTAHAN</b>				<b>11,300,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>Program Penataan Daerah Otonom Baru</b>				<b>6,700,000</b>		
Fasilitasi Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif	Tersedianya Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif Definitif			1,000,000		
Fasilitas Pelantikan Camat, Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif	Tersedianya Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif Definitif			1,000,000		
Fasilitasi Pemekaran Kecamatan dan Negeri Adm Baru	Kecamatan dan Negeri Administratif Pemekaran			1,000,000		
Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa	Tersedianya Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif Definitif			2,000,000		
Pembakuan Nama Rupa Bumi	Tersedianya Nama Rupa Bumi			100,000		
Penomoran Kode Wilayah	Tersedianya Kode Wilayah Kecamatan dan Desa			500,000		
Fasilitasi Pembuatan Tugu Tapal Batas antar Daerah	Tugu Batas Daerah			1,100,000		
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>				<b>4,600,000</b>		
Bimtek Camat dan Kades	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			1,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat Koordinasi	Penguatan Aparatur Kec dan Desa			200,000		
Penyusunan LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			800,000		
Penyelesaian Masalah-Masalah Pemerintahan	Terpenuhinya Pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik bagi Aparatur Pemerintahan			1,300,000		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel			500,000		
Pembuatan Taman Kecamatan	Terpenuhinya Pembangunan Taman Kecamatan	Kec Gorom, Werinama dan Bula				1,000,000
Pembuatan Wabe Site Kecamatan	Tercapainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan			800,000		
<b>Bagian EKBANG</b>				<b>950,000</b>		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>350,000</b>		
Bimtek Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Tercapainya peningkatan sistem Pengawasan dan Pengerndalian	Kab		350,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>600,000</b>		
Penyusunan Laporan Pembangunan Tahunan	Tercapainya Data dan informasi	Kab		200,000		
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Data dan informasi	Tersebar		400,000		
<b>Bagian ULP</b>				<b>3,030,000</b>		
<b>Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa</b>				<b>1,730,000</b>		
<b>Layanan pengadaan barang/jasa</b>				<b>630,000</b>		
- Layanan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			100%	500,000		
Pemeliharaan/Maintenance Server <a href="http://lpse.sbtkab.go.id">lpse.sbtkab.go.id</a>			100%	80,000		
- Pembaharuan Sertifikasi PBJ			100%	50,000		
<b>Bimtek layanan pengadaan barang/jasa</b>				<b>1,100,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Bimbingan Teknis</b>						
- BIMTEK Penggunaan Aplikasi SiRUP			100%	200,000		
- Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)			100%	300,000		
- Pembekalan & Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa			100%	600,000		
<b>Program Kemitraan</b>				<b>200,000</b>		
- Kerjasama dengan Organisasi Profesi/Lembaga Dalam Bidang Lainnya			100%	100,000		
- Kerjasama dengan LKPP untuk meningkatkan Kompetensi PBJ			100%	100,000		
<b>Bagian Hukum</b>				<b>1,650,000</b>		
Penyuunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	Terwujudnya Tata Hukum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang berkepastian hukum dan keadilan ,mengakomodir nilai nilai hukum adat yang disesuaikan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagai hukum positif	Bula	100%	650,000		
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		15 Kec	100%	400,000		
Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Bula	100%	350,000		
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Perkada		15 Kec	100%	250,000		
<b>Inspektorat</b>				<b>5,067,250</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>662,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		7,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon & Internet, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		50,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		10,000		
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi	Bula		65,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
	Perkantoran					
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		30,000		
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bula		15,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dim & LD		485,000		
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			<b>754,250</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula		124,250		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula		25,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula		25,000		
Pembangunan pagar beton kantor	Terlaksananya pagar kantor yang memadai	Bula		500,000		
Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 / 4 unit.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Bula		80,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>300,000</b>		
Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dim & LD		300,000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>31,000</b>		
Penyusunan peningkatan sistem capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Tersedianya Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Bula		16,000		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Bula		15,000		
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh</b>				<b>1,785,000</b>		
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler selama 1 Tahun	15 Kecamatan		1,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	15 Kecamatan		215,000		
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya program sistem pengawasan internal & Pengendalian Kebijakan KDH	15 Kecamatan		270,000		
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya program sistem pengawasan internal & Pengendalian Kebijakan KDH	15 Kecamatan		300,000		
<b>Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>				<b>1,400,000</b>		
Sosialisasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	15 Kecamatan		400,000		
Pemeriksaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa	Terlaksananya program sistem pengawasan & pengendalian kebijakan KDH	15 Kecamatan		1,000,000		
<b>Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara</b>				<b>135,000</b>		
Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pengawasan instansi pemerintah (apip)	Terlaksananya Program sistem pengawasan Internal & Pengendalian kebijakan KDH	Bula		35,000		
Evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah oleh apip	Terlaksananya Program sistem pengawasan Internal & Pengendalian kebijakan KDH	Bula		100,000		
<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</b>				<b>6,319,170</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>869,469</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Sistem Pengelolaan Administrasi yang Efektif dan Efisien	Bula	100%	4,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bula	100%	300,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bula	100%	89,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bula	100%	76,469		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bula	100%	50,000		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Ambon, Makassar, Jakarta	100%	350,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>769,120</b>		
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Bula	100%	404,120		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Bula	100%	100,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	135,000		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	30,000		
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	50,000		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Bula	100%	50,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>743,140</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jakarta, Jogja	100%	393,140		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Belajar Untuk Calon Praja IPDN	Bula	100%	200,000		
Sosialisasi Urusan Bidang Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bula	100%	150,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>440,383</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Bula, Ambon	100%	440,383		
<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				<b>1,130,355</b>		
Pendidikan Penjurangan Struktural	Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Ambon	100%	1,130,355		
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>2,366,703</b>		
Seleksi Penerimaan Calon PNS	Peningkatan Pengembangan Aparatur	Bula, Makassar, Jakarta	100%	360,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Peningkatan Pengembangan Aparatur	15 Kecamatan, Ambon, Jakarta	100%	352,000		
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Peningkatan Pengembangan Aparatur	15 kecamatan SBT Ambon, Makassar, Jakarta	100%	516,000		
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Peningkatan Pengembangan Aparatur	Jatinangor	100%	60,000		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pengembangan Aparatur	15 Kecamatan SBT	100%	378,703		
Penyelesaian Berkas Kenaikan Pangkat dan Karpeg PNS	Peningkatan Pengembangan Aparatur	15 Kecamatan, Ambon, Makassar, Jakarta	100%	400,000		
Penyelesaian Berkas Pensiun	Peningkatan Pengembangan Aparatur	15 Kecamatan, Ambon, Makassar, Jakarta	100%	300,000		
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>20,420,000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>1,415,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat	Bula	100%	10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediaanya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bula	100%	200,000		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kondisi Kantor Dalam Keadaan Bersih dan Baik	Bula	100%	130,000		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dalam 1 Tahun	Bula	100%	150,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan Penggandaan	Bula	100%	100,000		
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediaanya Instalasi Penerangan kantor	Bula	100%	75,000		
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya peralatan rumah tangga	Bula	100%	50,000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaanya Makan dan Minum	Bula	100%	100,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bula	100%	600,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>1,060,000</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	100,000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	100,000		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	100,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	100,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	50,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	150,000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	160,000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bula	100%	300,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>525,000</b>		
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat	Bula	100%	175,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
	Perencanaan					
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	350,000		
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>3,000,000</b>		
Penyusunan Reviuw RPJPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	250,000		
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	150,000		
Penetapan RPJPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	100,000		
Penyusunan Rancangan RKPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	250,000		
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	700,000		
Penetapan RKPD	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	150,000		
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	50,000		
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	300,000		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan	100%	250,000		
Penyusunan KUA dan PPAS APBD	dokumen Rancangan KUA dan PPAS	Bula	100%	350,000		
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Tersedianya Dana Untuk Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2015	Bula	100%	300,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyusunan RKPD Perubahan	Tersedianya Dana untuk Kegiatan Penyusunan RKPD 2016	Bula	100%	150,000		
Fasilitasi pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dokumen selesai tepat waktu dan sesuai RPJM					
Evaluasi pencapaian RKPD	dokumen Evaluasi pencapaian RKPD			50,000		
Penyelenggaraan Musyawarah teknis/ forum SKPD	kesepakatan teknis antar skpd			100,000		
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik</b>	<b>Tersedianya data dan informasi daerah</b>			<b>1,650,000</b>		
penyusunan profil daerah	Updating data dan informasi pembangunan daerah berkala	Bula	100%	300,000		
pengolahan data base perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data base perencanaan pembangunan daerah	Bula	100%	350,000		
pengolahan data indeks pembangunan desa	tersedianya data indeks pembangunan desa	Bula	100%	350,000		
monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Ada koordinasi dan kesepahaman pelaksanaan rencana pembangunan daerah	15 Kec	100%	300,000		
rakor evaluasi realisasi dan penyerapan anggaran daerah	adanya koordinasi dan kesepahaman tentang realisasi dan penyerapan anggaran daerah	dalam & Luar Daerah	100%	350,000		
<b>Program pengembangan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>tersajikannya data dan informasi pembangunan daerah yang enak dilihat dan dibaca</b>			<b>1,700,000</b>		
Penyusunan kajian ekonomi daerah	Dokumen Kajian ekonomi daerah Kabupaten	Kab & Kec	100%	350,000		
Penyajian profil sosial budaya	Penyajian profil sosial budaya (dokumen dan film)	Bula	100%	400,000		
Penyusunan Data Statistik Daerah	Penyusunan Data Statistik Daerah	Bula	100%	300,000		
Koordinasi, sinergisasi data dan informasi	Koordinasi data dan informasi	Bula	100%	350,000		
Penyelenggaraan penghargaan perencana tingkat kabupaten.	seleksi terbaik perencana untuk skpd tingkat kabupaten.	Bula	100%	300,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Penelitian dan pengembangan</b>	<b>Hasil survei berguna untuk pengembangan program</b>			<b>1,000,000</b>		
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Bula	100%	500,000		
Survei dan Kajian prioritas pengembangan produk unggulan	Dokumen Survei dan Kajian prioritas pengembangan produk unggulan	Bula	100%	500,000		
<b>Program koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah</b>	<b>adanya kesepahaman SKPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah</b>			<b>2,300,000</b>		
Fasilitasi Rapat-rapat koordinasi	Kesepahaman dan sinkronisasi data pengendalian			200,000		
Koordinasi Perencanaan Sosial	Dokumen Perencanaan Sosial	Bula	100%	200,000		
Penyusunan Perencanaan Penguatan Pengembangan Kawasan Pedesaan	Dokumen peranc. Penguatan pengembangan kawasan pedesaan	Bula	100%	350,000		
Evaluasi dampak pembangunan terhadap kemiskinan daerah	Dokumen Evaluasi dampak pembangunan terhadap kemiskinan daerah	Bula	100%	350,000		
Monev Program penanggulangan kemiskinan	Dokumen Monev penanggulangan kemiskinan	Bula	100%	300,000		
Survei identifikasi Tentang Kelembagaan Lokal	Laporan Survei Identifikasi Sosial Masyarakat SBT	Bula	100%	300,000		
Rakor RAD PPK	Koordinasi reguler RAD PPK	Bula & Ambon	100%	200,000		
Rakor tim kawasan pedesaan	Koordinasi reguler tim kawasan pedesaan	Bula	100%	200,000		
SDGs (Sistem Developmen Gols )	Dokumen Kajian peningkatan SDGs	Bula	100%	200,000		
<b>Program Perencanaan Budaya dan Pemerintah Daerah</b>	<b>Adanya kesepahaman antar SKPD melihat potensi dan permasalahan budaya</b>	Bula	100%	<b>1,400,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Rapat Koordinasi Budaya	Koordinasi Reguler Budaya	Bula	100%	200,000		
Penyusunan Dokumen Identifikasi Budaya	Dokumen Perencanaan Budaya	Bula	100%	500,000		
Semiloka Budaya	Dokumen Budaya	Bula	100%	400,000		
Penyusunan Profil Pendidikan	Dokumen Profil Pendidikan	Bula	100%	300,000		
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				<b>2,650,000</b>		
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Terpenuhinya Turunan dari RTRW Kab. SBT & Data Tata Ruang Kawasan Kecamatan	Kec. Pulau Panjang	100%	400,000		
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Program Perencanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersebar	100%	200,000		
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang	Kec. Kian Darat	100%	350,000		
Revisi Penyusunan Tata Transportasi Lokal	Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang	Kab.SBT	100%	350,000		
Penyusunan Dokumen RIPOW	Kajian strategis pengembangan Perumahan	Kab.SBT	100%	300,000		
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Terpenuhinya Turunan dari RTRW Kab. SBT & Data Tata Ruang Kawasan Kecamatan	Kec. Teor	100%	450,000		
Penyusunan Zoning Regulasi Kawasan ibu kota kabupaten hunimua	Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang	Kec.TT	100%	600,000		
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				<b>500,000</b>		
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Terlaksananya Program Pembangunan Sanitasi Permukiman		100%	250,000		
Fasilitasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Program Pembangunan Air Minum Pedesaan	Kab.SBT	100%	250,000		
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam</b>				<b>1,700,000</b>		
Penyusunan data base infrastruktur wilayah	Pemantauan Infrastruktur Wilayah Kabupaten seram Bagian	Kab.SBT	100%	700,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
	Timur					
Penyusunan Master plan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bula	100%	300,000		
Study Pengembangan Kawasan Kota Baru Air Nanang	Pengembangan potensial Kawasan Penyangga Hunimua			700,000		
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>				<b>1,520,000</b>		
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi lokal	Tersedianya Data Dan Informasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal	Kabupaten	100%	400,000		
Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD)	Kabupaten	100%	220,000		
Kajian strategi pengembangan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan lokal	Terlaksananya Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Lokal	Kabupaten	100%	350,000		
Kajian strategi peningkatan PAD,	Terlaksananya Kajian Strategis Peningkatan PAD	Kabupaten	100%	350,000		
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Dan Program Ekonomi	Dalam Dan Luar Daerah	100%	200,000		
<b>Kecamatan Bula</b>				<b>611,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>323,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				5,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				16,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				10,000		
Penyediaan alat tulis kantor				15,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30,000		
Penyediaan makanan dan minuman				50,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam				200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
dan luar daerah						
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>25,000</b>		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				15,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				10,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>20,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				20,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>200,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				200,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>40,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				40,000		
<b>Kecamatan Seram Timur</b>				<b>605,850</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>333,850</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				5,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				11,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				10,000		
Penyediaan alat tulis kantor				40,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30,000		
Penyediaan makanan dan minuman				37,850		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				200,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>32,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				10,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>30,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				30,000		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				160,000		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				160,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>Kecamatan Pulau Gorom</b>				<b>1,000,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>325,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				5,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				19,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				15,000		
Penyediaan alat tulis kantor				25,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				25,000		
Penyediaan makanan dan minuman				40,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				195,500		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>235,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				45,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				20,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				10,000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				150,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>30,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				30,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>350,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya				350,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
peningkatan wawasan kebangsaan						
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>60,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				60,000		
<b>Kecamatan Werinama</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>343,600</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				2,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				22,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				37,000		
Penyediaan alat tulis kantor				35,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				26,500		
Penyediaan makanan dan minuman				60,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				160,600		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>50,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				25,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				25,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>25,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				25,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>171,400</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				171,400		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>60,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				60,000		
<b>Kecamatan Tutuk Tolu</b>				<b>598,140</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>358,140</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				5,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				62,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan alat tulis kantor				15,640		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20,000		
Penyediaan makanan dan minuman				30,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				200,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>20,000</b>		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				10,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>20,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				20,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>150,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				150,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>Kecamatan Wakate</b>				<b>804,071</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>446,696</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				47,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				30,000		
Penyediaan alat tulis kantor				57,250		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30,000		
Penyediaan makanan dan minuman				45,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				226,946		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>80,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				50,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				30,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				57,375		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				57,375		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>150,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				150,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>70,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				70,000		
<b>Kecamatan Siwalalat</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>431,350</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				2,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				15,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		
Penyediaan alat tulis kantor				69,250		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				55,000		
Penyediaan makanan dan minuman				65,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				200,100		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>47,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				15,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>18,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				18,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>103,200</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				103,200		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,450</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,450		
<b>Kecamatan Kilmuri</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>336,165</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				29,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		
Penyediaan alat tulis kantor				25,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				14,028		
Penyediaan makanan dan minuman				35,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				197,737		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>32,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>25,050</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				25,050		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				206,785		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				206,785		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>Kecamatan Bula Barat</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>266,950</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				5,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				22,500		
Penyediaan alat tulis kantor				21,950		
Penyediaan barang cetakan dan				20,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
penggandaan						
Penyediaan makanan dan minuman				35,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				150,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>120,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				50,000		
Pengadaan mebeleur				50,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				20,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>13,050</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				13,050		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>200,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				200,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>Kecamatan Gorom Timur</b>				<b>837,950</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>425,950</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				32,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		
Penyediaan alat tulis kantor				48,450		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30,000		
Penyediaan makanan dan minuman				30,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				250,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>112,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				50,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				40,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>40,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				40,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>200,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				200,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>60,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				60,000		
<b>Kecamatan Pulau Panjang</b>				<b>1,000,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>344,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				11,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				22,000		
Penyediaan alat tulis kantor				35,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				40,000		
Penyediaan makanan dan minuman				26,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				200,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>376,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				60,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				50,000		
Pembangunan Rumah Dinas				266,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>30,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				30,000		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				200,000		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya				200,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
peningkatan wawasan kebangsaan						
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>Kecamatan Pulau Teor</b>				<b>1,000,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>440,000</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				40,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				10,000		
Penyediaan alat tulis kantor				20,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20,000		
Penyediaan makanan dan minuman				40,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				300,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>95,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				40,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				40,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				15,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>50,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				50,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>345,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				345,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>70,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				70,000		
<b>Kecamatan Teluk Waru</b>				<b>602,750</b>		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				265,750		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				22,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				15,000		
Penyediaan alat tulis kantor				33,250		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				15,000		
Penyediaan makanan dan minuman				20,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				150,000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>37,000</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				5,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>40,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				40,000		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				200,000		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				200,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>60,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				60,000		
<b>Kecamatan Kian Darat</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>409,200</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				15,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		
Penyediaan alat tulis kantor				54,400		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				42,850		
Penyediaan makanan dan minuman				55,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				206,950		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>15,175</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				9,175		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				6,000		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>30,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				30,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>150,000</b>		
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				150,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>45,625</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				45,625		
<b>Kecamatan Lian Fituh</b>				<b>650,000</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>375,700</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat				10,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				15,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				25,000		
Penyediaan alat tulis kantor				62,850		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				39,500		
Penyediaan makanan dan minuman				40,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				183,350		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>34,300</b>		
Pengadaan peralatan gedung kantor				22,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				12,300		
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>40,000</b>		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				40,000		
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>150,000</b>		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018		Pagu indikatif		
		Lokasi	Target Capaian	APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				150,000		
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>50,000</b>		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD				50,000		
<b>JUMLAH</b>				<b>552,938,379</b>	<b>267,665,000</b>	<b>580,682,000</b>

## BAB III. PENUTUP

RKPD Tahun 2018 berfungsi sangat penting karena menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerjanya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema pembangunan **“PERCEPATAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL”**. Selain itu pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 yang dijabarkan secara konkrit ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin dari penyelenggara pemerintahan dan peran serta aktif dari masyarakat dan diharapkan pemulihan ekonomi akan tampak dan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Untuk itu hasil dari Musrenbang yang selanjutnya dituangkan ke dalam RKPD ini harus mampu menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan, sehingga tercapai tujuan dari pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam kaitan ini pemerintah daerah bersama-sama masyarakat perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, diharapkan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



Lampiran 1.

NO	DOKUMEN	DASAR HUKUM	NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1.	RPJPD	PERDA KAB. SBT	NOMOR 14 TAHUN 2010		TELAH DIPERDAKAN
2.	RPJMD	PERDA KAB. SBT	NOMOR 09 TAHUN 2016		TELAH DIPERDAKAN
3.	PERUBAHAN RKPD 2017	PERBUP	NOMOR 08.a	JULI 2017	PERATURAN BUPATI
4.	PERUBAHAN KUA PPAS 2017	PERDA			-
5.	RKPD 2018	PERBUP			PERATURAN BUPATI
6.	KUA PPAS 2018	PERDA			-

Bula, 10 Juli 2017

Abdul Mukti Keliobas  
Bupati Seram Bagian Timur

Lampiran 2. Penyelesaian penyusunan RKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH					PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2017					RENJA PERANGKAT DAERAH 2018					Ket
		Status		Penetapan			Status		penetapan			Status		Penetapan			
		sudah	belum	Dasar hukum	Nomor	Tanggal	sudah	belum	Dasar hukum	Nomor	Tanggal	sudah	belum	Dasar hukum	Nomor	Tanggal	
1	Sekretariat daerah	v		-			v		-			v					
2	Sekretariat DPRD	v		-			v		-			v					
3	Dinas Pendidikan	v		-			v		-			v					
4	Dinas Kesehatan	v		-			v		-			v					
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	v		-			v		-			v					
6	Dinas Sosial	v		-			v		-			v					
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	v		-			v		-			v					
8	Dinas Ketahanan Pangan	v		-			v		-			v					
9	Dinas Lingkungan Hidup	v		-			v		-			v					
10	Dinas Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	v		-			v		-			v					
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	v		-			v		-			v					
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	v		-			v		-			v					
13	Dinas Perhubungan	v		-			v		-			v					
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	v		-			v		-			v					
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	v		-			v		-			v					
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	v		-			v		-			v					

	Satu Pintu																	
17	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	v		-		v		-			v							
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	v		-		v		-			v							
19	Dinas Pariwisata	v		-		v		-			v							
20	Dinas Pertanian	v		-		v		-			v							
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	v		-		v		-			v							
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	v		-		v		-			v							
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	v		-		v		-			v							
24	Inspektorat Daerah	v		-		v		-			v							
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v		-		v		-			v							
26	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah	v		-		v		-			v							
27	Kantor Komisi Pemilihan Umum	-	v	-		-	v	-			v							
28	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	v		-		v		-			v							
29	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	v		-		v		-			v							
30	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	v		-		v		-			v							
31	RSUD Bula	v		-		v		-			v							
32	Kec. Bula		v	-			v	-			v							
33	Kec. Bula Barat		v	-			v	-			v							
34	Kec. Pulau Gorom		v	-			v	-			v							
35	Kec. Werinama		v	-			v	-			v							
36	Kec. Siwalalat		v	-			v	-			v							
37	Kec. Teluk Waru		v	-			v	-			v							
38	Kec. Kian Darat		v	-			v	-			v							
39	Kec. Tutuk Tolu		v	-			v	-			v							

40	Kec. Seram Timur		v	-				v	-			v					
41	Kec. Kilmuri		v	-				v	-			v					
42	Kec. Gorom Timur		v	-				v	-			v					
43	Kec. Pulau Panjang		v	-				v	-			v					
44	Kec. Siritaun Wida Timur		v	-				v	-			v					
45	Kec. Wakate		v	-				v	-			v					
46	Kec. Teor		v	-				v	-			v					
JUMLAH																	